



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PENETAPAN PERUBAHAN  
RENCANA STRATEGIS  
(RENSTRA)  
TAHUN 2019 -2023**

---

**DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,  
KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH  
TAHUN ANGGARAN 2022**

Jl. Basuki Rahmat No. 55 Samarinda 75117  
Telp. (0541) 742482 Fax. (0541) 742495  
Website: <http://indagkop.kaltimprov.go.id>



## KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji dan rasa syukur kehadirat Allah SWT, kami telah dapat menyusun Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah untuk Tahun Anggaran 2019-2023. Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur Lima Tahunan ini berpijak pada hasil Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019 - 2023). Pelaksanaan Perubahan Rencana Strategis Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur ini didukung sumber dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur . Perubahan Rencana Strategis ini memuat target, tujuan, sasaran, serta strategi implementasi yang ditetapkan. Dengan adanya Perubahan Rencana Strategis ini, diharapkan dapat dijadikan pedoman pelaksanaan tugas bagi seluruh aparat Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur , sehingga dalam pelaksanaan kegiatan operasionalnya nanti memiliki kompetensi dan rasa kebersamaan untuk menuju sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Demikian, semoga Perubahan Rencana Strategis Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur ini dapat memberikan manfaat bagi kelancaran tugas dan peningkatan kinerja aparat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Provinsi Kalimantan Timur.



**PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KRCIL DAN MENENGAH  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019-2023**

---

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	7
1.3 Maksud dan Tujuan.....	10
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.....	13
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah .....	13
2.2 Sumber Daya Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Timur.....	23
2.3 Kinerja Pelayanan DISPERINDAGKOP dan UKM Provinsi Kalimantan Timur.....	28
BAB III ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI .....	86
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM .....	86
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih .	99
3.3 Telaahan Renstra Kementerian dan Renstra Kabupaten/Kota .....	102
3.4 Telaahan Terhadap Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	104
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis .....	108
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	114
4.1 Tujuan dan Sasaran jangka Menengah Perangkat Daerah .....	114
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	122
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	124
6.1 Rencana Program dan Kegiatan .....	124
6.2 Pendanaan Indikatif.....	128
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN INDAGKOP .....	146
BAB VIII PENUTUP .....	148



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

#### 1.1.1 Pengertian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Dalam proses penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah (PD) ini disusun berdasarkan aturan terbaru yakni Surat Edaran Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 050/0214/B.P3D-Bapp/2021 tentang Sinkronisasi Penyusunan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023. Dengan berlakunya aturan tersebut maka terjadi perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) yang berdampak pada adanya perubahan di beberapa tugas dan fungsi bidang maupun seksi, sehingga berdampak pada perubahan beberapa kegiatan untuk menyesuaikan dan memenuhi serta mendukung baik capaian Program, Sasaran maupun Tujuan sesuai dengan Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Dengan adanya perubahan Renstra ini maka diharapkan terjadi keselarasan antara, Renstra PD dengan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh PD dapat mendukung tujuan pembangunan daerah sebagaimana tertuang di dalam RPJMD (perubahan). Dalam proses penyusunan perubahan Renstra sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Bab I Pasal 1 yang berbunyi “Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah untuk periode 5



**PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KRCIL DAN MENENGAH  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019-2023**

---

(lima) tahun”, perencanaan di Daerah ada dua yakni Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Perangkat Daerah, khusus Rencana Perangkat Daerah sebagaimana pasal 11 ayat (3) disebutkan Rencana Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas : (a) Renstra Perangkat daerah; dan (b) Renja Perangkat Daerah. Dalam Pasal pasal 13 ayat (1) “Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan / atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas atau fungsi setiap Perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dalam menyusun Perubahan Renstra PD mengikuti alur sesuai dengan urutan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Penyusunan Perubahan Rencana Strategi Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 mengacu pada Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur 2019-2023 (Perubahan) dengan menyesuaikan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur serta pagu yang bersifat indikatif. Penyusunan Perubahan Renstra Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur ini menjelaskan arah kebijakan termasuk program dan kegiatan dalam upaya peningkatan kualitas koperasi dan usaha mikro di Provinsi Kalimantan Timur, selain itu Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) akan menjadi pedoman dalam penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja PD setiap tahunnya. Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan



Menengah Provinsi Kalimantan Timur dalam penyusunan Rencana Strategi (perubahan) menjelaskan arah kebijakan termasuk program dan kegiatan dalam upaya pembinaan dan pemberdayaan Sektor Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Sektor Perindustrian dan Sektor Perdagangan di Provinsi Kalimantan Timur serta menjadi pedoman dalam penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja PD (Renja PD) setiap tahunnya.

### **1.1.2 Proses Penyusunan Renstra PD (Perubahan)**

Sehubungan dengan adanya Perubahan Aturan perundang-undangan berdasarkan Surat Edaran Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 050/0214/B.P3D-Bapp/2021 tentang Sinkronisasi Penyusunan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023. Dengan maksud tidak mengurangi perjalanan perencanaan pada Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur maka Review Renstra Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dapat dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, pasal 359 disebutkan "Tahapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 108 sampai dengan pasal 124 berlaku.

Berdasarkan Permendagri 86 Tahun 2017 disebutkan Rencana Pembangunan daerah dan rencana Perangkat Daerah pasal 11 ayat (3) Rencana Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) : terdiri atas (a) Renstra Perangkat Daerah; dan (b) Renja Perangkat Daerah, sedangkan dalam pasal 13 Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (3) huruf a memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau



Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Dalam proses penyusunan Review Renstra ini juga memperhatikan pada pasal 16 ayat (2) Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (3) disusun dengan tahapan :

- a. persiapan penyusunan;
- b. penyusunan rancangan awal;
- c. penyusunan rancangan
- d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah / Lintas Perangkat Daerah;
- e. perumusan rancangan akhir; dan
- f. penetapan

Dalam penyusunan perubahan tersebut rancangan Renstra sesuai amanat pasal 60 ayat (1) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah.

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) kepada BAPPEDA untuk di verifikasi, dan pada pasal 60 ayat (2) disebutkan "Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), "untuk memastikan kesesuaian rancangan awal renstra Perangkat Daerah dengan Rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud pada pasal 57".

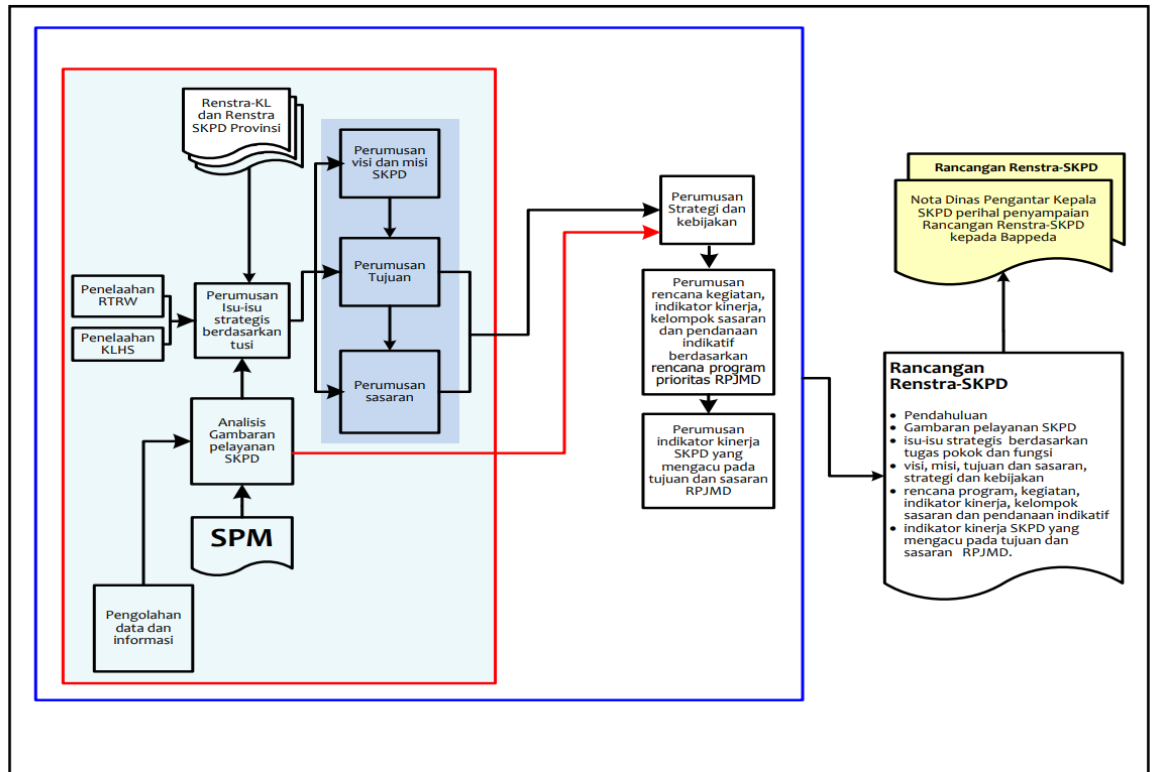
Dalam Proses penyusunan rancangan renstra Perangkat Daerah disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat :

- a. Pendahuluan;
- b. Gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
- c. Permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah;
- d. Tujuan dan sasaran;
- e. Strategi dan arah kebijakan;
- f. Rencana program dan kegiatan serta pendanaan;
- g. Kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
- h. Penutup. Di bawah ini, diuraikan alur proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah pada gambar 1.1



**PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KRCIL DAN MENENGAH  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019-2023**

Gambar 1.1  
Proses Penyusunan Renstra



1.1.3. Keterkaitan Antara Renstra PD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Perencanaan Pembangunan Daerah bertujuan untuk mewujudkan Pembangunan Daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Perencanaan Pembangunan daerah yang berorientasi pada proses, menggunakan pendekatan :

- a. Teknokratik;
- b. Partisipatif;
- c. Politis; dan
- d. Atas-bawah dan bawah-atas

Perencanaan Daerah disusun berdasarkan data serta aturan yang mencakup kondisi geografis, demografi, potensi sumber daya, ekonomi dan keuangan, aspek kesejahteraan, pelayanan serta data dan informasi yang dimuat dalam dokumen perencanaan lainnya sesuai dengan kebutuhan. Selain berpedoman pada Permendagri No. 86 Tahun 2017, secara substansi Renstra

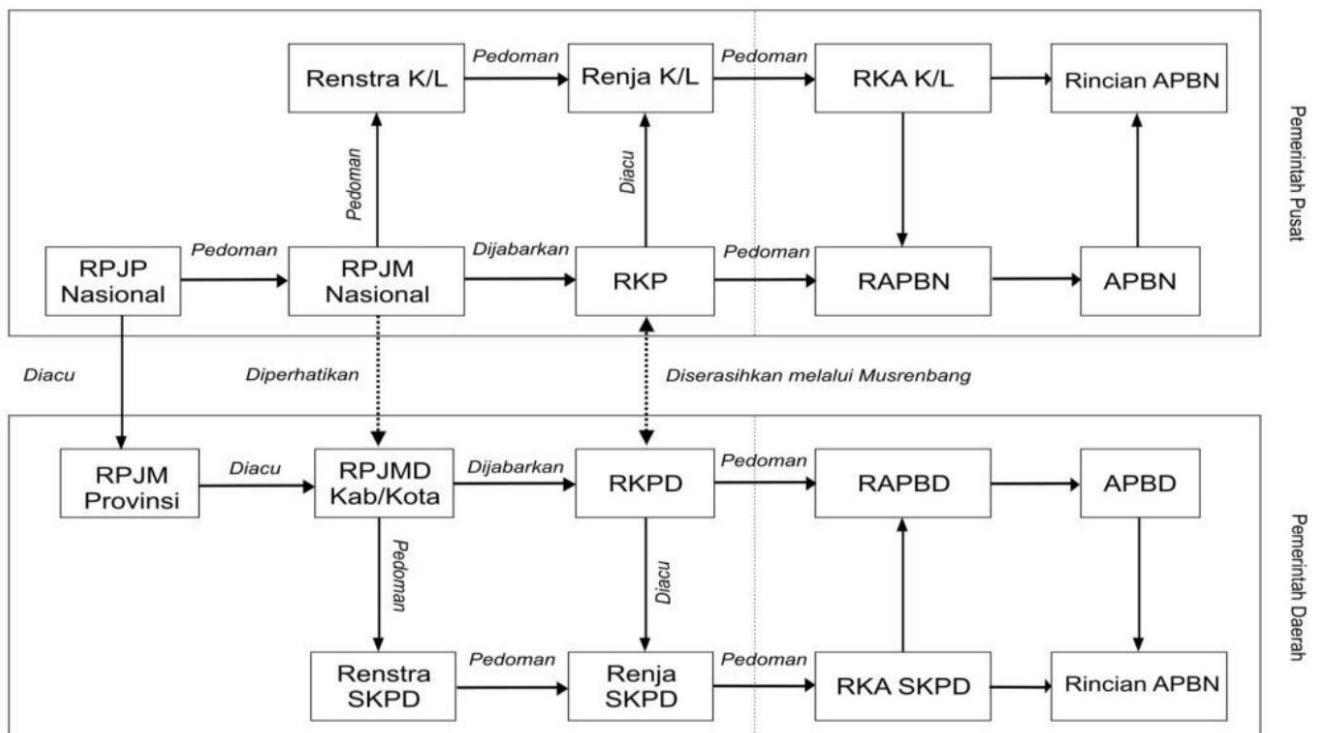




**PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KRCIL DAN MENENGAH  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019-2023**

Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur ini mengacu arah kebijakan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 – 2023 juga Renstra Kementerian Koperasi dan UKM RI serta berbagai dokumen perencanaan lainnya yang relevan. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mencapai keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan (baik jangka panjang, menengah dan tahunan) antara berbagai level pemerintahan Kabupaten / Kota, Propinsi Maupun Kementerian sehingga akan menjadi dokumen perencanaan publik yang akuntabel, realible dan implementatif, gambaran keterkaitan dokumen seperti gambar 1.2 di bawah:

**Gambar 1.2  
Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan Pengaraan**



Adapun keterkaitan antara Renstra PD dengan dokumen RKP, dengan Renja Kementerian/Lembaga (K/L) dan Renja Provinsi / Kabupaten / Kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD. Hal ini mengacu pada :

1. Peraturan perundang-undangan yang terkait;



2. Kebijakan pemerintah yang terkait;
3. Dokumen-dokumen:
  - a. RPJMD provinsi, RTRW provinsi, dan Renstra K/L untuk penyusunan
  - b. RPJMD provinsi; RPJMD kota, RTRW kota, RPJMD provinsi, dan Renstra K/L untuk penyusunan RPJMD kabupaten/kota;
  - c. Hasil evaluasi Renstra SKPD periode lalu;
4. Data statistik sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun terakhir.

## **1.2 Landasan Hukum**

### **1.2.1 Ketentuan tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dan Kewenangan PD**

- a) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
- b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
- c) Undang-undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512).
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- e) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- f) Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah.
- g) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.



**PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KRCIL DAN MENENGAH  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019-2023**

---

- h) Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 71 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
- i) Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah.
- j) Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 42 tahun 2019 tentang Pembentukan dan susunan organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Kalimantan Timur .

1.2.2 Ketentuan Tentang Perencanaan dan Penganggaran  
Ketentuan tentang Perencanaan.

- a) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- b) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- d) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun.
- e) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.



- f) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005 –2025;
- g) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023
- h) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019- 2023.

**Ketentuan tentang Penganggaraan**

- a) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- b) Undang -undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2017 Nomor 68);
- c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 140, tambahan lembaran Negara RI nomor 5234);
- d) Undang – undang no. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- e) Undang – undang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan ke 2 (dua) UU nomor. 23 tahun 2014.
- f) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4585);
- g) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- h) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan



Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

- i) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1 Maksud Penyusunan Renstra**

Maksud penyusunan Renstra Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM tahun 2019-2023 adalah sebagai pedoman bagi seluruh komponen/aparatur Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Timur dalam melaksanakan kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun dan sebagai dasar perencanaan tahunan, serta menjadi pedoman dalam penyusunan Renja guna menghasilkan perencanaan yang berkesinambungan, sinergis, terpadu, akuntabel, dan berkualitas.

#### **1.3.2 Tujuan Penyusunan Renstra Perubahan PD**

Tujuan dari renstra perubahan ini adalah sebagai pedoman dalam implementasi strategi dan visi misi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 s.d 2023 , menjadi pedoman pelaksanaan pelayanan PD, menjadi pedoman dalam penyusunan anggaran PD dan menjadi pedoman pelaksanaan kerja bagi seluruh elemen di Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur , penyusunan renstra perubahan ini untuk mewujudkan peningkatan kinerja pelayanan di Sektor Perindustrian, Sektor Perdagangan dan Sektor Koperasi dan UKM , termasuk sebagai



pedoman dalam penyusunan rencana kerja setiap tahun dan dalam melakukan evaluasi kinerja PD.

### **1.3. Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika penulisan rencana strategis (Renstra) Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

#### **BAB I      Pendahuluan**

Bab ini berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika.

#### **BAB II      Gambaran Pelayanan PD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Timur**

Bab II memuat tugas, fungsi yang di dalamnya memuat struktur organisasi, susunan kepegawaian, tugas pokok dan fungsi yang terkait dengan kewenangan urusan pilihan bidang industri dan perdagangan, kondisi capaian kinerja pembangunan bidang industri dan perdagangan di Kalimantan Timur tahun 2020 dan tantangan serta peluang pelayanan PD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Timur.

#### **BAB III      Permasalahan dan Isu – Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi**

Komponen dalam Bab III memuat Permasalahan pokok berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas, telaahan visi, misi dan program Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, RT/RW dan Kajian Lingkungan strategis, serta penentuan isu-isu strategis.

#### **BAB IV      Tujuan dan Sasaran;**

Bab IV memuat berbagai tujuan dan sasaran bidang Industri dan Perdagangan yang diarahkan untuk dapat mendukung terwujudnya visi dan misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023.



**BAB V Strategi dan Arah Kebijakan**

Bab ini memuat Strategi dan Arah Kebijakan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Disamping itu juga memuat tentang indikator kinerja kelompok sasaran.

**BAB VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan**

Bab VI memuat Rencana Program dan Kegiatan serta Rencana Pendanaan Selama Lima (5) Tahun untuk Mencapai Tujuan dan sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Timur.

**BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Industri , Perdagangan, Koperasi dan UKM.**

Bab ini berisi indikator kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

**BAB VIII Penutup**

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan penegasan terhadap komitmen untuk melaksanakan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 secara konsisten yang implementasinya dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahunan serta berlaku sebagai pedoman standar kinerja pelaksanaan program serta kegiatan 5 (lima) tahunan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Timur dalam kaidah pelaksanaan.



## **BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

Tugas Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 71 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

### ***2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah***

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Timur mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

#### **2.1.1 Tugas pokok dan fungsi**

- a) Perumusan kebijakan teknis dibidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah;
- b) Perencanaan, Pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis dibidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM;
- c) Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis industri;
- d) Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis perdagangan dalam negeri;
- e) Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis perdagangan luar negeri;
- f) Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah;
- g) Penyelenggaraan urusan Kesekretariatan;
- h) Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;





- i) Pembinaan kelompok Jabatan Fungsional; dan
- j) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### 2.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Pejabat Struktural

Adapun tugas pokok dari pejabat struktural di masing-masing bagian struktur organisasi, sebagai berikut:

##### **a. Kepala Dinas**

###### a). Tugas Pokok.

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah dan Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Kepala Dinas mempunyai

###### b). Fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan teknis di perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah;
- 2) Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah;
- 3) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah;
- 4) Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang industri;
- 5) Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang perdagangan;
- 6) Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang perlindungan konsumen dan pengawasan barang beredar;
- 7) Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang koperasi dan UKM;
- 8) Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- 9) Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas; pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional; dan



**PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KRCIL DAN MENENGAH  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019-2023**

---

10) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Sekretaris Dinas

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan program dan pelaporan, urusan umum dan kehumasan, kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan administrasi keuangan serta pengelola aset.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Sekretaris mempunyai fungsi :

- 1) Penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana program, monitoring, evaluasi, dan pelaporan;
- 2) Penyiapan bahan koordinasi administrasi umum dan kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan pemeliharaan, hukum dan kehumasan serta pengaduan masyarakat;
- 3) Penyiapan bahan koordinasi penyusunan anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan serta pengelolaan aset; dan
- 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

b.1 Sub Bagian Perencanaan Program Tugas Pokok

Subbagian Perencanaan Program mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

b.2 Subbagian Umum Tugas Pokok

Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan administrasi umum dan kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan pemeliharaan, hukum dan kehumasan serta pengaduan masyarakat.

b.3 Subbagian Keuangan Tugas Pokok

Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan penyusunan anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan, dan pengelolaan aset.



Dinas Perindagkop dan UKM Provinsi Kalimantan Timur rencananya akan dibentuk menjadi 4 ( empat ) Bidang yaitu :

**c. Bidang Industri**

Bidang Industri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis di bidang industri. Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, bidang industri mempunyai fungsi :

- 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang Industri;
- 2) Penyiapan bahan koordinasi perencanaan program di bidang Industri;
- 3) Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis perencanaan industri;
- 4) Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis pembinaan usaha industri;
- 5) Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis informasi industri; dan
- 6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya

c.1 Seksi Perencanaan Industri mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, dan pengendalian perencanaan industri.

c.2 Seksi Pembinaan Usaha Industri mempunyai tugas pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, dan pengendalian usaha industri.

c.3 Seksi Informasi Industri mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, dan pengendalian informasi industri.



**d. Bidang Perdagangan**

Bidang Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis di bidang perdagangan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Bidang Perdagangan mempunyai fungsi:

- 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang Perdagangan;
- 2) Penyiapan bahan koordinasi perencanaan program di bidang Perdagangan;
- 3) Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis perdagangan dalam negeri;
- 4) Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, teknis perdagangan luar negeri; pengendalian dan pengaturan teknis perdagangan luar negeri.
- 5) Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, teknis kerjasama perdagangan; dan pengendalian dan pengaturan teknis kerjasama perdagangan.

- 6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas fungsinya :

d.1 Seksi Perdagangan Dalam Negeri mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, dan pengendalian perdagangan dalam negeri.

d.2 Seksi Perdagangan Luar Negeri mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan pengendalian perdagangan luar negeri.

d.3 Seksi kerjasama Perdagangan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan pengendalian kerjasama perdagangan.



**e. Bidang Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Barang Beredar**

Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut :

Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis di bidang perlindungan konsumen dan pengawasan barang beredar.

Fungsi :

- 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perlindungan konsumen dan pengawasan barang beredar;
- 2) Penyiapan bahan koordinasi perencanaan program di bidang perlindungan konsumen dan pengawasan barang beredar;
- 3) Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis perlindungan konsumen;
- 4) Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis pengawasan barang beredar;
- 5) Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis hubungan kelembagaan; dan
- 6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berikut seksi yang membantu tugas Kepala Bidang Perlindungan Konsumen dan pengawasan barang beredar :

- (1) Seksi Perlindungan konsumen mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, dan pengendalian perlindungan konsumen.
- (2) Seksi pengawasan barang beredar mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, dan pengendalian pengawasan barang beredar.
- (3) Seksi hubungan kelembagaan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan pengendalian hubungan kelembagaan konsumen.



**f. Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah**

Bidang Koperasi dan UKM mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis di bidang koperasi dan UKM.

Fungsi :

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang koperasi dan UKM
- 2) Penyiapan bahan koodinasi perencanaan program di bidang koperasi dan UKM.
- 3) Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis produksi, pembiayaan dan pemasaran.
- 4) Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis produksi, pembiayaan dan pemasaran.
- 5) Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan pengendalian dan pengaturan teknis pengawasan koperasi dan
- 6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya :
  - (1) Seksi Bina Lembaga Koperasi dan UKM mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan pengawasan pengendalian dan pembinan Lembaga Koperasi dan UKM.
  - (2) Seksi Produksi, pembiayaan dan pemasaran mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan pengendalian produksi ,pembiayaan dan pemasaran.
  - (3) Seksi pengawasan koperasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan pengawasan dan pengendalian Koperasil



**g. Unit Pelaksana Teknis Daerah**

Untuk pembinaan pengembangan pelayanan teknis terhadap industri, perdagangan, koperasi dan UKM di Kalimantan Timur, terdapat 2 (dua) UPTD yaitu

**g.1 UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang**

UPTD Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan kegiatan teknis Dinas dibidang Pengujian dan sertifikasi mutu barang.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- 1) Penyusunan Perencanaan program kegiatan pelaksanaan pengujian, kalibrasi, jaminan mutu dan sertifikat mutu barang
- 2) Pelaksanaan kebijakan teknis operasional pengujian dan sertifikasi mutu barang.
- 3) Pemantauan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengujian dan sertifikasi mutu barang.
- 4) Pemberian pelayanan teknis pengujian, kalibrasi, jaminan mutu dan sertifikat mutu barang
- 5) Pelaksanaan pengembangan jasa pengujian, kalibrasi, jaminan mutu dan sertifikat mutu barang
- 6) Pengelolaan urusan ketatausahaan,
- 7) Pembinaan kelompok jabatan fungsional.
- 8) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**g.2 UPTD Pelatihan Koperasi**

UPTD Pelatihan Koperasi mempunyai tugas Melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis Dinas di bidang Pelatihan Koperasi .

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, UPTD Pelatihan Koperasi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- 1) Penyusunan rencana teknis operasional pelatihan koperasi.
- 2) Pelaksanaan kebijakan teknis operasional pelatihan koperasi.



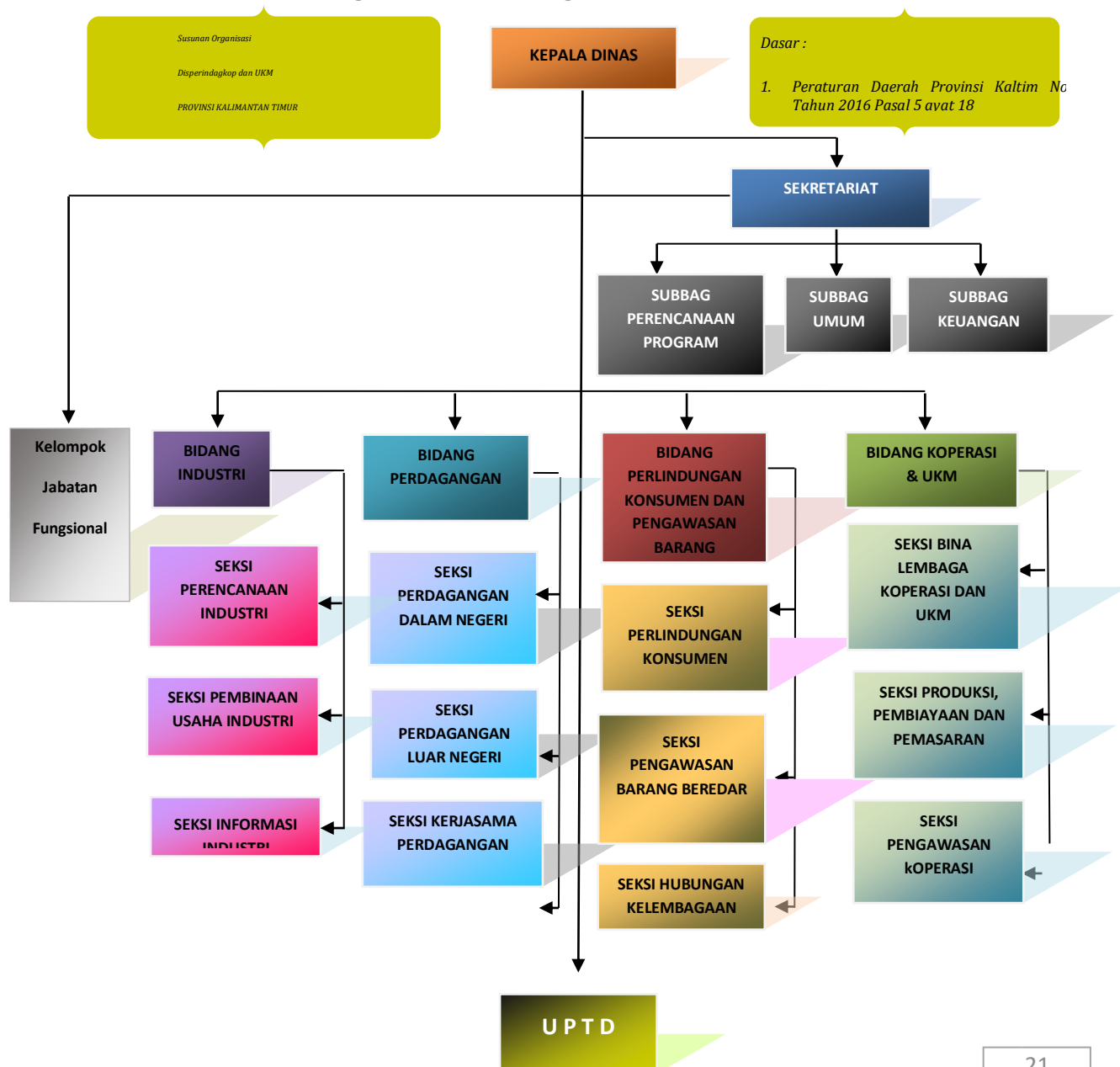
**PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KRCIL DAN MENENGAH  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019-2023**

- 3) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelatihan koperasi.
- 4) Pengelolaan urusan ketatausahaan.
- 5) Pembinaan kelompok jabatan fungsional.
- 6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### 2.1.3 Struktur Organisasi PD dan UPTD

Struktur organisasi pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Timur, terdiri atas 1 (satu) Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretaris Dinas, 4 (empat) Bidang dan 2 (dua) Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) seperti digambarkan pada bagan struktur organisasi di bawah ini:

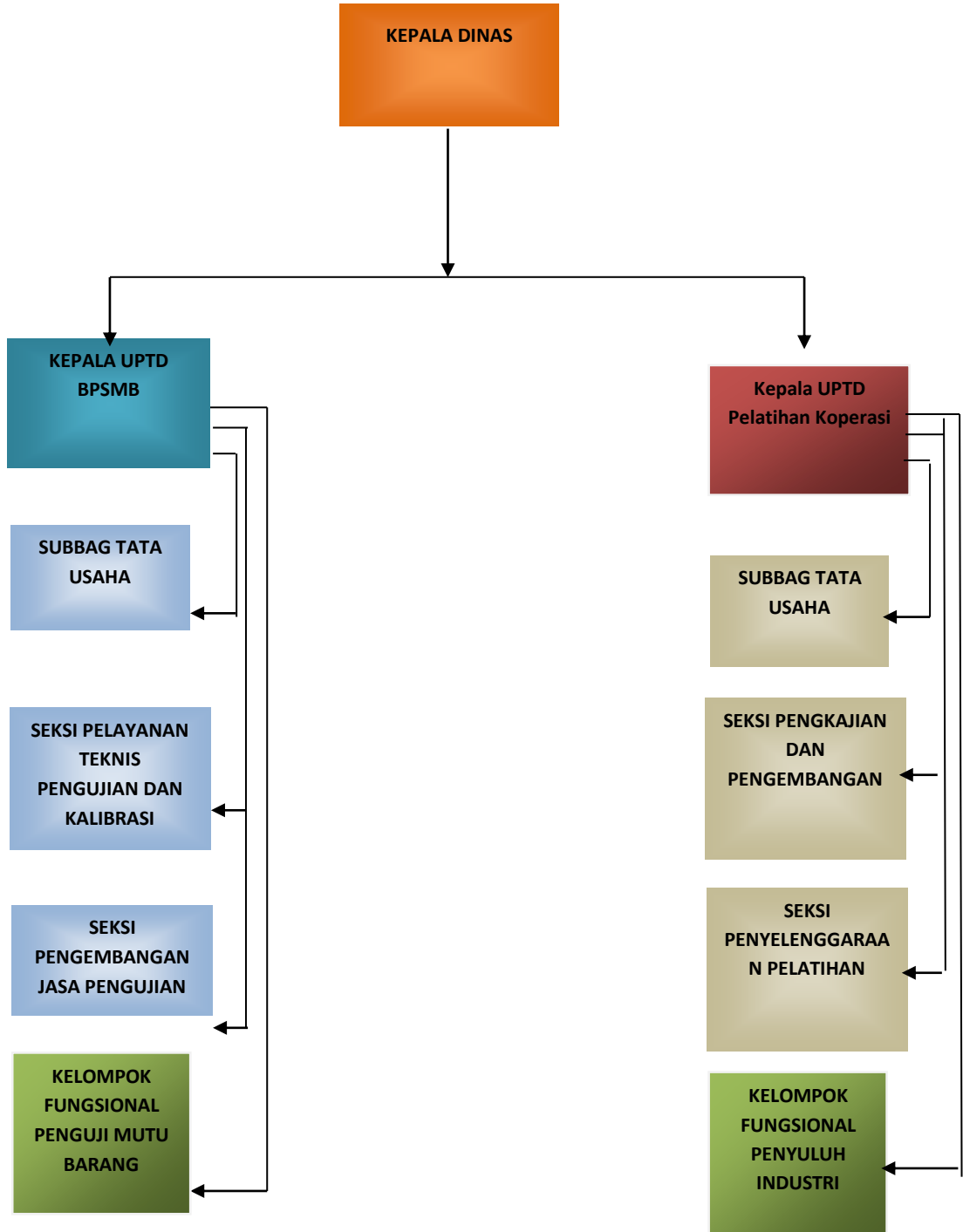
**Bagan 1. Struktur Organisasi Dinas**







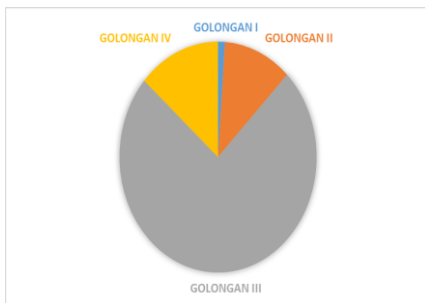
**Bagan 2. Struktur Organisasi UPTD**





## 2.2 Sumber Daya Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Timur

### 2.2.1 Sumber Daya Manusia



Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM yang ada di Provinsi Kalimantan Timur sampai dengan akhir Desember Tahun 2020 memiliki jumlah pegawai sebanyak 89 orang terdiri dari 47 orang laki-laki dan 42 orang perempuan sebagai pelaksana.

Sumber data: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Prov. Kalimantan Timur, akhir Desember 2020

**Tabel 1. Jumlah Pegawai berdasarkan Pangkat/Golongan Tahun 2020**

No.	Pangkat/Gol. Ruang	Jumlah
(1)	(2)	(3)
1	I	1
2	II	10
3	III	66
4	IV	12
Total Pegawai		89

Sumber data: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Prov. Kalimantan Timur, akhir Desember 2020

**Grafik 1. Jumlah Pegawai Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Berdasarkan Pendidikan Tahun 2020**





**PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KRCIL DAN MENENGAH  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019-2023**

Sumber data: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Prov. Kalimantan Timur, akhir Desember 2020

**Tabel 2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Bidang Sesuai Jabatan/Eselon – Laki-laki dan Tahun 2020**

No	Bidang	Jabatan/Eselon									
		II		III		IV		Pelaksana		Jumlah	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Sekretariat	1		1		1	2	9	5	12	7
2.	Bidang Industri			1		2	1	4	5	7	6
3.	Bidang Perdagangan				1	2	1	4	3	6	5
4.	Bidang PKPB				1	3		3	2	4	3
5.	Bidang Kop & UKM				1	3		4		7	1
7.	BPSMB				1	2	1	8	7	10	9
8.	P3UKM			1		3		4	2	8	2
J U M L A H		1		3	4	15	5	36	25	54	34

Sumber data: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Prov. Kalimantan Timur, akhir Desember 2020

**Tabel 3. Distribusi Pegawai Berdasarkan Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2020**

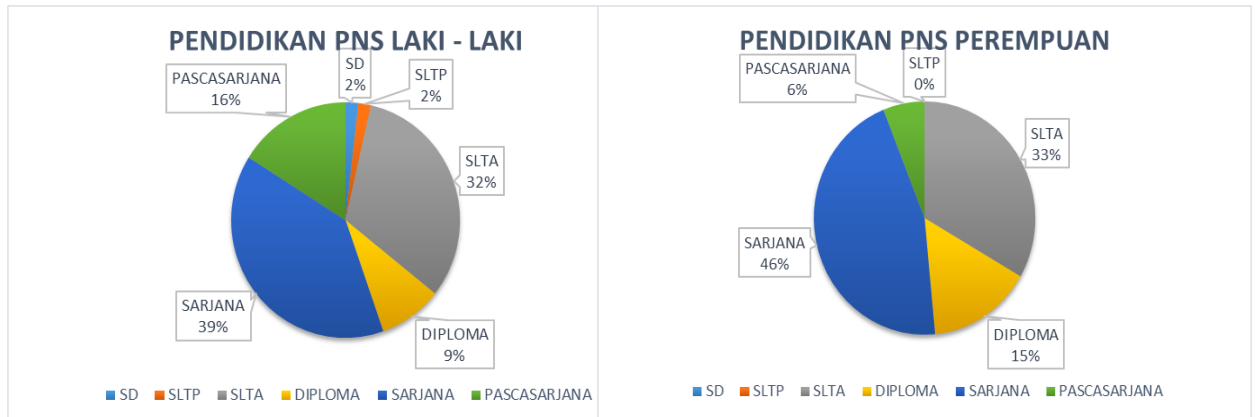
NO.	BAGIAN / BIDANG	P E N D I D I K A N												J U M L A H	
		SD		SLTP		SLTA		D3		S1		S2		L	P
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.	Sekretariat	0	0	1	0	4	2	1	2	4	2	1	1	11	7
2.	Bidang Industri	0	0	0	0	1	2	0	0	2	4	4	0	7	6
3.	Bidang Perdagangan	0	0	0	0	3	2	1	0	1	2	1	1	6	5
4.	Bidang PKPB	0	0	0	0	1	0	1	0	4	3	0	0	6	3
5.	Bidang Koperasi & UKM	0	0	0	0	3	0	1	0	3	1	0	0	7	1
7.	BPSMB	1	0	0	0	3	4	1	3	4	2	1	0	10	9
8.	P3UKM	0	0	0	0	3	1	0	0	4	1	1	0	8	2
J U M L A H		1	0	1	0	18	11	5	5	22	15	8	2	55	33

Sumber data: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Prov. Kalimantan Timur, akhir Desember 2020



**PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KRCIL DAN MENENGAH  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019-2023**

**Gambar 4. Pendidikan PNS Laki-laki dan Perempuan**



Sumber data: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Prov. Kalimantan Timur, akhir Desember 2020

Dalam tabel 2.3 berikut ini dapat dijelaskan bahwa distribusi pegawai untuk Sekretaris sebanyak 18 orang, sebanyak 11 orang diantaranya berpendidikan D3/S1/S2, sisanya sebanyak 9 orang berpendidikan SLTA kebawah, sementara untuk Bidang Industri dengan jumlah pegawai sebanyak 13 orang, 10 orang diantaranya berpendidikan S1/S2, sisanya sebanyak 3 orang berpendidikan SLTA kebawah, sedangkan Bidang Perdagangan dengan jumlah pegawai sebanyak 11 orang, diantaranya sebanyak 6 orang berpendidikan D3/S1/S2, sisanya 5 orang berpendidikan SLTA selanjutnya untuk Bidang Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Barang dengan jumlah pegawai 9 orang, hanya 2 orang berpendidikan D3/SLTA dan 7 orang berpendidikan S1/S2, kemudian untuk Bidang Koperasi dan UKM dengan jumlah pegawai sebanyak 8 orang, sebanyak 5 orang berpendidikan D3/S1/S2 dan sisanya sebanyak 3 orang berpendidikan SLTA kebawah. UPTD BPSMB yang memiliki pegawai sebanyak 19 orang, 11 orang diantaranya berpendidikan D3/S1/S2 dan 8 orang sisanya berpendidikan SLTA ke bawah, sedangkan untuk UPTD P3UKM yang memiliki 10 orang pegawai, 6 orang diantaranya berpendidikan S1/S2 dan 4 orang berpendidikan SLTA kebawah.



**PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KRCIL DAN MENENGAH  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019-2023**

**Tabel 4. Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil (Non PNS) Di Lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Ukm Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020**

No.	BAGIAN/BIDANG	Pendidikan														Jumlah	
		SD		SLTP		SLTA		D3		D4		S1		S2			
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	Sekretariat					2	1	3	3	1		7	4			13	8
2	Bid. Industri											3	4			3	4
3	Bid. PKPB					1	1					1	2			2	3
4	Bid. Perdagangan											5	2			5	2
5	Bid. Koperasi					1	1					1	3		1	2	5
6	UPTD BPSMB			1		3	1	1				9	3			14	4
7	UPTD Pelatihan Koperasi					5		4	1			3	3			12	4
	<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>29</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>51</b>	<b>30</b>

Sumber data: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Prov. Kalimantan Timur, akhir Desember 2020

Untuk menunjang Kegiatan dan tugas Pegawai Negeri Sipil Berikut Tenaga Kerja Kontrak berjumlah 81 orang distribusi pegawai Non Pegawai Sipil untuk Sekretariat sebanyak 21 orang, sebanyak 18 orang diantara berpendidikan D3/S1, Sisanya sebanyak 3 orang berpendidikan SLTA untuk Bidang Industri sebanyak 7 orang diantara berpendidikan S1, sedangkan Bidang Perdagangan dengan jumlah pegawai sebanyak 7 orang, diantaranya sebanyak 7 orang dan seluruhnya berpendidikan S1, selanjutnya untuk Bidang Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Barang dengan jumlah pegawai 5 orang, hanya 2 orang berpendidikan SLTA dan 3 orang berpendidikan S1/S2, kemudian untuk Bidang Koperasi dan UKM dengan jumlah pegawai sebanyak 7 orang, sebanyak 5 orang berpendidikan S1/S2 dan sisanya sebanyak 2 orang berpendidikan SLTA kebawah. UPTD BPSMB yang memiliki pegawai sebanyak 18 orang, 13 orang diantaranya berpendidikan D3/S1 dan 5 orang sisanya berpendidikan SLTA ke bawah, sedangkan untuk UPTD P3UKM yang memiliki 16 orang pegawai, 11 orang diantaranya berpendidikan S1/D3 dan 5 orang berpendidikan SLTA kebawah.



**PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KRCIL DAN MENENGAH  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019-2023**

### 2.2.2 Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan bagian pendukung dalam kinerja SKPD untuk melaksanakan kegiatan. Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Timur tertera pada tabel 2.4 dan tabel 2.5 berikut.

**Tabel 5. Kondisi Sarana Kerja Tahun 2020**

NO	SARANA KERJA	JUMLAH	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tanah bangunan kantor	6 LS	Baik
2.	Rumah Dinas	3 buah	Baik
3.	Kendaraan Roda 4	26 Mobil	Baik
		1 Mobil	Rusak Ringan
		3 Mobil	Rusak Berat
4.	Kendaraan Roda 2	37 Motor	Baik
		2 Motor	Rusak Ringan
		2 Motor	Rusak Berat
5.	Komputer PC	68 buah	Baik
6.	Laptop	63 buah	Baik
7.	Mesin Tik	51 buah	3 (Rusak Berat)
8.	Mesin Hitung	1 buah	Baik
9.	Telepon	4 unit	1. (0541) 742482 PABX
			2. (0541) 747161
			3. (0541) 206335
			4. (0541) 736993
10.	Faximile	1 unit	Baik: (0541) 742495
11.	Mesin Foto Copy	1 unit	Kurang Baik
12.	Camera	5 buah	1 (Rusak Ringan)
13.	Mesin Absen Digital	1 unit	Baik

Sumber data: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Prov. Kalimantan Timur, akhir Desember 2020

**Tabel 6. Sarana Prasarana Tahun 2018**

NO	URAIAN	KEGIATAN	VOLUME	SUMBER DANA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Gedung Kantor	Pemeliharaan	5 LS	APBD
2.	Mobilitas	Pemeliharaan	71 unit	APBD/APBN
3.	Peralatan Kantor	Pemeliharaan	1.061 buah	APBD
4.	Lain-lain	Pemeliharaan	406 buah	APBD

Sumber data: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Prov. Kalimantan Timur, akhir Desember 2020



**PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KRCIL DAN MENENGAH  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019-2023**

### 2.3 Kinerja Pelayanan DISPERINDAGKOP dan UKM Provinsi Kalimantan Timur

Perkembangan sektor industri dan perdagangan memberikan dampak langsung pada perkembangan ekonomi secara makro pada perekonomian Provinsi Kalimantan Timur. Mengingat Provinsi Kalimantan Timur menjadi tempat bernaungnya industri – industri yang besar sehingga secara makro diharapkan Kalimantan Timur mampu memberi peran sebagai penggerak utama (*prime mover*) perekonomian daerah hingga nasional. Melihat hal tersebut, kontribusi sektor perdagangan dan industri serta UKM dan Koperasi dapat dilihat sebagai berikut:

**Tabel 7. Target Dan Realisasi Pendapatan Tahun 2018 sd 2020**

No	Jenis Pendapatan	Target ( )		Realisasi ( Rp jutaan)		Selisih (jutaan Rp)		% Realisasi	
		2018	2020	2018	2020	2018	2020	2018	2020
1.	Retribusi Pengujian dan Kalibrasi (juta Rupiah)	120,00	350	146,63	358,74	26,63	8,74	122,19	102,5
2.	Retribusi Surat Keterangan Asal (SKA) (Juta Rupiah)	87,5	87,5	128,5	108,5	41,3	21,0	147,1	123,9
<b>Jumlah</b>									

Sumber : BPSMB dan PNBK SKA

Retribusi di sektor perdagangan yang meliputi retribusi untuk pengujian sampel produk/komoditi yang disetorkan ke kas daerah melebihi target yang direncanakan sebesar 122,19% dengan nilai mencapai Rp. 146,63 juta untuk tahun 2013 dan 102,5% di tahun 2017 dengan nilai Rp. 358,74 juta. Sedangkan Pendapatan Negara Bukan Pajak yang disetorkan ke kas negara mencapai Rp. 16,025 juta pada tahun 2013 meningkat sebesar 103,39% dari target yaitu Rp. 15,5 juta dan mencapai Rp. 35,355 juta pada tahun 2017 yaitu 176,8% dari target semula sebesar Rp. 20 juta.

**Tabel 8 .PDRB Menurut Kategori dan Lapangan Usaha tahun 2016 - 2020  
Provinsi Kalimantan Timur**

No	LAPANGAN USAHA	2016	2017	2018	2019	2020
		Total	Total	Total	Total	Total
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	41,847,436,78	47,211,913,54	50,147,993,75	51,567,377,43	53,282,041,32
2	Pertambangan & Penggalan	219,761,313,18	275,822,161,86	296,725,328,77	297,371,390,44	251,602,429,66
3	Industri Pengolahan	104,969,947,32	112,075,371,90	115,272,211,33	116,204,902,64	114,773,790,50
4	Pengadaan Listrik dan Gas, Air Bersih, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	469,769,02	553,676,73	603,950,13	652,627,78	711,543,38



**PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KRCIL DAN MENENGAH  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019-2023**

No	LAPANGAN USAHA	2016	2017	2018	2019	2020
		Total	Total	Total	Total	Total
5	Konstruksi	42,120,580,31	46,876,979,06	53,500,577,65	58,472,318,61	57,866,111,65
6	Perdagangan Besar dan Eceran dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	28,254,179,28	32,018,021,91	35,227,601,63	38,425,237,93	39,228,073,30
7	Transportasi dan Pergudangan	18,860,328,95	21,242,089,60	22,990,716,23	24,172,247,48	22,245,473,00
8	Penyedia Akomodasi dan Makan Minum	4,851,073,16	5,448,930,15	6,106,132,40	6,961,563,29	6,413,495,11
9	Informasi dan Komunikasi	6,628,931,14	7,375,629,03	7,988,162,67	8,708,381,85	9,346,480,52
10	Jasa Keuangan dan Asuransi Jasa	8,762,585,50	9,032,358,39	9,717,118,85	10,216,630,15	10,484,898,98
11	Real Estat	4,869,798,09	5,218,431,37	5,574,934,04	5,768,853,10	5,845,848,31
12	Jasa Perusahaan	1,116,073,89	1,215,392,08	1,299,479,78	1,346,709,54	1,330,659,71
13	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	11,807,578,09	11,658,603,97	12,337,921,43	13,019,825,48	12,750,865,95
14	Jasa Pendidikan	8,215,109,23	9,081,380,78	10,107,376,91	10,995,564,35	11,724,047,73
15	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3,191,964,19	3,506,038,88	3,905,166,57	4,289,673,17	5,318,271,36
16	Jasa Lainnya	3,153,541,37	3,566,507,74	3,994,007,67	4,434,754,18	4,396,748,80
	<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)</b>	<b>508,880,236,50</b>	<b>591,903,487</b>	<b>635,498,679,83</b>	<b>652,158,057,43</b>	<b>607,320,779,28</b>

Sumber: BPS Kaltim

Sektor Indagkop memberikan kontribusi yang besar terhadap perekonomian Kalimantan Timur (26,1%) terhadap total PDRB Kaltim. Sedangkan kontribusi terbesar masih disumbang dari sektor pertambangan dan penggalian. Kondisi ini akan sangat mengkhawatirkan jika tidak dilakukan upaya strategis untuk merubah struktur PDRB Kaltim dari sektor primer berbasis unrenewable resources ke sektor lain yang berbasis renewable resources. Hal ini dibuktikan dengan menurunnya harga batubara di pasar internasional maka kondisi perekonomian Kaltim juga sangat terganggu yang mengakibatkan banyaknya perusahaan tutup dan terjadi PHK besar-besaran.

Beberapa sektor yang mempunyai potensi cukup besar untuk dikembangkan yaitu sektor industri pengolahan, sektor pertanian, perkebunan sawit, sektor perdagangan dan sektor perikanan yang tergambar dalam data berikut :





**PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KRCIL DAN MENENGAH  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019-2023**

**Tabel 9. Distribusi Persentase PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Kalimantan Timur 2016 – 2020 (Dalam Persen)**

No	LAPANGAN USAHA	2016	2017	2018	2019	2020
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	8,22	7,98	7,89	7,91	8,77
2	Pertambangan & Penggalian	43,19	46,60	46,69	45,60	41,43
3	Industri Pengolahan	20,63	18,93	18,14	17,82	18,90
4	Pengadaan Listrik dan Gas, Air Bersih, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,10	0,10	0,10	0,10	0,11
5	Konstruksi	8,28	7,92	8,42	8,97	9,53
6	Perdagangan Besar dan Eceran dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,55	5,41	5,54	5,86	6,46
7	Transportasi dan Pergudangan	3,71	3,59	3,62	3,71	3,66
8	Penyedia Akomodasi dan Makan Minum	0,95	0,92	0,96	1,03	1,06
9	Informasi dan Komunikasi	1,30	1,25	1,26	1,34	1,54
10	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,72	1,53	1,53	1,57	1,73
11	Real Estat	0,96	0,88	0,88	0,88	0,96
12	Jasa Perusahaan	0,22	0,21	0,22	0,21	0,22
13	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,32	1,97	1,94	2,00	2,10
14	Jasa Pendidikan	1,61	1,53	1,59	1,69	1,93
15	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,63	0,59	0,61	0,66	0,88
16	Jasa Lainnya	0,62	0,60	0,63	0,68	0,72
<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber : BPS Kaltim

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM mempunyai bidang-bidang dan UPTD yang mendukung dalam pelaksanaan tugas dalam mengembangkan perindustrian dan perdagangan Provinsi Kalimantan Timur demi meningkatkan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Timur. Bidang-bidang tersebut antara lain:

### **2.3.1 Bidang Perdagangan**

Kondisi sektor perdagangan Kaltim tidak terlepas dari kondisi perekonomian global. Membaiknya perekonomian Amerika Serikat dan bangkitnya perekonomian di Tiongkok menyebabkan kondisi perekonomian global sangat ditentukan oleh kondisi ekonomi kedua negara ini.

Sehingga perlu diupayakan strategi khusus dalam rangka mendongkrang kinerja perdagangan Kaltim. Semakin luasnya kesepakatan perdagangan bebas, membuka akses pasar internasional dan kerjasama antar wilayah baik nasional maupun internasional



**PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KRCIL DAN MENENGAH  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019-2023**

---

dengan pemanfaatan teknologi informasi yang berkembang dengan pesat, pengembangan pariwisata menjadi peluang daerah dalam mengembangkan produk-produk unggulan daerah.

Sementara itu, pengembangan perdagangan menghadapi berbagai tantangan, yaitu: persaingan usaha antara pengusaha lokal dan pengusaha luar daerah, persaingan antara pengusaha kecil dengan pengusaha menengah dan besar, imbas krisis finansial global yang belum sepenuhnya pulih, infrastruktur perdagangan yang belum memadai dan belum dimanfaatkan secara optimal oleh pelaku ekspor, serta perdagangan bebas yang selain memiliki dampak positif juga memiliki dampak negatif bagi pelaku usaha sehingga kesiapan pelaku usaha dalam menghadapi persaingan dan juga daya saing produk / komoditi juga perlu di tingkatkan.

Perdagangan merupakan kegiatan perekonomian masyarakat yang mampu memengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat. DISPERINDAGKOP dan UKM mempunyai peran yang penting dalam perkembangan perdagangan Provinsi Kalimantan Timur. Perdagangan mempunyai kaitan erat dengan perkembangan pasar sebagai tempat terjadinya transaksi pada mayoritas masyarakat Kalimantan Timur. Kondisi pasar dapat dijadikan sebagai indikator kondisi perekonomian daerah. Tingkat perputaran uang, daya beli masyarakat, kondisi harga, ketersediaan stok adalah beberapa parameter kondisi perekonomian daerah yang mampu dilihat dengan memperhatikan kondisi pasar sebagai pusat transaksi jual beli konvensional di masyarakat. Karena perkembangan pasar non konvensional (pasar online) dewasa ini juga menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan.

Kondisi perkembangan pasar di Provinsi Kalimantan Timur dapat dilihat pada tabel di bawah ini;

**Tabel 10. Jumlah Toko Modern dan Pasar Tradisional  
Provinsi Kalimantan Timur**

No	Kabupaten Kota	Jumlah Pasar Tradisional	Jumlah Pedagang	Jumlah Toko Modern	Jumlah Pedagang
1	Samarinda	31	9,173	172	912
2	Balikpapan	21	5,231	30	2,847
3	Bontang	6	227	12	395
4	Berau	18	3,063	3	12
5	Kutai Kartanegara	6	2,744	3	5
6	Kutai Barat	35	425	1	1
7	Kutai Timur	13	1,638	10	10
8	Paser	99	7,587	2	415



**PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KRCIL DAN MENENGAH  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019-2023**

No	Kabupaten Kota	Jumlah Pasar Tradisional	Jumlah Pedagang	Jumlah Toko Modern	Jumlah Pedagang
9	Penajam Paser Utara	27	1,309	4	4
10	Mahakam Ulu	2	-	-	-
	<b>JUMLAH</b>	<b>258</b>	<b>31.394</b>	<b>237</b>	<b>4.601</b>

Sumber : Dinas Yang Membidangi Perdagangan Kabupaten/Kota

Dalam sistem Perdagangan selain ketersediaan infrastruktur sarana pemasaran dalam bentuk Pasar Tradisional (Pasar yang dibangun dengan dana Pemerintah dan didalamnya terjadi proses tawar menawar) dan Toko Modern (Proses jual beli tidak ada tawar menawar, harga sudah tercantum, sistem lebih modern dan pembeli melayani sendiri) juga perlu diperhatikan adalah bagaimana terwujud stabilisasi Harga dan stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Provinsi Kalimantan Timur. Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk mewujudkan hal tersebut yaitu :

#### 2.3.1.1 Pemantauan Harga dan Stok di Kabupaten Kota se Kaltim

Upaya untuk mewujudkan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting menjadi salah satu indikator kinerja Dinas untuk mengendalikan harga dan menyediakan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting secara terjangkau dan cukup bagi masyarakat Kaltim. Upaya tersebut salah satunya dilakukan dengan melakukan pemantauan harga dan stok di beberapa pasar pantau yang tersebar diseluruh Kabupaten Kota se Kaltim. Pemantauan dilakukan dengan melakukan monitoring secara langsung ke lapangan dan melaporkan perkembangan harga dan stok melalui aplikasi Sistem Informasi Manajemen Perdagangan Dalam Negeri (SIM PDN). Pengendalian disparitas harga antar wilayah kabupaten kota dan juga disparitas harga barang kebutuhan pokok dan penting dengan harga nasional menjadi tolok ukur stabilitas harga dan kelancaran jalur distribusi.

**Tabel 11. Perbandingan Antara Harga Barang Kebutuhan Pokok Di Nasional Dengan Harga Di Kaltim**

No	Nama Barang	Satuan	Harga (Rp)		Selisih	
			Nasional	Kaltim	Rp	%
1	Beras	Kg	10.668	11.500	932	8,7
2	Gula Pasir	Kg	12.290	12.375	85	0,69



**PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KRCIL DAN MENENGAH  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019-2023**

No	Nama Barang	Satuan	Harga (Rp)		Selisih	
			Nasional	Kaltim	Rp	%
3	Minyak Goreng	Liter	11.422	12.250	828	7,25
4	Tepung Terigu	Kg	9.369	10.250	881	9,40
5	Kedelai	Kg	10.065	10.500	534	5,3
6	Daging Sapi	Kg	117.500	120.000	2.400	2,04
7	Daging Ayam	Kg	36.132	32.375	-3.757	-10,40
8	Telur Ayam	Kg	25.497	25.500	103	0,39
9	Cabe Merah Besar	Kg	31.708	35.500	4.892	15,43
10	Bawang Merah	Kg	27.162	24.750	-2.412	-8,88

Sumber : data SIMPDN diolah

Beberapa komoditi barang kebutuhan pokok masih menunjukkan disparitas yang tinggi dengan harga nasional. Hal ini terjadi karena komoditi-komoditi tersebut masih sebagian besar disuplay dari Luar Kaltim (Jawa Timur dan Sulawesi). Hal ini merupakan tantangan ke depan dan sekaligus sebagai peluang pengembangan beberapa sector untuk lebih dioptimalkan dalam upaya pemenuhan kebutuhan Kaltim secara swasembada dan mandiri dan bahkan tidak menutup kemungkinan untuk dilakukan ekspor apabila terjadi surplus.

1. Koordinasi dengan instansi terkait dan distributor barang kebutuhan pokok

Koordinasi dalam pemantauan harga dan stok dalam rangka mewujudkan stabilisasi harga dan kecukupan stok barang kebutuhan pokok sangat diperlukan mengingat kegiatan perdagangan merupakan kegiatan akhir dalam rantai distribusi barang. Sedangkan kondisi hulu dari system perdagangan sangat ditentukan oleh keberhasilan program-program yang dilakukan oleh sector-sektor terkait. Rantai pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting di Kaltim juga perlu dilakukan monitoring dan evaluasi untuk menjaga kelancaran jalur distribusinya.

2. Pelaksanaan Operasi Pasar dan Pasar Murah

Pada momen momen menjelang Hari Besar Keagamaan dan beberapa kondisi tertentu sering terjadi kenaikan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting yang cukup menimbulkan keresahan di masyarakat. Tentu saja Dinas melakukan upaya-upaya dalam rangka mengatasi hal ini. Salah satunya dalam bentuk Pasar Murah dan Operasi Pasar. Kegiatan ini juga perlu dukungan dan



**PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KRCIL DAN MENENGAH  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019-2023**

komitemen dari OPD terkait dan juga pelaku usaha (distributor) serta sinergi dengan Dinas yang membidangi perdagangan kabupaten kota untuk bersama-sama melakukan program pasar murah dan operasi pasar secara merata di semua titik yang tersebar di seluruh kabupaten kota.

**Tabel 12. Pasar Murah Tahun 2018 s.d 2021**

Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021	
Pasar Murah	Tempat	Pasar Murah	Tempat	Pasar Murah	Tempat	Pasar Murah	Tempat
Pasar Murah : 20 kali	1. Kel Mugerjo, Kel Tanah Merah Kel Kampung Baqa Kel Sei Keledang Desa Loa Duri Ilir Desa Purwajaya Desa Bukit Raya Desa Bangun Rejo Desa Perjiwa Kel tanah Merah Kel Lempake Kel. Bayur Kel Bukuan Kel Rawa Makmur Kel Makroman Kel Sei Kapih Perum Kalimanis Kel Sei Kapih Jembatan Mahkota II Kel Sidodadi  Kel Gunung Kelua Halaman Mesjid Sirotol Mustakim	Pasar Murah 19 Kali	Desa Loa Duri Jln. Abd. Mutalib Smd Desa Purwajaya Tenggarong Sebrang Desa Bukit Raya Desa Bangun Rejo Desa Perjiwa Kel. Tanah Merah Kel. Lempake 9. Kel. Bayur Kel. Bukuan Kel. Rawa Makmur Kel. Makroman Kel. Sei Kapih Perum Kalimanis Jembatan Mahkota II  Kel Gunung Kelua  Kel Sidodadi Kel Loa Bakung Halaman Mesjid Siratol Mustakim Kel Sei Keledang	Pasar Murah :10 Kali	Kel Tanah Merah Kel Mugirejo Kel. Sei Keledang Halaman Gedung PKK Halaman Belakang Lamin Etam Halaman Kantor KORPRI Kaltim Kel Kampung Baqa Kel Lempake Kel Makroman Halaman Mesjid Sirotol Mustakim	Pasar Murah : 6 Kali	Kel Tanah Merah Kel Mugirejo Kel. Sei Keledang Halaman Gedung PKK Halaman Belakang Lamin Etam Halaman Kantor KORPRI Kaltim

Melihat perkembangan pendirian usaha yang ada pada Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2018 hingga 2020, mengindikasikan bahwa terjadi peningkatan kemandirian usaha yang dilakukan oleh masyarakat Kalimantan Timur dengan adanya perkembangan penerbitan SIUP dan TDP oleh DISPERINDAGKOP dan UKM. Sehingga melihat perkembangan ini dapat dikatakan perekonomian Provinsi Kalimantan Timur diharapkan menggeliat dan mampu menunjukkan pergerakan yang positif.

Sejak dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perijinan Berusaha secara Elektronik maka perijinan berusaha dilakukan melalui system elektronik dan dilakukan oleh Lembaga OSS dan selanjutnya, Lembaga OSS menerbitkan NIB (Nomor Induk Berusaha) setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran



**PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KRCIL DAN MENENGAH  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019-2023**

---

Sistem Perijinan ini masih sangat baru sehingga perlu disosialisasikan secara lebih intensif karena dengan pemberlakuan prosedur perijinan secara online ini maka perijinan SIUP TDP TDPUD API .

### 2.3.1.2 Neraca Perdagangan Kaltim Dapat Dilihat Dari Nilai Ekspor Dan Impor Kaltim

**Tabel 13. Neraca Perdagangan Ekspor Dan Impor Kaltim  
2016-2020 (Juta US\$)**

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
<b>I</b>	<b>EKSPOR</b>					
	1.Migas	3.781,67	4.252,51	3.325,24	2.068,21	1.147,57
	2.Non Migas	10.059,40	13.228,39	15.030,93	14.113,93	11.832,18
	<b>TOTAL EKSPOR</b>	<b>30.883,90</b>	<b>13.841,07</b>	<b>18.356,17</b>	<b>16.182,14</b>	<b>12.979,75</b>
<b>II</b>	<b>IMPOR</b>					
	1.Migas	2.613,01	2.402,63	3.206,18	1.409,38	874,48
	2.Non Migas	1.100,81	825,71	1.352,03	1.095,13	1.085,82
	<b>TOTAL IMPOR</b>	<b>9.441,34</b>	<b>3.713,82</b>	<b>4.558,21</b>	<b>2.504,51</b>	<b>1.960,30</b>
<b>III</b>	<b>SURPLUS/ DEFISIT</b>	<b>10.127,25</b>	<b>14.252,56</b>	<b>13.797,96</b>	<b>13.675,88</b>	<b>11.019,45</b>
	1.Migas	1.168,66	1.849,88	119,06	658,85	273,09
	2.Non Migas	8.958,59	12.402,68	13.678,90	13.017,03	10.746,36

Neraca Perdagangan Kaltim tahun 2020 secara total masih mengalami surplus sebesar US\$ 11,02 Milyar. Ekspor Migas Kaltim tahun 2020 sebesar US\$ 1,14 Milyar sedangkan Ekspor Nonmigas Kaltim tahun 2020 sebesar US\$ 11,83 Milyar.

Neraca perdagangan Kaltim selama dua tahun terakhir selalu mengalami defisit baik migas maupun non migas. Surplus sebesar US\$ 7,19 juta. Ekspor Non Migas Prov. Kaltim tahun 2017 sebesar US\$ 11,83 dan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya 2019 sebesar US\$ 13,67 Milyar maka mengalami penurunan 10%. Hal ini dipengaruhi oleh kurang membaiknya harga batu bara dipasaran internasional. Kegiatan ekspor Kaltim masih didominasi komoditi berbasis unrenewable resources yaitu pertambangan. Sedangkan komoditi unrenewable resources perlu dilakukan optimalisasi untuk bisa ditingkatkan kontribusinya dalam neraca perdagangan Kaltim.



**PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KRCIL DAN MENENGAH  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019-2023**

**Tabel 14. Realisasi Komoditi Utama Ekspor Kaltim (US\$ Juta)**

KOMODITI	2016	2017	2018	2019	2020	Share %
Pertambangan	9.017,745	11.936,160	13.552,436	12.410,188	7.108,556	82,36
Hasil Kayu Olahan	364,495	282,295	274,804	218,782	135,079	1,57
Hasil Industri Kimia	610,206	449,100	580,201	650,542	548,822	6,36
Hasil Perikanan dan Kelautan	100,733	41,680	35,249	37,786	26,145	0,30
Hasil Hutan Ikutan	0,000	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00
Hasil Pertanian dan Perkebunan	279,025	584,171	574,541	712,130	726,253	8,41
Hasil Industri Logam	20,475	8,781	8,385	157,651	16,333	0,19
Lain-Lain	61,010	152,65	230,072	136,124	69,772	0,81
Jumlah Non Batubara	1.335,938	1.444,582	1.703,762	1.913,015	1.522,404	17,64
<b>Jumlah</b>	<b>10.130,762</b>	<b>13.380,766</b>	<b>15.256,198</b>	<b>14.323,203</b>	<b>8.630,960</b>	100,00

Sumber : Bank Indonesia diolah oleh Disperindag Prov Kaltim

Beberapa Negara tujuan ekspor Kaltim sebagai Pasar tradisonal (pasar tujuan ekspor yang telah terjalin dan terjadi perdagangan ekspornya) untuk komoditi migas dan non migas yang telah berjalan kerjasama perdagangan antar kedua Negara meliputi :

**Nilai Ekspor Nonmigas Menurut Negara Tujuan Di Provinsi Kalimantan Timur ( Juta US\$ )**

No	2016		2017		2018		2019		2020	
	Negara Tujuan	total	Negara Tujuan	total	Negara Tujuan	total	Negara Tujuan	total	Negara Tujuan	total
1	Tiongkok	2,131.30	India	3,050.47	India	3,470.83	Tiongkok	3,901.35	Tiongkok	3,326.63
2	Republik Korea	1,135.33	Tiongkok	2,862.76	Tiongkok	3,412.48	India	3,240.84	India	2,354.72
3	India	2,182.91	Jepang	1,571.33	Jepang	1,634.25	Jepang	1,225.77	Malaysia	938.33
4	Jepang	1,361.84	Republik Korea	1,552.44	Republik Korea	1,455.88	Malaysia	992.99	Philipina	887.39
5	Philipina	599.10	Philipina	784.08	Malaysia	1,030.25	Taiwan	968.51	Jepang	884.17
6	Malaysia	486.55	Taiwan	774.68	Philipina	1,005.05	Philipina	913.46	Taiwan	676.55
7	Taiwan	683.19	Malaysia	702.23	Taiwan	981.32	Republik Korea	738.64	Republik Korea	587.24
8	Thailand	507.77	Thailand	632.96	Thailand	565.52	Thailand	548.60	Vietnam	448.77
9	Spainyol	95.16	Bangladesh	214.53	Vietnam	325.86	Vietnam	378.49	Thailand	420.29
10	Hongkong	206.91	Italy	138.81	Hongkong	291.74	Bangladesh	315.22	Bangladesh	396.35
	<b>Lainnya</b>	<b>669.35</b>	<b>Lainnya</b>	<b>944.1</b>	<b>Lainnya</b>	<b>857.73</b>	<b>Lainnya</b>	<b>889.72</b>	<b>Lainnya</b>	<b>911.53</b>
	<b>Jumlah</b>	<b>10,059.41</b>	<b>Jumlah</b>	<b>13,228.39</b>	<b>Jumlah</b>	<b>15,030.91</b>	<b>Jumlah</b>	<b>14,113.59</b>	<b>Jumlah</b>	<b>11,831.97</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur



**PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KRCIL DAN MENENGAH  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019-2023**

---

**2.3.1.3 Perkembangan Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) Provinsi Kalimantan Timur**

Surat keterangan asal (Certificate of Origin ) disingkat SKA merupakan fasilitas yang disediakan Pemerintah Republik Indonesia untuk Eksportir yang memberikan manfaat sebagai berikut :

- a. Barang Ekspor Indonesia yang disertakan dengan SKA tersebut mendapat jaminan dari pemerintah Indonesia bahwa barang tersebut memang berasal dari Indonesia.
- b. Mendapat keringanan Bea Masuk dinegara tujuan ekspor bahkan samp

**Tabel 14.b: Perkembangan Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) Pada IPSKA (Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal) Provinsi Kalimantan Timur**

No.	Jenis Form	2018	2019	2020	TOTAL
1	FORM A	997	689	568	2.254
2	FORM AANZ	53	35	34	122
3	FORM AHKFTA	0	0	0	0
4	FORM AI	1.125	1.215	1.078	3.418
5	FORM AJCEP	632	610	320	1.562
6	FORM AK	827	741	617	2.186
7	FORM ANEXO III	0	0	0	0
8	FORM B	233	282	334	849
9	FORM COA	0	0	0	0
10	FORM D	407	493	617	1.517
11	FORM E	560	582	530	1.672
12	FORM GSTP	0	0	0	0
13	FORM HANDICRAFT	0	0	0	0
14	FORM IA-CEPA	0	0	0	0
15	FORM IC-CEPA	0	0	0	0
16	FORM ICC	0	0	0	0
17	FROM ICO	0	0	0	0
18	FORM IJEP A	313	245	238	805
19	FORM IP	3	1	1	5
20	FORM TP	0	0	0	0
	<b>TOTAL</b>	<b>5.150</b>	<b>4.902</b>	<b>4.337</b>	<b>14.390</b>

Beberapa upaya untuk mendorong kinerja ekspor Kaltim diantaranya adalah adanya pelayanan penerbitan Surat Keterangan asal (SKA) untuk komoditi yang akan diekspor. Tidak semua Daerah bisa menerbitkan SKA kecuali daerah yang telah memenuhi persyaratan dan disahkan melalui Peraturan Menteri Perdagangan RI.





Dari volume FOB ekspor Kaltim sebesar USD 7.387.520.000,00 yang telah menggunakan SKA adalah sebesar 38,55% yaitu senilai USD 4.540.021.490,00 (**sumber data : IPSKA Disperindagkop dan UKM Provinsi Kaltim**). Hal tersebut disebabkan karena permintaan dari pembeli (buyer) itu sendiri dan belum dimanfaatkannya secara optimal fasilitas yang ada.

Selain itu adalah penyiapan pelabuhan Kariangau sebagai pelabuhan ekspor langsung ke negara tujuan (direct call) di tahun 2020. Akan tetapi perkembangan ekspor langsung ini juga belum optimal dimanfaatkan oleh pelaku eksportir. Laporan perkembangan Direct Call melalui pelabuhan Kariangau sebagai berikut :

#### **2.3.1.4 Perkembangan Direct Call Melalui Pelabuhan Kariangau Balikpapan**

Ekspor perdana Kaltim pada tanggal 26 Maret 2018 sebanyak 17 teus dengan tujuan ke China terdiri dari Plywood dan Pump & Spare part. Selanjutnya ekspor ke 2 (dua) pada tanggal 09 April 2018 dengan tujuan China berupa Plywood sebanyak 26 teus, kemudian tanggal 01 Mei 2018 Kaltim kembali mengeksport barangnya sebanyak 38 teus yang terdiri dari PKE (Palm Kernel Expeller/ bungkil sawit), Veener, Serabut Kelapa, Moulding, Kepiting. Pada Tahun 2019 Perkembangan Direct Call Kapal Tidak melalui Pelabuhan Kariangau karena kurang Komoditi yang diangkut untuk di ekspor langsung tetapi barang dari Pelabuhan Kariangau Tetap di angkut namun Ekspor nya melalui daerah Seperti Makasar. Surabaya dan Jakarta.

Berdasarkan hasil pantauan dan follow up Dinas Perindagkop dan UKM Provinsi Kalimantan Timur dan Tim PT. KKT (Kaltim Kariangau Terminal) hal tersebut disebabkan oleh belum optimalnya dukungan dari pelaku usaha dan pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Lebih rincinya lagi yaitu :

1. Pelaku usaha :

Belum sepenuhnya mau mengeksport barangnya dikarenakan belum ada perintah dari pimpinan perusahaan untuk melakukan ekspor langsung melalui Pelabuhan Kariangau Balikpapan.

2. Pemerintah Provinsi :

Perlu dukungan berupa regulasi atau kebijakan dari Pemerintah Provinsi yang mengatur pelaku usaha untuk mengeksport barangnya melalui Pelabuhan Kariangau Balikpapan.

3. Pemerintah Kabupaten dan Kota :



**PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KRCIL DAN MENENGAH  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019-2023**

Perlu adanya kesepakatan atau kerjasama dan dukungan Pemerintah Kab/Kota berupa kesepakatan atau kerjasama untuk melakukan ekspor komoditi atau produknya melalui pelabuhan Kariangau Balikpapan minimal 1 (satu) Produk/Komoditi setiap bulannya.

**Tabel 14.d : Perkembangan Direct Call melalui Pelabuhan Kariangau  
Balikpapan Tahun 2018**

No	Eksportir	Komoditi	Gross Weight	Tanggal	Negara Tujuan
1	CV. 3A	Fress Fish	564	25 Maret 2018	Jeddah UEA
		Fress Fish	630	01 April 2018	Jeddah UEA
		Fress Fish	450	05 April 2018	Jeddah UEA
		Fress Fish	780	09 April 2018	Jeddah UEA
		Fress Fish	780	11 April 2018	Jeddah UEA
		Fress Fish	930	13 April 2018	Jeddah UEA
		Fress Fish	840	17 April 2018	Jeddah UEA
		Fress Fish	750	25 April 2018	Dubai
TOTAL			5.724		

Sumber : Pelindo IV

Perkembangan Direct Call Melalui Pelabuhan Kariangau Balikpapan Tahun 2020 mengalami peningkatan jumlah ekspor, dapat dilihat tabel berikut :

**Tabel 14.c : Perkembangan Direct Call Melalui Pelabuhan Kariangau Balikpapan  
Tahun 2020**

No	Tanggal	Rincian Bongkaran	Jumlah (Teus)	Rincian Muatan	Jumlah (Teus)	Kapal
1	30/03/20			Undang Beku Rumput Laut PAO (Palm Acid Oil)	1 Box 1 Box 11 Box	MCC. KYOTO
2	07/04/20	Sparepart Isotank	10 Box 5 Box	Playwood 40 Feet Undang 40 Feet Ikan 20 Feet	5 Box 2 Box 3 Box	B TRADER
3	12/04/20	Dry isi Spareparts 20 Feet TNK isi Chemical 20 Feet Dry isi Spareparts 40 Feet	19 Box 5 Box 3 Box	Reffer isi Undang 40 Feet Reffer isi Undang 20 Feet	1 Box 1 Box	MV. TRIESTE TRADER
4	19/04/20	Sparepart 20 Feet Oli 20 Feet MTY 20 Feet Spareparts 40 Feet MTY 40 Feet	7 Box 2 Box 4 Box 5 Box 21 Box	Undang 20 Feet	2 Box	MV. MCC. SHENZEN



**PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KRCIL DAN MENENGAH  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019-2023**

5	26/04/20	Sparepart 20 Feet Chemical 20 Feet Besi dan Spareparts 40 Feet	15 Box 8 Box 9 Box	MTY 20 Feet Undang 20 Feet	49 Box 4 Box	MV. AS SERENA
6	03/05/20	MTY 20 Feet  <b>FCL 20 Feet dengan isi :</b> Chemical Products Handtools Palm Oil Sparepart  <b>FCL 40 Feet dengan isi :</b> Alumunium Handtools Consolidated Cargo Iron Steel & Articles Metal Machinery or Mechanical	4 Box  9 Box 2 Box 1 Box 1 Box  90 Box 3 Box 1 Box 25 Box 5 Box	MTY 20 Feet Undang 20 Feet	80 Box 3 Box	MV. OLIVIA
7	10/05/20	<b>20 Feet dengan isi :</b> Alumunium Chemical Electronics Gloves Surgical Rubber Handtools  <b>40 Feet dengan isi :</b> Handtools Iron Steel & Steel Articles Metal Machinery or Mechanical	1 Box 14 Box 1 Box 1 Box 1 Box  3 Box 125 Box 4 Box	Undang 20 Feet	2 Box	MCC. KYOTO
8	17/05/20	<b>20 Feet dengan isi :</b> Chemical Products Nos Lubricants Machinery or Mechanical Spareparts  <b>40 Feet dengan isi :</b> Handtools Chemical Products Nos	2 Box 4 Box 2 Box 2 Box  2 Box 1 Box	20 Feet dengan isi : Undang Spareparts Sparepart 40 Feet Full MTY 20 Feet	2 Box 1 Box 1 Box 80 Box	B. TRADER
9	01/06/20	<b>20 Feet dengan isi :</b> Autoparts Car Parts Chemical Products Nos Consolidated Cargo Inorganic Chemicals Machinery or Mechanical Tires Tyres Rubber  <b>40 Feet dengan isi :</b> Consolidated Cargo Handtools Steel Articles Metal Machinery or Mechanical	1 Box 13 Box 3 Box 1 Box 2 Box 2 Box  6 Box 2 Box 55 Box 1 Box	Spareparst 40 Feet	1 Box	MCC. SHENZHEN
10	07/06/20	<b>20 Feet dengan isi :</b> Consolidated Cargo Chemical Products Nos Iron Steel  <b>40 Feet dengan isi :</b> Autoparts Car Parts Consolidated Cargo Handtools Iron Steel	1 Box 6 Box 1 Box  2 Box 7 Box 1 Box 9 Box	20 Feet dengan isi : Spareparts Undang Palm Oil Undang 40 Feet	1 Box 3 Box 5 Box 1 Box	MV. ISOBEL



**PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KRCIL DAN MENENGAH  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019-2023**

		Plants Potted	1 Box			
11	08/06/20	Sparepart 20 Feet  <b>40 Feet dengan isi :</b> CarbonSteel Welded Pipe Steel Flanges	2 Box  36 Box 8 Box	MTY 20 Feet MTY 40 Feet	18 Box 79 Box	ITC. ULSAN (SITC)
12	10/06/20	Pipa 40 Feet Spareparts 20 Feet Full	118 Box 12 Box 1 Box	MTY 20 Feet MTY 40 Feet	2 Box 1 Box	MV. HAYDN (SITC)
13	17/06/2020	Besi 40 Feet	91 box	-	-	MC. CAPE MAGNUS (SITC)
14	21/06/20	Spareparts 20 Feet Spareparts 40 Feet	33 Box 49 Box	Udang 20 Feet Spareparts 40 Feet MTY 40 Feet	1 Box 3 Box 58 Box	MCC. KYOTO
15	29/06/20	Spareparts 20 Feet Besi 40 Feet	9 Box 39 Box	Udang 20 Feet Plywood 20 Feet MTY 20 Feet MTY 112 40 Feet	6 Box 24 Box 1 Box 112 Box	B. TRADER
16	05/07/20	Spareparts 20 Feet Spareparts 40 Feet	10 Box 54 Box	Spareparts 20 Feet Spareparts 40 Feet	1 Box 4 Box	MV. TRIESTE TRADER
17	09/07/20	Spareparts 40 Feet	25 Box	MTY 20 Feet MTY 40 Feet	2 Box 168 Box	MV. HAYDN (SITC)
18	13/07/20	MTY 20 Feet  <b>20 Feet dengan isi :</b> Cat Oil Spareparts  Spareparts 40 Feet	5 Box  3 Box 5 Box 7 Box 84 Box	Plywood 40 Feet MTY 20 Feet MTY 40 Feet	5 Box 26 Box 13 Box	MCC. SHENZEN
19	19/07/20	<b>20 Feet dengan isi :</b> Chemical Consolidated Gloves Surgical Rubber Handtools Machinery or Mechanical  <b>40 Feet dengan isi :</b> Consolidated Glass Glassware Iron Steel Machinery or Mechanical	11 Box 2 Box 1 Box 1 Box 1 Box  4 Box 1 Box 81 Box 2 Box	Udang 20 Feet Rumput Laut 40 Feet	6 Box 1 Box	MV. SAN PEDRO
20	26/07/20	20 Feet 40 Feet	26 Box 46 Box	<b>20 Feet dengan isi :</b> Udang Palm Oil Plywood 40 Feet	10 Box 3 Box 22 Box	MV. ISOBEL
21	03/08/20	Spareparts 20 Feet MTY 20 Feet Spareparts 40 Feet	3 Box 6 Box 32 Box	Udang 20 Feet	3Box	MCC. KYOTO



**PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KRCIL DAN MENENGAH  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019-2023**

22	09/08/20	<b>FCL 20 Feet dengan isi :</b> Lubricating Oil Spareparts  RF MTY 20 Feet Spareparts 40 Feet	2 Box 9 Box 6 Box 45 Box	<b>20 Feet dengan isi :</b> Udang Spareparts MTY 40 Feet	1 Box 1 Box 24 Box	B. TRADER
23	19/08/20	MTY 20 Feet FCL 20 Feet Spareparts 40 Feet	6 Box 19 Box 25 Box	Plywood 40 Feet Udang 20 Feet	9 Box 2 Box	MV. TRIESTE TRADER
24	02/09/20	<b>20 Feet dengan isi :</b> Autoparts Car Parts Chemical Products Consolidated Cargo Iron Steel Lubricants Mechanical Palm Oil Sports Goods  <b>40 Feet dengan isi :</b> Autoparts Consolidated Cargo Electronics Handtools Iron Steel Mechanical	1 Box 20 Box 7 Box 1 Box 3 Box 3 Box 1 Box 1 Box  8 Box 9 Box 2 Box 2 Box 59 Box 1 Box	Udang 20 Feet  <b>40 Feet dengan isi :</b> Plywood Spareparts  MTY 20 Feet MTY 40 Feet	7 Box  3 Box 1 Box 20 Box 4 Box	SEALAND
25	06/09/20	Spareparts Oil Spareparts 40 Feet	3 Box 1 Box 16 Box 20 Box	<b>20 Feet dengan isi :</b> Palm Oil Udang  Spareparts 40 Feet MTY 20 Feet MTY 40 Feet	15 Box 2 Box  2 Box 15 Box 8 Box	MCC. YANGON
26	19/09/20	Spareparts 20 Feet Spareparts 40 Feet	14 Box 19 Box	Spareparts 20 Feet  <b>40 Feet dengan isi :</b> Plywood Spareparts  MTY 20 Feet MTY 40 Feet	1 Box  7 Box 3 Box  20 Box 12 Box	SEALAND
27	05/10/20	Spareparts 20 Feet Spareparts 40 Feet	14 Box 23 Box	<b>40 Feet dengan isi :</b> Plywood Spareparts  <b>20 Feet dengan isi :</b> Spareparts Udang	1 Box 8 Box  2 Box 2 Box	MV. SHENZEN
28	11/10/20	Spareparts 20 FCL Spareparts 40 FCL	13 Box 12 Box	Plywood 40 FCL MTY 20 Feet	12 Box 15 Box	MV. SAN PEDRO
29	22/10/20	Spareparts 20 Feet Spareparts 40 Feet	21 Box 82 Box	Spareparts 20 Feet  <b>40 Feet dengan isi :</b> Plywood Spareparts	1 Box  6 Box 2 Box	MCC. KYOTO

Sumber data: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Prov. Kalimantan Timur, akhir Desember 2020



**PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KRCIL DAN MENENGAH  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019-2023**

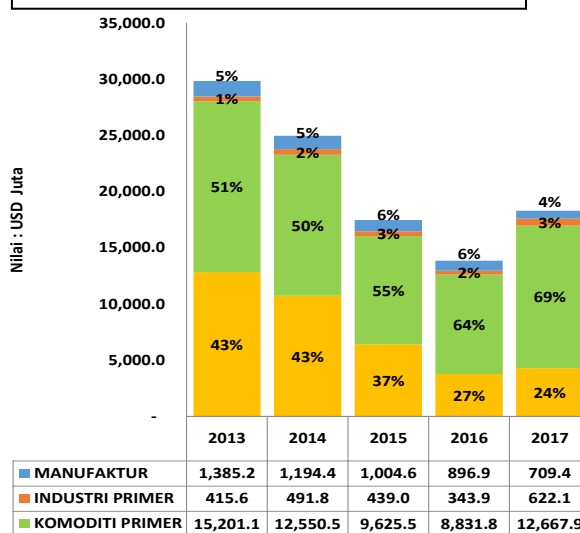
Terbatasnya jenis dan jumlah komoditi yang diekspor masih menjadi permasalahan pelaksanaan Direct Call. Padahal beberapa komoditi Kaltim banyak yang diperdagangkan antar pulau dan menjadi komoditi industry ekspor dari daerah lain di luar Kaltim. Sehingga potensi pendapatan daerah dari pajak ekspor menjadi hilang dan potensi pengembangan sumber daya alam sebagai bahan baku di kaltim menjadi hilang. Sehingga upaya pertumbuhan industri pengolahan berbasis sumber daya alam lokal menjadi sulit karena sumber bahan baku komoditi industry telah banyak diperdagangkan dan dikirim keluar daerah.

Pelaksanaan kegiatan Direct call dirasakan bisa menjadi program prioritas dalam rangka menggerakkan dan memacu tumbuhnya industri lokal dan mempercepat pertumbuhan ekonomi Kaltim. Untuk itu diperlukan dukungan yang besar dari Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten Kota se Kaltim dan juga komitmen para pelaku eksportir untuk bisa mengoptimalkan fungsi pelabuhan Kariangau Balikpapan sebagai pelabuhan ekspor.

Sehingga untuk kedepannya Kaltim perlu memprioritaskan transformasi ekonomi untuk struktur ekspor Kaltim ke Nonmigas non batubara, dengan mendorong pengembangan sektor-sektor di luar migas dan batubara secara terencana dan berkelanjutan.

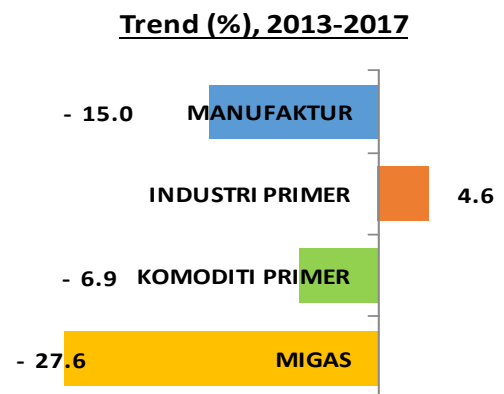
**Struktur Ekspor Kalimantan Timur**

**Gb.1 : Diagram Struktur Ekspor**



Sumber : BPS diolah Kementerian Perdagangan.

**Gb.2 : Diagram Struktur Ekspor**



- Tahun 2017 struktur ekspor Kaltim didominasi oleh sektor Primer dengan *share* mencapai 96% dengan komposisi migas (24%), komoditas primer (69%) dan industri primer (3%), sementara ekspor manufaktur baru mencapai 4%.



**PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KRCIL DAN MENENGAH  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019-2023**

Data : Kemendag RI

**Tabel 15. Perkembangan Komoditas Ekspor Kaltim 2013 s.d 2017**

URAIAN	Nilai : USD Juta							Perub.(%) 2018/17	Trend (%) 2013-2017	Share (%) 2017
	2013	2014	2015	2016	2017	Jan-Jun 2017	Jan-Jun 2018			
<b>TOTAL EKSPOR</b>	<b>29,845.3</b>	<b>24,967.8</b>	<b>17,483.3</b>	<b>13,854.4</b>	<b>18,302.3</b>	<b>8,772.1</b>	<b>9,333.8</b>	<b>6.4</b>	<b>- 14.5</b>	<b>100.0</b>
<b>MIGAS</b>	<b>12,843.5</b>	<b>10,731.0</b>	<b>6,414.2</b>	<b>3,781.7</b>	<b>4,302.8</b>	<b>2,080.3</b>	<b>1,636.8</b>	<b>- 21.3</b>	<b>- 27.6</b>	<b>23.5</b>
GAS	9,078.1	7,590.4	4,524.4	2,782.0	3,139.9	1,496.9	1,449.5	- 3.2	- 26.9	17.2
MINYAK MENTAH	2,307.6	1,759.7	1,235.6	861.4	974.4	465.6	176.2	- 62.2	- 21.6	5.3
HASIL MINYAK	1,457.7	1,380.9	654.1	138.2	188.5	117.9	11.1	- 90.6	- 47.2	1.0
<b>KOMODITI PRIMER</b>	<b>15,201.1</b>	<b>12,550.5</b>	<b>9,625.5</b>	<b>8,831.8</b>	<b>12,667.9</b>	<b>5,990.5</b>	<b>7,029.5</b>	<b>17.3</b>	<b>- 6.9</b>	<b>69.2</b>
BATUBARA	15,191.4	12,547.2	9,620.8	8,827.1	12,630.1	5,958.5	7,023.6	17.9	- 7.0	69.0
UDANG	1.9	1.6	1.5	2.0	29.5	26.3	3.1	- 88.3	75.8	0.2
LAINNYA...	7.7	1.7	3.2	2.8	8.3	5.7	2.8	- 50.9	6.8	0.0
<b>INDUSTRI PRIMER</b>	<b>415.6</b>	<b>491.8</b>	<b>439.0</b>	<b>343.9</b>	<b>622.1</b>	<b>296.7</b>	<b>295.9</b>	<b>- 0.2</b>	<b>4.6</b>	<b>3.4</b>
CPO & TURUNANNYA	252.6	334.9	328.4	266.6	584.2	271.6	293.3	8.0	15.6	3.2
KAYU OLAHAN (Wood in chips)	135.7	156.8	110.6	76.3	35.3	23.6	0.9	- 96.4	- 28.9	0.2
LAINNYA...	27.2	0.1	0.0	1.1	2.7	1.4	1.8	25.7	- 17.9	0.0
<b>MANUFAKTUR</b>	<b>1,385.2</b>	<b>1,194.4</b>	<b>1,004.6</b>	<b>896.9</b>	<b>709.4</b>	<b>404.6</b>	<b>371.6</b>	<b>- 8.2</b>	<b>- 15.0</b>	<b>3.9</b>
PRODUK KIMIA	469.5	454.1	453.3	349.9	364.3	230.2	193.1	- 16.1	- 7.4	2.0
PRODUK KAYU (Plywood)	199.8	245.3	259.0	227.3	217.9	114.7	91.1	- 20.6	1.0	1.2
PUPIK MINERAL/KIMIA	438.4	349.5	226.9	270.7	115.5	54.2	76.6	41.2	- 25.4	0.6
LAINNYA...	277.4	145.5	65.4	49.0	11.8	5.4	10.8	98.5	- 52.3	0.1

- Struktur permintaan pasar impor dunia: 81% produk manufaktur dan 19% produk primer.
- Struktur produk ekspor Indonesia: 53% produk manufaktur dan 47% produk primer.
- Ekspor Vietnam lebih unggul karena berbasis produk *high-skill & technology intensity*.

Beberapa komoditi potensial Kaltim selain berpotensi sebagai komoditi ekspor juga berperan dalam perdagangan antar pulau. Berdasarkan data dari Pelindo Samarinda, komoditi yang diperdagangkan antar pulau yang terdaftar di Pelabuhan Samarinda meliputi :

**Tabel 16. Daftar Pengapalan Barang Antar Pulau Yang Dimuat  
Di Pelabuhan Samarinda**

No	Komoditi	Volume (ton)
1	Batu Bara	17.930.535
2	BBM	959.586
3	CPO	854.366
4	Kayu Bulat	840.285
5	Crude Oil	316.811
6	Kayu Bulat Kecil	204.933
7	Kernel	177.909
8	Drilling	83.418
9	Alat Berat	55.091
10	PNP	41.214
11	Material	32.783



**PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KRCIL DAN MENENGAH  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019-2023**

No	Komoditi	Volume (ton)
12	Plywood	26.410
13	Kayu serbuk	19.921
14	Aminirate	14.679
15	Semen	7.555
16	Pipa	828
17	Pupuk	635
18	Sirtu	600
19	Beras	-
20	MDF Board	-
21	Kayu Olahan	-
22	Udang Beku	-
23	Lain-lain	101.251
		<b>21.668.810</b>

Dilihat dari data komoditi perdagangan antar pulau ternyata untuk jenis komoditi Plywood, kernel merupakan komoditi ekspor Kaltim. Hal ini menunjukkan adanya proses ekspor tidak langsung terhadap beberapa komoditi unggulan Kaltim. Sehingga Kaltim kehilangan potensi pendapatan asli daerah yang berupa pajak ekspor. Selain itu kehilangan potensi bahan baku industry yang seharusnya bisa dikembangkan di Kaltim. Yaitu untuk komoditi CPO, kayu bulat yang merupakan komoditi untuk bahan baku industri minyak goreng dan plywood di daerah lain. Peluang untuk menumbuhkan hilirisasi industry menjadi terhambat dengan masalah pasokan bahan baku karena banyak sekali industry pengolahan di luar Kaltim yang disupply bahan bakunya dari Kaltim.

Dari data dari Pelabuhan Samarinda, juga diketahui bahwa beberapa komoditi terutama barang kebutuhan pokok untuk masyarakat Kaltim, ternyata masih dipasok dari luar Kaltim.

**Tabel 17. Daftar Pengapalan Barang Antar Pulau Yang Dibongkar  
Di Pelabuhan Samarinda**

No	Komoditi	Volume (ton)
1	Batu Bara	5.933.903
2	Semen	1.491.489
3	BBM	1.342.055
4	Sirtu	1.016.923
5	Kayu Olahan	375.765
6	Beras	286.872
7	Kayu bulat	204.933
8	CPO	86.825
9	PNP	54.658
10	Alat berat	38.111
11	Pupuk	29.654





**PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KRCIL DAN MENENGAH  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019-2023**

---

No	Komoditi	Volume (ton)
12	Pakan ternak	23.974
13	Amntrate	23.729
14	Material	9.712
15	Gasoil	9.600
16	Methanol	8.864
17	Aspal	5.620
18	Barite	4.850
19	Garam	4.005
20	Drilling	3.790
21	Hewan	3.238
22	Saraline	700
23	Lain-lain	319.462
	<b>TOTAL</b>	<b>11.229.193</b>

Dalam mendukung pemenuhan barang kebutuhan pokok dan membuka pasar dalam negeri untuk komoditi unggulan Kaltim maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah melakukan beberapa MoU dengan beberapa Pemerintah Provinsi di Indonesia meliputi :

- Pemerintah Provinsi Jawa Timur
- Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
- Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta
- Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
- Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat
- Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan

Akan tetapi pelaksanaan MoU tersebut perlu adanya tindaklanjut yang lebih konkrit dalam bentuk perjanjian kerjasama langsung antar pelaku usaha di kedua provinsi. Sehingga perlu dilakukan upaya peninjauan dan pemetaan produk-produk Kaltim yang punya potensi pasar strategis di Provinsi dimaksud. Dan juga perlu upaya pengembangan pasar produk di provinsi lain di luar provinsi yang telah ada.



### 2.2.3 Bidang Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Barang Beredar

Bidang Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Barang Beredar terbentuk berdasarkan peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomer 71 Tahun 2016 tanggal 21 Desember 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas perindagkop dan UKM Prov. Kaltim

Berdasarkan PERGUB tersebut, Tugas Bidang Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Barang Beredar adalah melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan pengendalian perlindungan konsumen, pengawasan barang beredar dan hubungan kelembagaan.

Kegiatan Bidang Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Barang Beredar meliputi upaya perlindungan dan pemberdayaan konsumen melalui sosialisasi, edukasi dan penanganan pengaduan/sengketa konsumen baik melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) maupun melalui Sistem Pengawasan Perlindungan Konsumen (SISWAS-PK). Untuk pelaksanaan pengawasan barang beredar dan/atau jasa selain dilakukan oleh petugas yang berwenang juga dilaksanakan bersama dengan instansi terkait Tim Terpadu.

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, maka pelaksanaan urusan perlindungan konsumen dan pengawasan barang beredar dan/atau jasa yang semula dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Kab/Kota, maka kewenangan tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah provinsi.

Dalam pengelolaan SISWAS-PK, tahun 2016 Provinsi Kalimantan Timur menduduki peringkat I (satu) dan tahun 2017 menduduki peringkat 3 (tiga). Berdasarkan hasil seleksi yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan, tahun 2016 Provinsi Kalimantan Timur terpilih sebagai Peringkat Terbaik VI Pemerintah Daerah Provinsi Peduli Konsumen.

**Tabel 18. Kinerja Bidang Perlindungan Konsumen Dan Pengawasan Barang Beredar Tahun 2016 - 2020**

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Perlindungan Konsumen</b>						
1	Sosialisasi/Edukasi Koncer/ACI	2	5	2	6	3
2	Forum Koordinasi Kelembagaan	1	1	-	1	-
3	Penanganan Sengketa Konsumen	19 kasus	13 kasus	8 kasus	16 kasus	15 kasus
4	Pengiriman Data SISWAS-PK (Sistem Pengawasan Perlindungan Konsumen )	182 data	216 data	113 data	-	-
<b>Pengawasan Barang Beredar</b>						



**PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KRCIL DAN MENENGAH  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019-2023**

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Pelanggaran	14	45	45	5	5
2	Jumlah produk yg diawasi	10 jenis	10 jenis	10 jenis	14 jenis	19 jenis
3	Jumlah Pelaku Usaha yg dikunjungi	150 PU	176 PU	133 PU	150 PU	120 PU
4	Jumlah Sampel yg diuji Laboratorium	2 jenis	3 jenis	6 jenis	3 jenis	-
5	Jumlah Kab/Kota yg diawasi	10 Kab/Kota	9 Kab/Kota	9 Kab/Kota	10 Kab/Kota	10 Kab/Kota
<b>Kelembagaan</b>						
1	Jumlah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)	2	2	2	2	2
2	Jumlah Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM)	8	11	11	11	11

Sebagaimana kita ketahui bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sudah lama diberlakukan. Tujuannya adalah untuk membela hak-hak masyarakat sebagai konsumen dalam berbagai transaksi ekonomi. Namun Undang-Undang ini dan berikut peraturan keturunannya belum banyak diketahui masyarakat luas. Kesadaran Konsumen akan hak dan kewajibannya juga belum banyak dipahami atau belum memasyarakat. Padahal pada era global ini, berbagai produk barang maupun jasa dengan mudah dapat dibeli. Maka pada saat itulah kerawanan terjadinya pelanggaran bisa terjadi. Dampaknya bisa mengakibatkan kerugian dan bahaya bagi konsumen. Untuk mengantisipasi dampak tersebut, proteksi yang cukup sangat diperlukan bagi masyarakat agar kerugian dan bahaya bagi konsumen bisa diminimalisir.

Dari Persoalan dan kondisi diatas, Bidang Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Barang Beredar dan/ atau jasa telah melaksanakan program kegiatan Edukasi kepada pelajar, pelaku usaha, dan komunitas konsumen.



**PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KRCIL DAN MENENGAH  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019-2023**

**Tabel 19. Edukasi Konsumen**

TAHUN	PELAJAR (Orang)	KOMUNITAS (Orang)	Forum Kelembagaan (Orang)	KETERANGAN
2018	100	50	-	- MAN 2 Model dan SMA Negeri 1 Samarinda - Komunitas : Tenggarong, Kab.Kutai Kartanegara
2019	500	150	400	- Samarinda (ASN) - Bontang, Kutim, Paser, Berau, Kubar (SLTA dan Pelaku Usaha
2020	300	300	-	- Samarinda (SLTA 100, ASN 100) - Balikpapan (SLTA 100, ASN 100) - Mahakam Ulu (SLTA 100, ASN 100)

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan R.I Nomor 69 Tanggal 8 Juni Tahun 2018 Tentang Pengawasan Barang Beredar Dan/Atau Jasa. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh petugas pengawas untuk memastikan kesesuaian Barang Beredar dan/atau Jasa dalam memenuhi Standar mutu Produksi Barang Beredar dan/atau Jasa, Pencantuman Label dalam Bahasa Indonesia, Petunjuk Penggunaan, Jaminan Layanan, Purna Jual, Cara Menjual, Pengiklanan, Jaminan dan/atau Garansi yang disepakati dan/atau diperjanjikan dan/atau Klausula Baku.

Pengawasan juga merupakan salah satu upaya memberikan perlindungan konsumen dari eksese negative peredaran barang dan/atau jasa sekaligus menumbuhkan kesadaran dan tanggung jawab pelaku usaha dalam memproduksi dan memperdagangkan Barang dan Jasa.

**Tabel 20. Pengawasan Barang Beredar dan Jasa Tahun 2018 s.d 2020**

No	Kab/Kota	Komoditi (Barang Yang di Awasi )			Pelaku Usaha (orang)		
		2018	2019	2020	2018	2019	2020
1.	Samarinda	Setrika, Penanak Nasi, Saklar, Hair Drayer, Printer, Sembako, Madu, AMDK, Garam Beryodium, Minuman Beralkohol, Biskuit/Wafer, Beras, Ikan Kaleng.	Ban Dalam, Ban IUar, Tepung Terigu, Kopi Bubuk, Minyak Goreng, Biskuit, Mie Instan, Gula Pasir, Susu Bubuk, Helm, Melamin, Beras, Daging Ayam, Daging Sapi, Sayur – Mayur, Kue Kering, Roti, Rumah Makan.	Kipas Angin, Setrika, Penanak Nasi, Kompor Gas, Biskuit, Bumbu Masak, Makanan Ringan, Kopi Instan, Mie Instan, Teh, Minyak Goreng, Daging Beku, Gula Pasir, Beras/Sembako, Baja Tulangan Beton.	49	129	32
2.	Balikpapan	Minuman Beralkohol, Bahan Kima Berbahaya, Mainan Anak, Lampu Swaballanst, Ban Dalam	Ban Dalam Motor Roda 2, Susu Bubuk, Minyak Goreng, Gula Pasir, Tepung Terigu, Biskuit, Kopi Bubuk,	Pakaian Bayi, Mainan Anak, Kompor Listrik, Kompor Gas,	37	30	18



**PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KRCIL DAN MENENGAH  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019-2023**

No	Kab/Kota	Komoditi (Barang Yang di Awasi)			Pelaku Usaha (orang)		
		2018	2019	2020	2018	2019	2020
		Motor Roda 2, Biskuit/Wafer, Kopi Instant, Minuman Jahe, Minyak Goreng, Stop Kontak, Saklar.	Mie Instant, Ban Luar Motor Roda 2, Rumah Makan, Parcel, Kue Kering, Pangan Segar, Bawang Putih, Daging Beku.	Melamin, Vacuum Cleaner, Penanak Nasi, Rumah Makan, Dispenser, Regulator dan Selang, Minyak Goreng, Gula Pasir.			
3.	Bontang	Kerupuk, Amplang, Kripik Pisang/Singkong, Minuman Jahe, Minyak goreng, Stop Kontak, Saklar.	Susu Bubuk, Minyak Goreng, Gula Pasir, Tepung Terigu, Biskuit, Kopi Bubuk, Mie Instan, Ban Luar Motor Roda 2, Ban Dalam Motor Roda 2, Helm, Melamin.	Kompor Gas, Penanak Nasi, Pakaian Bayi, Mainan Anak, Baja Tulangan Beton.	1	19	8
4.	Kutai Timur	Mainan Anak, Lampu Swaballanst, Kotak Kontak, Regulator.	Susu Bubuk, Minyak Goreng, Gula Pasir, Tepung Terigu, Biskuit, Kopi Bubuk, Mie Instan, Ban Luar Motor Roda 2, Ban Dalam Motor Roda 2, Melamin.	Kompor Gas, Penanak Nasi, Pakaian Bayi, Baja Tulangan Beton.	31	17	7
5.	Paser	Lampu Swaballanst, Ban Dalam Roda 2.	Susu Bubuk, Minyak Goreng, Gula Pasir, Tepung Terigu, Biskuit, Kopi Bubuk, Mie Instan, Ban Luar Motor Roda 2, Ban Dalam Motor Roda 2, Helm.	Maianan Anak, Pakaian, Penanak Nasi, Minyak Goreng, Rumah Makan.	33	14	14
6.	Kutai Barat	Ban Dalam Motor Roda 2.	Tepung Terigu, Gula Pasir, Minyak Goreng, Kopi Bubuk, Biskuit, Susu Bubuk.	Kompor Gas, Regulator dan Selang, Penanak Nasi, Maian Anak, Pakaian Bayi, Kipas Angin, Setrika, Baja Tulangan Beton, Rumsh Makan.	11	17	12
7.	Penajam Paser Utara	Saklar, Lampu Swaballanst, Ban Luar Motor Roda 2, Stop Kontak, Pakaian Bayi, Kipas Angin.	Minyak Goreng, Helm, Tepung Terigu, Gula Pasir, Kopi Bubuk, Biskuit, Ban Dalam Motor Roda 2, Ban Luar Motor Roda 2, Rumah Makan.	Spae Part Motor Roda 2, Setrika, Penanak Nasi, Kompor Gas, Pakaian Bayi, Gula Pasir, Mainan Anak, Melamin, Rumah Makan.	16	11	8
8.	Berau	Maian Anak, Biskuit, Ban Dalam Motor Roda 2.	Susu Bubuk, Minyak Goreng, Gula Pasir, Tepung Terigu, Biskuit, Kopi Bubuk, Mie Instan, Ban Luar Motor Roda 2, Ban Dalam Motor Roda 2, Helm, Melamin.	Pakaian Bayi, Gula Pasir, Minyak Goreng, Penanak Nasi, Vacuum Cleaner, Maianan Anak, Kompor Gas, Regulator dan Selang, Perlengkapan Bayi.	9	35	7
9.	Kutai Kartanegara	-	Biskuit, Minyak Goreng, Mie Instan, Gula Pasir, Tepung Terigu, Helm.	Minyak Goreng, Kompor Gas, Penanak Nasi, Vacuum Cleaner, Rumah Makan	-	24	10
10.	Kab. Mahakam Ulu	-	Tepung Terigu, Gula Pasir, Minyak Goreng, Susu Bubuk, Mie Instan.	Minyak Goreng, Tepung Terigu, Biskuit, Mie Instan, Melamin, Kompor Gas, Gula	-	20	4
<b>Jumlah</b>					<b>187</b>	<b>316</b>	<b>120</b>

Salah satu upaya yang telah di laksanakan di Kaimantan Timur sesuai dengan amanat UU Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah terbentuknya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang saat ini sudah ada di Kabupaten Berau dan



**PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KRCIL DAN MENENGAH  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019-2023**

Kota Samarinda, yang Anggaran Operasionalnya tersedia di Bidang Perlindungan Konsumen dan pengawasan Barang Beredar sejak Tahun 2017.

BPSK merupakan salah satu sarana dalam penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan, dimana dalam tugasnya mengacu pada peraturan menteri Nomor : 06/M-DAG/PER/2017 tanggal 16 Februari 2017 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

**Tabel 21. Tindak Lanjut**

Tahun	Penyelesaian Sengketa (Mediasi)	Jenis Sengketa	Hasil Pengawasan (Surat Teguran)	Kerja Sama Penanganan Kasus (Saksi Ahli)	Jumlah
2018	8	Jasa Leasing (5) Jasa Mediasi (1) Barang Kadaluarsa (1) Kartu Garansi (1)	45 dar 133 Pelaku Usaha	5 Polda Kaltim Polres Balikpapan Polres Samarinda	58
2019	5	Jasa (4) Makanan (1)	5 dari 150 Pelaku Usaha	11 Kejaksaan Negeri Samarinda Polres Balikpapan Polres Samarinda Polda Kaltim	21
2020	9	Jasa (9)	5 dari 120 Pelaku Usaha	6 Polda Kaltim Kejaksaan Negeri Samarinda Polres Balikpapan Polres Berau	20

#### **2.2.4 Bidang Perindustrian.**

Sektor industri merupakan salah satu sektor yang mampu mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi. Ini disebabkan karena sektor industri memiliki peranan untuk mengatasi masalah pengangguran dan terciptanya ekonomi berbasis agroindustri yang bersifat padat karya. Tidak heran jika sektor industri mampu menjadi mesin penggerak utama (prime mover) perekonomian daerah, sekaligus tulang punggung ketahanan ekonomi daerah dengan berbasis sumber daya lokal yang memiliki struktur keterkaitan dan kedalaman yang kuat.

Pembangunan industri merupakan salah satu pilar pembangunan perekonomian nasional yang diarahkan dengan menerapkan prinsip-prinsip pembangunan industri yang berkelanjutan serta didasarkan pada aspek pembangunan ekonomi, sosial dan lingkungan hidup. Saat ini pembangunan industri sedang dihadapkan pada berbagai tantangan yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan industri dan ekonomi nasional. Peningkatan daya saing industri merupakan salah satu pilihan yang harus dilakukan agar produk industri nasional mampu bersaing di dalam negeri maupun luar negeri.



Untuk menjadi negara industri yang semakin disegani di dunia, maka diperlukan kerja bersama dalam rangka peningkatan daya saing dan daya tarik investasi, antara lain dengan menciptakan iklim usaha yang kondusif, peningkatan kemampuan teknologi industri untuk mendorong peningkatan mutu, efisiensi dan produktivitas, kepastian hukum, pemberian fasilitas berupa insentif fiskal, dukungan bahan baku, energi, SDM dan pembiayaan serta kemudahan-kemudahan lain dalam rangka mendukung kegiatan usaha industri.

#### **2.2.4.1 Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) Kalimantan Timur.**

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian, bidang industri telah menyusun Rencana Pembangunan Industri Provinsi, dimana dokumen ini oleh Pemerintah Provinsi bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi menetapkannya dalam bentuk Peraturan Daerah, yaitu Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2039.

Rencana Pembangunan Industri Provinsi ini untuk memberikan pedoman kepada Pemerintah dan Pelaku Industri dalam perencanaan dan pembangunan industri di Provinsi Kalimantan Timur selama 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.

Dalam Rencana Pembangunan Industri Provinsi diarahkan pembangunan industri berbasis sumber daya lokal, ramah lingkungan dan berkelanjutan. yang disesuaikan dengan kondisi potensi daerah serta aspirasi masyarakat, dengan demikian diharapkan pembangunan industri akan sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh Provinsi Kalimantan Timur dan pemanfaatan sumber daya alam yang ada akan menjadi optimal, sehingga pemerataan kesejahteraan dapat terwujud, Provinsi Kalimantan Timur dengan luas wilayah yang sangat luas memiliki sumber daya alam yang melimpah untuk dilakukan hilirisasi industrinya. Potensi sumber daya alam di Kalimantan Timur yang menjadi fokus hilirisasi adalah :



**PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KRCIL DAN MENENGAH  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019-2023**

**Tabel 22. Jumlah Produksi Komoditi Provinsi Kalimantan Timur**

No	Komoditas	Jumlah Produksi			
		2017	2018	2019	2020
1	Minyak Bumi	29.754,98 (ribu barel)	23.717,95 (ribu barel)	20.829,80 (ribu barel)	14.381,23 (ribu barel)
2	Gas Bumi	449.579,20 (ribu MMBTU)	296.832,49 (ribu MMBTU)	240.828,16 (ribu MMBTU)	156.294,54 (ribu MMBTU)
3	Batu Bara	251.320,89 (ribu ton)	257.143,93 (ribu ton)	228.979,57 (ribu ton)	1.878.017,25 (ribu ton)
4	Karet	63.510 (ton)	57.569 (ton)	52.817 (ton)	70.628 (ton)
5	Kelapa Sawit (dalam TBS, bukan CPO)	13.164.310 (ton)	13.398.363 (ton)	18.343.852 (ton)	16.717.254 (ton)
6	Perikanan Tangkap	-	149.039 (ton)	147.036,5 (ton)	152.481,3 (ton)
7	Perikanan Budidaya	-	151.918,325 (ton)	143.511,943 (ton)	160.243,592 (ton)

Sumber : BPS Kaltim 2021 (Data diolah DP2KUKM Prov.Kaltim)

Selanjutnya dengan memperhatikan faktor-faktor kriteria pemilihan industri unggulan dan rencana induk pembangunan industri nasional termasuk potensi sumber daya alam yang ada, maka ditetapkanlah industri unggulan provinsi melalui Perda RPIP yakni Industri Hulu Agro, Industri Aneka, Industri Kimia Dasar Berbasis Migas dan Batubara, Industri Pangan. Berikut rinciannya :

**Tabel 23. Industri Unggulan Provinsi Kalimantan Timur**

No.	Industri Unggulan	Jenis Industri						Lokasi	
		2019-2023		2024-2028		2029-2039			
1	INDUSTRI HULU AGRO	<b>Industri Oleofood</b>							
		1	Minyak Goreng Pengemasan	1	Minyak Goreng Pengemasan	1	Minyak Goreng Pengemasan	1	Balikpapan
		2	Minyak Goreng	2	Minyak Goreng Margarin	2	Minyak Goreng	2	Penajam Paser Utara
		3		3	Shortening			3	Kutai Timur
		4		4				4	Bontang
		<b>Industri Oleokimia</b>							
		1	Asam lemak nabati	1	Asam lemak nabati	1	Asam lemak nabati	1	Balikpapan
		2	Minyak atsiri	2	Minyak atsiri	2	Fatty alcohols	2	Penajam Paser Utara
				3	Fatty alcohols	3	Fatty amine	3	Kutai Timur
				4	Fatty amine	4	Methyl ester sulfonat (biosurfactant)	4	Bontang
				5	Biolubricant (rolling oils)				
				6					





**PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KRCIL DAN MENENGAH  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019-2023**

No.	Industri Unggulan	Jenis Industri						Lokasi	
		2019-2023		2024-2028		2029-2039			
		<b>Industri Kemurgi</b>							
	1 Biodiesel	1 Biodiesel	1 Biodiesel	1 Biodiesel	1 Biodiesel	1 Biodiesel	1 Balikpapan		
	2 Biogas dari palm oli mill effluent (POME)	2 Bioetanol	2 Biogas dari palm oli mill effluent (POME)	2 Bioetanol	2 Bioavtur (Bio jet fuel)	2 Biogas dari palm oli mill effluent (POME)	2 Penajam Paser Utara		
		3	3	3	3	3	3 Kutai Timur		
				4	4	4	4 Bontang		
						5	5 Paser		
<b>Industri Pakan Ternak</b>									
	Ransum dan suplemen pakan ternak dan aquaculture		Suplemen pakan ternak dan aquaculture		Suplemen pakan ternak dan aquaculture		1 Berau		
							2 Kutai Kartanegara		
<b>Industri Barang dari Kayu</b>									
	1 Komponen berbasis kayu (wood working, laminated and finger joint)	1	Komponen berbasis kayu (wood working, laminated and finger joint)	1	Komponen berbasis kayu (wood working, laminated and finger joint)	1	1 Balikpapan		
	2 Aneka produk berbasis limbah industri kayu Wood moulding products	2	Aneka produk berbasis limbah industri kayu Wood moulding products	2	Aneka produk berbasis limbah industri kayu Wood moulding products	2	2 Samarinda		
		3		3		3	3 Penajam Paser Utara		
							4 Kutai Timur		
							5 Kutai Barat		
							6 Kutai Kartanegara		
<b>Industri Pulp dan Kertas</b>									
	Pulp dan aneka barang kertas		Pulp dan aneka barang kertas		Microbial cellulose fiber		1 Penajam Paser Utara		
							2 Berau		
2	<b>INDUSTRI ANEKA</b>	<b>Industri Furnitur dan Barang Lainnya dari Kayu</b>							
	1 Furnitur kayu dan rotan	1	Furnitur kayu dan rotan	1	Furnitur kayu dan rotan	1	1 Kutai Barat		
	2 Kerajinan dengan bahan baku limbah industri pengolahan kayu	2	Kerajinan dengan bahan baku limbah industri pengolahan kayu	2	Kerajinan dengan bahan baku limbah industri pengolahan kayu	2	2 Mahakam Ulu		
	3 Kerajinan ukir-ukiran dari kayu	3	Kerajinan ukir-ukiran dari kayu	3	Kerajinan ukir-ukiran dari kayu	3	3 Kutai		
							4 Kartanegara		
							5 Balikpapan		
<b>Industri Pengolahan Karet dan Barang dari Karet</b>									
	1 Karet untuk keperluan umum	1	Karet untuk keperluan umum	1	Karet untuk keperluan umum	1	1 Samarinda		
	2 Karet untuk keperluan khusus (antara lain untuk otomotif dan elektronik)	2	Karet untuk keperluan khusus (antara lain untuk otomotif dan elektronik)	2	Karet untuk keperluan khusus (antara lain untuk otomotif dan elektronik)	2	2 Balikpapan		
							3 Kutai Barat		
							4 Kutai Timur		
							5 Mahakam Ulu		
							6 Penajam Paser Utara		
3	<b>INDUSTRI KIMIA DASAR BERBASIS MIGAS DAN BATUBARA</b>	<b>Industri Petrokimia Hulu</b>							
	1 Etilena	1	Etilena	1	Etilena	1	1 Balikpapan		
	2 Metanol	2	Metanol	2	Metanol	2	2 Bontang		
	3 Ammonia	3	Ammonia	3	Ammonia	3			
	4 Asam formiat	4	Asam formiat	4	Asam formiat	4			
	5 Parafin liquid	5	Parafin liquid	5	Parafin liquid	5			
<b>Industri Pupuk</b>									
	1 Pupuk tunggal (basis nitrogen, fosfat, dan kalium)	1	Pupuk tunggal (basis nitrogen, fosfat, dan kalium)	1	Pupuk tunggal (basis nitrogen, fosfat, dan kalium)	1	1 Bontang		
	2 Pupuk majemuk	2	Pupuk majemuk	2	Pupuk majemuk	2	2 Samarinda		
	3 Pupuk Organik	3	Pupuk Organik	3	Pupuk Organik	3			
4	<b>INDUSTRI PANGAN</b>	<b>Industri Pengolahan Ikan dan Hasil Laut</b>							
	1 Ikan awet (beku, kering dan asap) dan fillet	1	Ikan awet (beku, kering dan asap) dan fillet	1	Ikan awet (beku, kering dan asap) dan fillet	1	1 Kutai		
							2 Kartanegara		
							2 Balikpapan		



**PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KRCIL DAN MENENGAH  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019-2023**

No.	Industri Unggulan	Jenis Industri						Lokasi	
		2019-2023		2024-2028		2029-2039			
		2	Aneka olahan rumput laut	2	Aneka olahan ikan, rumput laut dan hasil laut lainnya (termasuk carrageenan, minyak ikan, suplemen dan pangan fungsional lainnya)	2	Aneka olahan ikan, rumput laut dan hasil laut lainnya (termasuk carrageenan, minyak ikan, suplemen dan pangan fungsional lainnya)	3	Penajam Paser Utara
								4	Paser
								5	Bontang
								6	Samarinda

Untuk mendukung pelaksanaan pembangunan/pengembangan industri unggulan provinsi di atas, telah disusun pula rencana aksi yang merupakan bagian dari program pembangunan industri diantaranya pengembangan perwilayahan industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana prasarana industri dan pemberdayaan industri kecil menengah.

#### **2.2.4.1.2 Kawasan Industri.**

Langkah-langkah dalam rangka peningkatan daya saing dan daya tarik investasi yakni terciptanya iklim usaha yang kondusif, efisiensi, kepastian hukum, dan pemberian fasilitas fiskal serta kemudahan-kemudahan lain dalam kegiatan usaha Industri, yang antara lain dengan tersedianya lokasi Industri yang memadai yang berupa Kawasan Industri. Berikut kondisi *existing* dan *perencanaan* Kawasan Industri di Kalimantan Timur :

##### **2.2.4.1.2.1 Kaltim Industrial Estate**

PT. Kaltim Industrial Estate (KIE), awalnya bergerak di bidang pengelolaan kawasan industri yang menyediakan lahan bagi berbagai perusahaan berbasis gas bumi, yang didirikan pada tanggal 29 Agustus 1990 di Bontang oleh PT. Pupuk Kalimantan Timur (PT. Pupuk Kaltim). Kini PT. KIE telah berkembang menjadi diversified firm sehingga saat ini ada lima pilar bisnis yakni : Kawasan Industri, Rekayasa dan Konstruksi, Properti, Beton dan Trading. Komitmen jajaran PT. KIE untuk senantiasa meningkatkan kualitas proses bisnis dan memahami kebutuhan konsumen, serta dukungan penuh PT. Pupuk Kaltim merupakan faktor kunci keberhasilan PT. KIE dalam mengembangkan bisnis-bisnis ini.



**PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KRCIL DAN MENENGAH  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019-2023**

PT. KIE merupakan anak perusahaan dari PT. Pupuk Kaltim yang juga merupakan pengelola Kaltim Industrial Estate dengan luas ± 230 Ha, kepemilikan saham sebesar 99,99% PT. Pupuk Kaltim merupakan perusahaan produsen pupuk dengan kapasitas produksi urea ± 3,43 juta ton per tahun, amoniak sebanyak ± 2,74 juta ton per tahun dan NPK ± 350 ribu ton per tahun.

Tabel 24. Daftar Tenant PT. Kaltim Industrial Estate (KIE)

Daftar Tenant di Kawasan Industri KIE		Perusahaan dalam masa pembangunan
Nama Perusahaan	Bidang Usaha	
<b>INDUSTRI SKALA BESAR</b>		
PT. Kaltim Methanol Industri	Produksi Metanol	NPK Chemical - Pupuk Kaltim
PT. Kaltim Parna Industri	Produksi Amoniak Cair	PT. Kaltim Jordan Abadi
PT. Kaltim Nitrate Indonesia	Produksi Amonium Nitrat	PT. Kaltim Amonium Nitrat
Pabrik Utilitas Boiler PKT	Produksi Steam	
<b>INDUSTRI SKALA MENENGAH DAN KECIL</b>		
PT. Samator Gas Indonesia	Produksi Gas Murni	
PT. Kaltim Adiguna Dermaga	Jasa Forwarding	
PT. Borneo Etam Samudra	Jasa Forwarding	
PT. Kaltim Satria Samudra	Jasa Forwarding	
PT. Kaltim Daya Mandiri	Produksi Listrik dan Utilitas	
<b>PERKANTORAN DAN ADMINISTRASI</b>		
PT. Daun Buah	Distribusi Pupuk dan Rental	
Bank Mandiri, BNI dan BRI	Jasa Perbankan Nasional	
PT. Jasindo	Jasa Asuransi	
PT. Pukati Niaga Sejahtera	General Supplier	



#### **2.2.4.1.2.2 Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan.**

Kalimantan Timur memiliki rencana menjadi pusat agroindustri dan energi terkemuka menuju masyarakat adil dan sejahtera. Hal tersebut terus diiringi dengan berbagai terobosan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam upaya pengembangan sektor ekonomi, salah satunya adalah pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan (KEK MBTK) di Kabupaten Kutai Timur. Penetapan KEK MBTK secara tegas telah disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2014 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan dimana KEK MBTK memiliki kedudukan yang penting di sektor pengembangan industri kelapa sawit dan sektor pelabuhan.

Pembangunan KEK MBTK merupakan wujud dari upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk mengubah sektor perekonomian daerah dari yang sebelumnya lebih banyak bergantung pada sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui (*unrenewable*) menuju kepada sumber daya alam yang dapat diperbaharui (*renewable*) dengan mengembangkan potensi industri perkebunan dan pertanian, khususnya di sektor perkebunan kelapa sawit.

Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan direncanakan sebagai kawasan industri berbasis *oleochemical* dengan skala internasional yang akan difokuskan untuk mengolah hasil perkebunan kelapa sawit berupa *Crude Palm Oil* (CPO) beserta dengan industri olahan dan turunannya, seperti minyak goreng, biodiesel, kosmetik, dan lain-lain. KEK MBTK diarahkan untuk menampung kegiatan industri, ekspor dan impor serta kegiatan lainnya yang memiliki nilai ekonomi tinggi.

Hingga saat ini telah dibangun infrastruktur dalam dan luar kawasan seperti :

- Infrastruktur dalam kawasan :
  - Gedung perkantoran. Dapat digunakan untuk perkantoran dan administrasi.



**PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KRCIL DAN MENENGAH  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019-2023**

---

- Workshop.
- Jalan dalam kawasan. Jalan yang telah di rigid sepanjang 3,5 km, 8,19 km belum tuntas sampai kepada jalan yang optimal untuk dilewati.
- Fasilitas air bersih. Telah terbangun water treatment plant (wtp) dengan kapasitas 1 x 200 L/d.
- Listrik. Pasokan Listrik sementara 2 MW, berasal dari PLTD Sangkulirang disalurkan melalui SUTM 20 kV.
- Telekomunikasi. Telkom dan Telkomsel siap untuk mendukung dan memperkuat jaringan internet dan telekomunikasi di kawasan.
- Infrastruktur luar kawasan :
  - Jalan akses masuk kawasan. Jalan akses masuk kawasan sepanjang 17,5 km.
  - Pelabuhan. Sampai dengan akhir tahun 2019 telah diselesaikan pelabuhan sampai dengan 4 segmen dari total rencana 6 segmen dengan dimensi (50 m x 17 m)/segmen. Causeway sementara atau jalan penghubung sisi darat ke pelabuhan sepanjang 1,02 km dan trestle sepanjang 750 m juga telah terbangun yang merupakan satu kesatuan infrastruktur pelabuhan.
  - Jaringan air bersih. Telah terbangun jaringan transmisi air baku sekerat 250 L/d.
  - Helipad. Telah terbangun tempat yang disediakan untuk mendaratnya helikopter sebagai sarana transportasi penumpang.
  - Listrik. Pasokan Listrik sementara 2 MW, berasal dari PLTD Sangkulirang disalurkan melalui SUTM 20 kV.

Tujuan dan sasaran pengembangan KEK MBTK ini yaitu Terwujudnya Kawasan Industri Hilir Kelapa Sawit yang didukung Pelabuhan Internasional. Dari tujuan pengembangan kawasan tersebut, sasaran yang dapat menjadi arahan pengembangan KEK MBTK adalah sebagai berikut :

1. Terciptanya kawasan industri yang berwawasan lingkungan dan berdaya saing tinggi.
2. Mengembangkan kawasan dengan menyediakan fasilitas pendukung dan dapat memberikan peningkatan perekonomian pada wilayah sekitar.



3. Mengutamakan pengembangan kebutuhan sarana dan prasarana dasar serta menghilangkan kesan kumuh kawasan untuk menciptakan rasa nyaman.

#### **2.2.4.1.2.3 Kawasan Industri Kariangau**

Kawasan Industri Kariangau (KIK) berlokasi di Kelurahan Kariangau, Kecamatan Balikpapan Barat dengan menempati area seluas 3.565 ha yang selanjutnya akan dikembangkan hingga ke Pulau Balang. KIK memiliki letak strategis karena berada di teluk Balikpapan yang berhadapan langsung dengan selat Makassar yang merupakan bagian dari Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI II), posisi strategis tersebut memudahkan dalam mobilisasi barang untuk tujuan domestik maupun mancanegara (ekspor-impor). Hal ini ditunjang dengan kedalaman laut Teluk Balikpapan yang dapat dilalui dengan kapal berkapasitas 50.000 ton. Kawasan Industri Kariangau dibangun untuk mengakomodir pembangunan industri kimia, batubara, pengolahan kayu, pengeboran minyak, pupuk dan aneka industri lainnya. Hingga saat ini tercatat ada sekitar 20 pabrik yang sudah mengantongi izin membuat pabrik, dimana 13 diantaranya sudah beroperasi menyerap sekitar 4.000 tenaga kerja. Perusahaan yang sudah beroperasi antara lain bergerak dalam pengolahan CPO (*Crude Palm Oil*), pertambangan, batubara, dan migas, industri perkapalan, industri logam, tekstil perkayuan, serta pergudangan. Dalam menjalankan fungsinya, Kawasan Industri Kariangau didukung oleh infrastruktur terminal peti kemas, pembangkit tenaga listrik, jalan akses, jembatan dan jalan tol.

Pembangunan terminal peti kemas internasional Kariangau untuk aktifitas bongkar muat peti kemas, *general cargo*, termasuk batubara, dengan nilai investasi sebesar Rp 713 Milyar menempati luas area sekitar 57,5 ha. Kapasitas daya tampung terminal mampu menampung 17.000 teus (*twenty-foot equivalent units*) peti kemas atau sekitar 17,5 juta ton per tahun. Saat ini pembangunan *trestle* sepanjang 282 m dengan lebar 10,5 m ini sudah selesai, sementara pembangunan dermaga sepanjang 1,5 km sedang dalam pengerjaan. Terminal Peti Kemas Kariangau memiliki kedalaman 14 m pada saat surut sehingga mampu menampung kapal besar



hingga bobot 22.000 DWT (*Dead Weight Ton*). Pembangunan Pelabuhan dimulai dari Tahun 2008 dan telah beroperasi pada Tahun 2012.

Selain pelabuhan, KIK juga didukung dengan jalan tol Samarinda – Balikpapan sepanjang 99 km dengan investasi 6,3 Trilyun yang saat ini telah operasional pada ruas samboja-samarinda. Jalan Tol akan di interkoneksi dengan jalan Km. 13 – Kariangau menuju ke Terminal Peti Kemas Kariangau. Keberadaan jalan tol memberikan nilai strategis dengan interkoneksi terhadap Jalan Lintas Kalimantan, Bandara Sepinggán, Kawasan Industri Kariangau dan Terminal Peti Kemas serta Kota Samarinda.

Dalam mendukung keperluan energi, pada kawasan industri kariangau juga telah dilakukan pembangunan *Power Plant* Tenaga Uap dengan daya 2 x 100 MW. Pembangunan ini merupakan kerjasama Pemerintah Provinsi dengan PT. PLN dengan nilai investasi 2,3 triliun. Pemerintah Provinsi menyediakan lahan seluas 45 ha untuk pembangunan *power plant* ini. Selain itu kebutuhan energi juga akan disuplai oleh PLTU 2 x 25 MW yang dibangun oleh PT. Gunung Bayan.

#### **2.2.4.1.2.4 Kawasan Peruntukan Industri Buluminung**

Kabupaten Penajam Paser Utara merupakan salah satu kabupaten di wilayah administrasi Provinsi Kalimantan Timur, yang berada di bagian pesisir sebelah timur Pulau Kalimantan dan berseberangan dengan kota Balikpapan. Pencapaian ke ibukota Kabupaten Penajam Paser Utara dari Kota Balikpapan membutuhkan waktu sekitar 15 - 30 menit dengan menyebarkan Teluk Balikpapan menggunakan *speedboat* atau perahu klotok. Posisi strategis yang berdekatan dengan kota Balikpapan sebagai kota terbesar di Provinsi Kalimantan Timur, sekaligus sebagai kota transit dan pusat perdagangan dan jasa yang mampu memberikan keuntungan cukup signifikan bagi Kabupaten Penajam Paser Utara. Dengan beroperasinya Kawasan Industri Kariangau di kota Balikpapan, secara langsung dan tidak langsung membuka peluang bagi Kabupaten Penajam Paser Utara untuk menjadi pintu transit distribusi sumberdaya alam dan



**PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KRCIL DAN MENENGAH  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019-2023**

---

hasil olahannya dari kawasan sebelah barat dan selatan menuju ke kota Balikpapan, dan untuk mencapainya harus melalui wilayah administrasi Kabupaten Penajam Paser Utara.

Potensi dan peluang strategis ini ditindak-lanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dengan mengupayakan pengembangan Kawasan Industri seluas 5.424,37 hektar, yang didukung oleh keberadaan hasil sumberdaya alam yang melimpah seperti kelapa sawit, hasil hutan, pertanian dan perikanan, serta batubara, minyak, dan gas bumi. Menurut Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2011 - 2031, kawasan industri ini akan dikembangkan di 5 (lima) wilayah administratif kelurahan, yakni kelurahan Buluminung, Gersik, Jenebora, Sepan, dan Pantai Lango, Kecamatan Penajam - Kabupaten Penajam Paser Utara - Provinsi Kalimantan Timur.

Selain yang telah disebutkan di atas, existing kawasan-kawasan industri, ada pula direncanakan dibeberapa lokasi kabupaten/kota lainnya, seperti :

**Tabel 25. Rencana Kawasan Industri Provinsi Kalimantan Timur**

<b>Nama Kawasan Industri</b>	<b>Lokasi</b>	<b>Rencana Komoditi yang diolah</b>
Kawasan Industri Bontang Lestari	Kec. Bontang Utara Kota Bontang	Sawit, Rumput Laut, Ikan Budidaya, Ikan Tangkap
Kawasan Industri Pendingin	Kec. Sanga sanga Kab. Kukar	Sawit, Kakao, Kopi, Karet, Singkong
Kawasan Industri Mantaritip	Kec. Sambaliung Kab. Berau	
Kawasan Industri Perikanan/Kelautan	Kabupaten Paser	Perikanan Kelautan





#### 2.2.4.1.1 Sentra Industri Kecil Menengah

Sentra IKM adalah sekelompok industri kecil dan menengah yang berada pada suatu lokasi yang menghasilkan produk sejenis, menggunakan bahan baku sejenis, dan/atau mengerjakan proses produksi yang sama, sebagai salah satu upaya untuk mengembangkan potensi unggulan daerah, dengan memberikan nilai tambah pada sumber daya lokal melalui teknologi industri.

Pengelompokkan industri kecil dan industri menengah dalam suatu Sentra dapat lebih memudahkan proses pembinaan, pembangunan infrastruktur pendukung industri, ketersediaan dan kepastian lahan serta muncul aglomerasi dan aliansi strategis diantara sesama industri. Karena itu pembangunan Sentra Industri bermuara pada peningkatan daya saing kolektif pada Sentra tersebut.

Sentra IKM terbagi menjadi dua, yaitu sentra buatan dan sentra alami, disebut alami karena merupakan Sentra IKM yang tumbuh dan berkembang secara alamiah berdasarkan potensi sumber daya alam dan kemampuan sumberdaya manusia serta peluang pasar yang ada pada masing masing daerah, berikut kondisi *existing* dan *perencanaan* Sentra Industri Kecil Menengah di Kalimantan Timur :

**Tabel 26. Sentra Alami dan Sentra Buatan Provinsi Kalimantan Timur**

NAMA SENTRA	LOKASI
<b>Kota Samarinda</b>	
Sentra IKM Kain Tenun	Kec. Samarinda Seberang
Sentra IKM Amplang	Kec. Sungai Kunjang
Sentra IKM Tahu Tempe	Kec. Sungai Kunjang
Sentra IKM Kerajinan Manik-manik	Kec. Samarinda Utara
Sentra IKM Galangan Kapal	Kec. Samarinda
<b>Kota Balikpapan</b>	
Sentra Industri Kecil Somber	Kel. Muara Rapak
Sentra Industri Teritip	Kel. Teritip
<b>Kota Bontang</b>	
Sentra Rumput Laut Kering	Bontang Kuala
Sentra Manisan Rumput Laut	Bontang Kuala
Sentra Ikan Kering	Bontang Kuala
Sentra Terasi	Bontang Kuala
Sentra Amplang	Lok Tuan
<b>Kabupaten Kutai Kartanegara</b>	
Sentra IKM Pengolahan Rumput Laut	Kec. Muara Badak
Sentra IKM Pengolahan Pakan Ternak/Ikan	Kec. Loa Kulu
Sentra IKM Kerupuk Ikan Sungai	Kec. Kota Bangun
Legowo Group	Kec. Loa Janan



**PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KRCIL DAN MENENGAH  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019-2023**

NAMA SENTRA	LOKASI
Usaha Bersama Samboja Barokah Jaya Cahaya Loa Pari	Kec. Loa Janan Kec. Samboja Kec. Tenggarong Seberang
<b>Kabupaten Kutai Barat</b>	
Sentra IKM Tenun Doyo Sentra IKM Sulam Tumpar Sentra IKM Anyaman Rotan Sentra IKM Ukiran Sentra IKM Makanan Minuman (Kuliner) Sentra Kerajinan Rotan, Anyaman Bambu Sentra Kerajinan Kain Tenun Ikat Industri Kerajinan YTDL (Tumpar) Industri Kerajinan YTDL (Kriookng) Sentra Industri Gula Merah	Kec. Barong Tongkok Kec. Barong Tongkok Kec. Barong Tongkok Kec. Barong Tongkok Kec. Barong Tongkok Bentian, Pepes Eheng Tanjung Isuy, Perigig Tebisaq Melapeh Mook Manar Bulaatn
<b>Kabupaten Kutai Timur</b>	
Sentra Penggergajian Kayu Sepaso Sentra Makanan Dan Masakan Olahan Sentra Tahu Tempe Sentra Gula Merah Sentra Furnitur Dari Kayu Mapantun Sentra Batik Sentra Kerajinan Ytdl Sentra Produk Roti Dan Kue Sentra Furnitur Dari Rotan Dan Atau Bambu Sentra Kerajinan Dari Kayu Bukan Mebeller Sentra Pakaian Jadi (Konveksi) Sentra Barang Bangunan Dari Kayu Sentra Barang Tanah Liat/Keramik Dan Porselen Lainnya Bukan Bahan Bangunan Sentra Bumbu Masak Dan Penyedap Masakan Sentra Minyak Goreng Kelapa Sentra Barang Prafabrikasi Dari Kayu Sentra Pengolahan Kopi Dan Teh Sentra Pengasapan Ikan Sentra Pengolahan Sari Buah Dan Sayuran Sentra Minyak Goreng Kelapa Sawit Sentra Tepung Beras Dan Tepung Jagung Sentra Produk Roti Dan Kue Sentra Panel Kayu Lainnya	Bengalon Sangatta Selatan Sangatta Selatan Bengalon Telen Sangatta Utara Sangatta Utara Sangatta Utara Sangatta Utara Sangatta Utara Muara Bengkal Muara Bengkal Teluk Pandan  Sangatta Selatan  Sangkulirang Sanggata Utara Batu Ampar Muara Ancalong Sangkulirang Sangkulirang Long Masangat Rantau Pulung Muara Wahau
<b>Kabupaten Berau</b>	
Sentra IKM Tahu Tempe Sentra IKM Oleh2 dan Souvenir Sentra IKM Meubel dan Moulding Sentra Terasi  Sentra Ikan Kering Sentra Pembuatan Kapal Tradisional	Gunung Tabur Teluk Bayur Sambaliung Kec. Batu Putih, Kec. Biatan, Kec. Tabalar, Kec. Pulau Derawan Kec. Talisayan, Kec. Pulau Derawan Kec. Biduk-biduk
<b>Kabupaten Penajam Paser Utara</b>	
Sentra IKM Kerajinan Olahan Kayu Sentra IKM Pengolahan Hasil Perikanan Sentra IKM Gula Merah Aren Sentra IKM Kelapa Terpadu Sentra IKM Kapal Rakyat Sentra IKM Amplang Ikan Bandeng Sentra Batik	Kec. Sepaku/Waru Kec. Babulu Laut Kec. Waru Kec. Penajam Kec. Penajam Kec. Babulu Kec. Waru
<b>Kabupaten Paser</b>	
Sentra IKM Kapal Kayu Sentra IKM Kapal Kayu Sentra IKM Pengolahan Ikan dan Hasil Laut	Desa Teluk Waru Desa Pasir Mayang Desa Lori



**PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KRCIL DAN MENENGAH  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019-2023**

NAMA SENTRA	LOKASI
Sentra IKM Pengolahan Rumput Laut	Desa Pondong
Sentra IKM Pengolahan Hasil Kelapa	Desa Maruat
Sentra IKM Kerajinan Anyaman Rotan	Desa Laburan
Sentra IKM Kerajinan Rotan	Desa Brewe
Sentra IKM Tenun Ikat	Desa Olung
Sentra IKM Kerajinan Purun	Desa Tepian Batang
Sentra IKM Batik	Kel. Tanah Grogot
Sentra IKM Gula Merah dan Gula	Desa Bekoso, Desa Kayungo
Semut Aren	
Sentra IKM Pande Besi	Desa Damit

#### **2.2.4.1.2 Dewan Kerajinan Nasional Daerah Provinsi Kalimantan Timur**

Kemajuan suatu bangsa ditentukan oleh kreatifitas bangsa itu dalam mengolah sumber daya yang dimiliki dan memanfaatkan kesempatan yang tersedia. Kreatifitas yang dimaksud bersumber dari akar budaya bangsa. Semakin besar keanekaragaman akar budaya suatu bangsa akan semakin besar potensi kreatifitas yang terdapat pada bangsa itu dan semakin besar pula potensinya untuk maju dan berkembang dalam persaingan global.

Indonesia memiliki aneka ragam suku bangsa yang masing-masing memiliki adat istiadat, seni budaya dan Bahasa yang khas, yang merupakan sumber untuk tumbuh dan berkembangnya kreatifitas. Salah satu cabang seni budaya yang tumbuh dan berkembang secara kreatif dan dinamis adalah seni kriya atau seni kerajinan. Produk seni kerajinan ini dalam perjalanan juga telah berperan secara nyata dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian rakyat yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat secara luas.

Dalam upaya pelestarian nilai budaya bangsa yang tercermin dalam produk kerajinan diperlukan adanya wadah partisipasi masyarakat bertaraf nasional yang berfungsi membantu dan sebagai mitra pemerintah dalam membina dan mengembangkan kerajinan. Atas dasar pemikiran tersebut dibentuklah Dewan Kerajinan Nasional berdasarkan Surat Keputusan Bersama 2 Menteri, yaitu Menteri Perindustrian dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nomor: 85/M/SK/3/1980 dan Nomor: 072b/P/1980, tanggal 3 Maret 1980 di Jakarta. Untuk mendukung kelancaran kegiatannya di tingkat



**PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KRCIL DAN MENENGAH  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019-2023**

---

daerah, dengan dipayungi Surat menteri Dalam Negeri Nomor: 537/5038/Sospol, tanggal 15 Desember 1981, dibentuklah organisasi DEKRANAS tingkat daerah yang dikenal dengan DEKRANASDA.

Dewan Kerajinan Nasional Daerah memiliki tujuan yaitu :

- Menggali, melestarikan dan mengembangkan warisan budaya bangsa;
- Meningkatkan kualitas produk kerajinan dan perajin dalam rangka memperkuat jati diri bangsa;
- Memperhatikan dan memperjuangkan kepentingan perajin dengan mendorong semangat kewirausahaan;
- Mempromosikan produk hasil kerajinan dalam rangka perluasan pasar di dalam dan luar negeri.

Dewan Kerajinan Nasional Daerah Provinsi Kalimantan Timur (DEKRANASDA) merupakan kelompok pencipta, pencinta dan peminat seni kerajinan dalam masyarakat. Dekranasda Provinsi Kaltim mempunyai keinginan untuk mengembangkan seni produktifitas dan pemasaran kerajinan Kalimantan Timur khususnya dan Indonesia umumnya. Keinginan ini sesuai dengan kebijakan pemerintah untuk mendorong kreatifitas dan kreasi para pengrajin untuk berekspresi dalam upaya menggali, memanfaatkan sumber daya alam, seni dan budaya untuk pelestarian nilai-nilai seni dan budaya serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dekranasda melaksanakan kegiatan pembinaan bagi penumbuhan dan pengembangan produk kerajinan, antara lain: pelatihan dan pendidikan sumber daya potensi, fasilitasi promosi, kewirausahaan dalam rangka peningkatan nilai ekonomi, serta kerjasama kemitraan dengan Kementerian dan Organisasi Perangkat Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang terkait.



**PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KRCIL DAN MENENGAH  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019-2023**

**Tabel. 27 PENGRAJIN PENERIMA BANTUAN DALAM RANGKA HUT DEKRANAS KE -41  
DI KALIMANTAN TIMUR  
TAHUN 2020**

NO	NAMA USAHA	JENIS PRODUK	KAB/KOTA	KETERANGAN
1	ANYAMAN ROTAN	ANYAMAN	KAB. PENAJAM PASER UTARA	PENGRAJIN HAMPIR PUNAH
2	TENUN IKAT	TENUN	KAB. PENAJAM PASER UTARA	PENGRAJIN HAMPIR PUNAH
3	PENGRAJIN TAS ROTAN	KERAJINAN ROTAN	KAB. BERAU	PENGRAJIN HAMPIR PUNAH
4	PENGRAJIN LIMBAH KAYU	LIMBAH KAYU	KAB. BERAU	PENGRAJIN RAMAH LINGKUNGAN
5	RUMAH KREATIF BALIKPAPAN (RKB)	BATIK MOTIF KHAS KOTA BALIKPAPAN DAN TAS DAUR ULANG DARI LIMBAH PLASTIK	KOTA BALIKPAPAN	PENGRAJIN RAMAH LINGKUNGAN
6	SAMUDRA ROTAN	KERAJINAN FURNITURE DARI ROTAN	KOTA BALIKPAPAN	PENGRAJIN HAMPIR PUNAH
7	BAWE PASER	BATIK ECOPRINT	KAB. PASER	PENGRAJIN RAMAH LINGKUNGAN
8	ANYAMAN ROTAN	ANYAMAN ROTAN	KAB. PASER	PENGRAJIN HAMPIR PUNAH
9	ANYAMAN ROTAN	ANYAMAN ROTAN	KAB. PASER	PENGRAJIN HAMPIR PUNAH
10	TENUN SAMARINDA	TENUN SAMARINDA	KOTA SAMARINDA	PENGRAJIN HAMPIR PUNAH

Sumber: DEKRANASDA Provinsi Kaltim

**Rekapitulasi Data IKM Sandang, Aneka dan Kerajinan  
Di Kalimantan Timur Tahun 2020**

No	Kab/Kota	Jumlah IKM		Jumlah Tenaga Kerja	Kapasitas Produksi
		Sandang	Aneka & Kerajinan		
1	Kota Samarinda	118	374	869	61.249
2	Kota Balikpapan	189	68	411	610.060
3	Kota Bontang	154	173	581	13.248.176
4	Kab. Kutai Barat	60	780	1.309	359.706
5	Kab. Kutai Timur	166	62	431	-
6	Kab. Kutai Kartanegara	371	230	1.077	40.039
7	Kab. Berau	36	55	218	94.590
8	Kab. Penajam Paser Utara	-	120	338	405.076
9	Kab. Paser	409	297	84	7.334.261
10	Kab. Mahakam Ulu	5	10	112	-



#### 2.2.4.1.3 Perizinan Sektor Industri

Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau Komitmen.

Dalam Peraturan Menteri Perindustrian diatur tentang Penerbitan Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan dalam Kerangka Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Pelayanan perizinan berusaha di sektor perindustrian dilaksanakan dengan menggunakan OSS dan SIINas secara terintegrasi. Perizinan berusaha di sektor perindustrian meliputi Izin Usaha Industri (IUI) dan izin Perluasan.

Setiap Perusahaan Industri wajib memiliki IUI yang diberikan berdasarkan klasifikasi usaha industri, terdiri atas IUI Kecil untuk industri kecil, IUI menengah untuk industri menengah dan IUI besar untuk Industri besar. Klasifikasi berdasarkan besaran jumlah tenaga kerja dan/atau nilai investasi sebagaimana ditetapkan oleh Menteri, nilai investasi tersebut meliputi nilai tanah dan/atau bangunan, mesin peralatan, sarana dan prasarana yang digunakan untuk melakukan kegiatan industri.

Besaran Jumlah Tenaga Kerja dan Nilai Investasi Untuk Klasifikasi Usaha Industri  
Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian RI  
Nomor 64/M-IND/PER/7/2016

Tenaga Kerja \ Nilai Investasi	< Rp. 1.000.000.000	Rp. 1.000.000.000 – Rp.15.000.000.000	>Rp. 15.000.000.000
	1-19 orang	Industri Kecil (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha)	Industri Menengah
≥ 20 orang	Industri Menengah	Industri Menengah	Industri Besar



**PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KRCIL DAN MENENGAH  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019-2023**

Perusahaan Industri wajib berlokasi di Kawasan Industri. IUI diberikan untuk setiap lokasi kegiatan Industri, dan/atau jenis Industri dalam kelompok KBLI 5 (lima) digit. Perusahaan Industri yang melakukan perubahan jumlah tenaga kerja, nilai investasi, kapasitas produksi terpasang, penambahan kelompok industri sesuai dengan KBLI 5 (lima) digit dan penambahan/pemindahan lokasi usaha. IUI juga berlaku sebagai izin tempat penyimpanan mesin/peralatan, bahan baku, dan/atau hasil produksi. Pelaku Usaha yang akan melaksanakan kegiatan Industri dapat memperoleh IUI melalui laman OSS.

IUI belum berlaku efektif sampai dengan dipenuhinya seluruh Komitmen. Komitmen memiliki izin Lokasi dan Komitmen memiliki Izin Lingkungan tidak diberlakukan bagi Industri yang tidak memerlukan prasarana meliputi Industri yang diklasifikasikan sebagai Industri Kecil dan Industri pembuatan perangkat lunak. IUI dinyatakan batal apabila Perusahaan Industri tidak dapat memenuhi seluruh Komitmen. Perusahaan industri yang tidak memenuhi seluruh Komitmen dilarang melakukan kegiatan usaha Industri.

Perusahaan Industri yang memiliki IUI yang telah berlaku efektif dapat melakukan Perluasan. Izin Perluasan dinyatakan berlaku efektif apabila Perusahaan Industri yang bersangkutan telah memenuhi seluruh Komitmen dan jika tidak memenuhi maka dinyatakan batal. Menteri, gubernur dan/atau bupati/walikota melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik di sektor perindustrian.

Jumlah Izin Usaha Industri  
Kewenangan Provinsi (Industri Besar) Berdasarkan Status Izin  
Tahun 2020

No	Kabupaten/Kota	Status Izin	
		Berlaku Efektif	Belum Berlaku Efektif
1	Kota Samarinda	1	17
2	Kota Balikpapan	7	38
3	Kota Bontang	16	40
4	Kab. Kutai Barat	2	4
5	Kab. Kutai Timur	2	7
6	Kab. Kutai Kartanegara	1	11
7	Kab. Berau	2	8
8	Kab. Penajam Paser Utara	-	1
9	Kab. Paser	-	-
10	Kab. Mahakam Ulu	-	-
	Jumlah	31	126



#### **2.2.4.1.4 Data dan Informasi Industri**

Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan / atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi termasuk jasa industri. Kegiatan usaha industri meliputi industri kecil, menengah dan besar yang ditetapkan berdasarkan jumlah tenaga kerja dan nilai investasi.

Industri Kecil Menengah (IKM) merupakan usaha industri yang banyak dikelola masyarakat yang sebagian besar proses produksinya masih dilakukan di rumah tinggal dan belum menggunakan teknologi modern (teknologi ramah lingkungan). IKM menjadi tulang punggung karena melibatkan masyarakat dan mampu memberi kontribusi terhadap perekonomian nasional yang dapat menjadi penghela perekonomian baik di level daerah maupun pusat. Industri besar adalah industri yang memiliki modal yang cukup besar, menggunakan teknologi modern / canggih, organisasi yang teratur, jumlah tenaga kerja yang cukup banyak dan memiliki keahlian / skill tertentu, serta pemasaran produk berskala regional, nasional dan / atau internasional.

Mengacu kepada Permendagri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan dijabarkan lebih rinci dengan Kepmendagri Nomor 050.3708 Tahun 2020 bahwa dalam upaya penyediaan informasi industri, setiap perusahaan industri wajib menyampaikan data / informasi industri dan laporan kegiatannya melalui SIINas (Sistem Informasi Industri Nasional)

Data yang benar dapat menjadi dasar pengaturan dalam melakukan perencanaan, pembinaan, pengendalian, pengawasan hingga pengambilan kebijakan yang tepat terhadap industri yang ada di daerah khususnya industri unggulan daerah sesuai dengan RPIP (rencana pembangunan industri provinsi) Kalimantan Timur Tahun 2019 – 2039 .



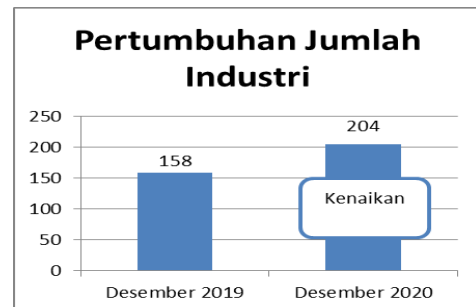
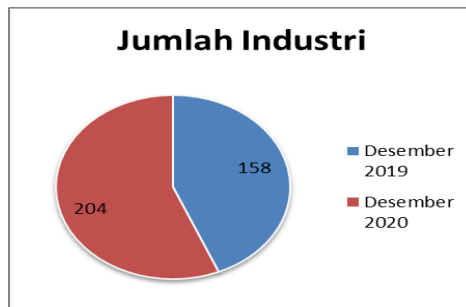


**PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KRCIL DAN MENENGAH  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019-2023**

TAHUN	TOTAL INDUSTRI			INDUSTRI BESAR			INDUSTRI KECIL MENENGAH		
	UNIT USAHA	TENAGA KERJA	INVESTASI (JUTA RP)	UNIT USAHA	TENAGA KERJA	INVESTASI (JUTA RP)	UNIT USAHA	TENAGA KERJA	INVESTASI (JUTA RP)
2016	9.321	47.426	14.443.843	54	23.679	8.364.041	9.267	23.747	6.079.602
2017	10.276	52.632	6.244.122	154	26.137	-	10.122	26.495	6.244.122
2018	7.380	52.363	561.986	188	34.223	-	7.133	18.140	561.986
2019	13.417	73.340	1.104.663	223	46.391	-	13.194	26.949	1.104.663
2020	17.382	89.759	1.366.449	254	53.514	-	17.128	36.245	1.366.449

Sumber : BPS Kaltim dan Kemenperin RI (Data diolah DP2KUKM Prov.Kaltim)

Berdasarkan data dan informasi yang terdapat dalam SIINas (Sistem Informasi Industri Nasional) bahwa untuk jumlah perusahaan industri yang terdaftar dan merupakan kewenangan provinsi untuk Tahun 2019 dan Tahun 2020 adalah sebagai berikut :



Periode	Jumlah Industri
Desember 2019	158
Desember 2020	204

Pertumbuhan	Jumlah Industri	Persentase Pertumbuhan Industri
	46	22,55%



### 2.2.5 Bidang Koperasi dan UKM

Koperasi dan UKM merupakan suatu lembaga dan usaha yang dilakukan oleh masyarakat difasilitasi oleh DISPERINDAGKOP dan UKM Provinsi Kalimantan Timur. Koperasi dan UKM diharapkan mampu membantu pemberdayaan perekonomian masyarakat terutama para pengusaha mikro kecil dan menengah. Pembangunan dan pembinaan Koperasi dan UKM telah menunjukkan dampak yang positif, meskipun belum optimal mengubah struktur perekonomian daerah. Jika diukur dengan jumlah koperasi, volume usaha dan modal sendiri perkembangan mengalami fluktuasi, dan khusus untuk anggota mengalami penurunan jumlah anggota koperasi dan hal ini dapat dilihat pada table dibawah ini.

**Tabel 25. Perkembangan Koperasi Tahun 2016 s.d 2020**

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Koperasi (Unit)	5.546	5.184	5.406	5.495	5.619
2	Jumlah Koperasi Aktif (Unit)	3.554	3.683	3.428	2.761	2.887
3	Jumlah Koperasi RAT (Unit)	792	665	661	739	334
4	Persentase Koperasi Aktif (%)	64,08	71,05	63,41	50,25	51,37
5	Persentase Koperasi yang Melaksanakan RAT (%)	21,5	18,06	19,17	26,77	11,91
6	Jumlah Anggota (orang)	299.068	121.455	113.139	130.116	74.435
7	Koperasi Primer (Unit)	5.526	5.163	5.385	5.474	5.581
8	Koperasi Skunder (Unit)	20	21	21	21	21
9	Modal Sendiri (Rp Milyar)	783.438	637.694	700.081	565.054	416
10	Modal Luar (Rp Milyar)	996.328	531.331	828.152	1.009.269	501.746
11	Volume Usaha (Rp Milyar)	2.186.346	1.042.484	1.309.258	998.772	816.914
12	Sisa Hasil Usaha (Rp Milyar)	153.682	78.493	126.175	29.986	74.730
13	Jumlah Manager (orang)	237	149	99	80	47
14	Jumlah Karyawan (orang)	6.641	2.590	1.143	1.265	663

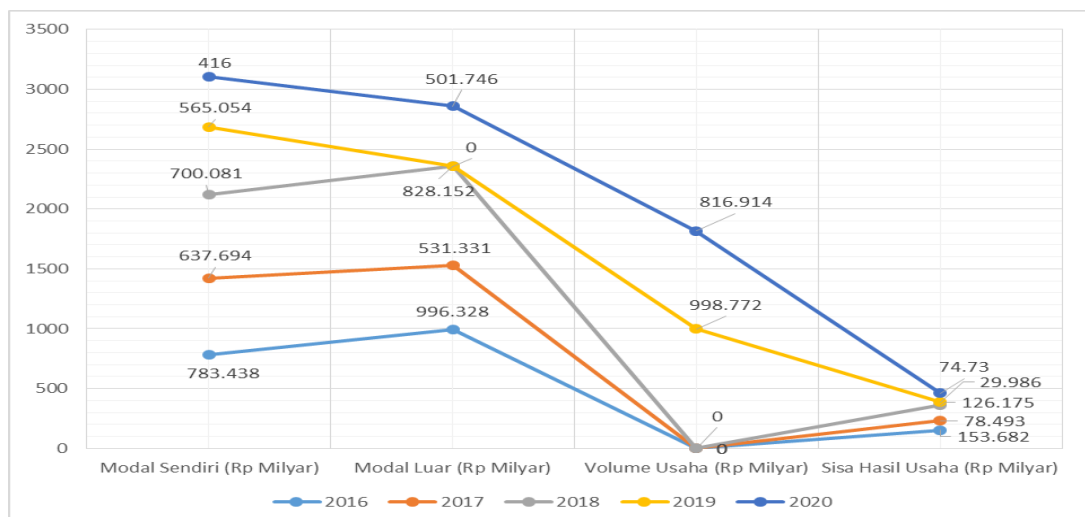
Sumber : Disperindagkop Prov Kaltim Tahun 2020

Pembangunan dan pembinaan Koperasi telah menunjukkan dampak yang positif, meskipun belum mampu mengubah struktur perekonomian daerah jika diukur dengan jumlah koperasi (koperasi aktif dan koperasi tidak aktif), jumlah anggota, Volume Usaha, Modal Sendiri dan Sisa Hasil Usaha dari tahun ke tahun mengalami fluktuatif dari beberapa indikator tersebut. Perkembangan yang terjadi dari 5 tahun terakhir (2016-2020), untuk di tahun 2016 sampai dengan 2017 data yang di gunakan berdasarkan data agregat dari masing-masing



**PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KRCIL DAN MENENGAH  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019-2023**

kab/kota. Sebanyak 5.546 unit koperasi pada tahun 2016 mengalami penurunan sejumlah 5.184 unit koperasi pada tahun 2017, di karenakan terjadinya pemekaran wilayah di Kalimantan Timur dan membentuk Provinsi baru yaitu Kalimantan Utara, dimana ada beberapa Kabupaten/Kota yang sebelumnya berada di Provinsi Kalimantan Timur masuk ke dalam Provinsi Kalimantan Utara. Hal itu menyebabkan Jumlah Koperasi dan juga mempengaruhi beberapa Indikator lainnya mengalami penurunan. Pada tahun 2018 sampai dengan saat ini sumber data koperasi menggunakan Online data System (ODS). Di tahun 2018 dan 2019 jumlah koperasi mengalami peningkatan 5.406 unit koperasi di tahun 2018 dan 5.495 unit koperasi ditahun 2019. Di tahun 2020 Jumlah Koperasi mengalami peningkatan kembali sejumlah 5.619 unit koperasi. Hal ini terjadi peningkatan jumlah koperasi di karenakan dari beberapa kabupaten/kota ada pembentukan/pertumbuhan koperasi baru.



Grafik 3. Perkembangan Kelembagaan dan Usaha Koperasi Tahun 2016 - 2020

Perkembangan usaha koperasi yang ditunjukkan dari aspek-aspek modal, volume usaha dan sisa hasil usaha (SHU) juga menunjukkan kinerja yang stagnasi atau tidak mengalami perubahan yang berarti (Gambar diatas). Jumlah modal koperasi mengalami perubahan fluktuasi bahkan mengalami penurunan partisipasi anggota modal untuk memupuk modal, dan menjadi indikasi peningkatan kemandirian koperasi. Peningkatan SHU yang lebih tinggi dibandingkan dengan volume usaha menunjukkan perbaikan nilai kemanfaatan ekonomi koperasi, selain kemanfaatan dari layanan dan produk yang disediakan koperasi bagi anggotanya.

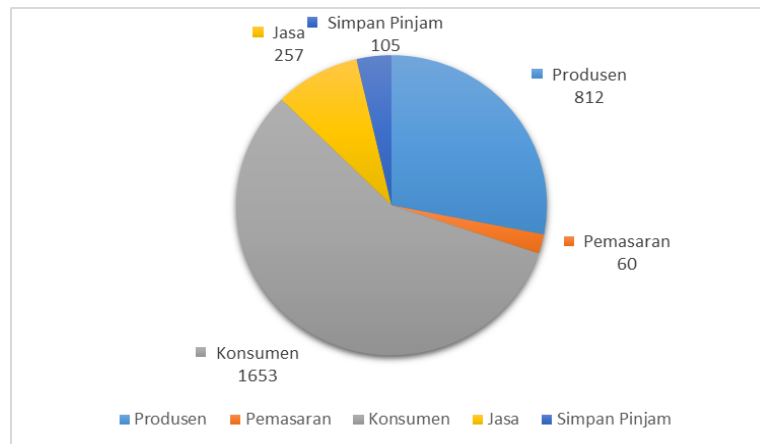


**PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KRCIL DAN MENENGAH  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019-2023**

**Tabel 26. Koperasi Aktif Berdasarkan Jenis Koperasi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020**

No	Jenis Koperasi	Jumlah Koperasi Aktif Berdasarkan Jenis Koperasi
1	Produsen	812
2	Pemasaran	60
3	Konsumen	1.653
4	Jasa	257
5	Simpan Pinjam	105
	<b>Total</b>	<b>2.887</b>

**Grafik 4. Jenis Koperasi**



Berdasarkan kegiatan ekonomi, proporsi koperasi di sektor primer dan sekunder masing-masing adalah sebesar dan persen. Sementara berdasarkan jenis, proporsi koperasi konsumen merupakan yang terbesar (Gambar diatas ). Khusus untuk Koperasi Simpan Pinjam (KSP), perkembangannya menunjukkan peran yang semakin penting dalam mendukung keuangan inklusif di Kaltim. Jumlah KSP sampai dengan Desember 2020 adalah sebanyak 105 unit atau 4 % . Di luar populasi KSP, terdapat 1.653 koperasi non KSP yang memiliki unit simpan pinjam (USP). Layanan pembiayaan yang disediakan oleh USP pada koperasi serba usaha bahkan berperan sentral dalam mendukung keberlanjutan usaha-usaha produktif skala mikro dan kecil terutama di sektor pertanian, perikanan dan industri kecil di perdesaan.



**Tabel 27. Koperasi Unggulan Kalimantan Timur**

No.	Kota/Kabupaten	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Kab. Berau	1	5	4	3	3
2	Kab. Kutai Barat	0	0	1	1	2
3	Kab. Kutai Kartanegara	2	2	3	6	9
4	Kab. Kutai Timur	0	2	11	10	9
5	Kab. Paser	2	2	2	2	2
6	Kab. Penajam Paser Utara	0	0	1	0	0
7	Kab. Mahakam Ulu	0	0	0	0	0
8	Kota Balikpapan	1	2	10	8	8
9	Kota Bontang	0	2	12	5	4
10	Kota Samarinda	1	4	10	6	6
<b>Jumlah</b>		<b>7</b>	<b>19</b>	<b>54</b>	<b>41</b>	<b>43</b>

Sumber : data berdasarkan ODS Kementerian Koperasi dan UKM RI

#### Kriteria Koperasi Unggulan

1. Koperasi telah bersertifikat NIK
2. Koperasi Mempunyai jumlah anggota  $\geq$  100 orang
3. Koperasi Beromset  $\geq$  Rp. 1,5 Miliar

Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia memberikan penghargaan bagi daerah yang berhasil menggerakkan 75% kabupaten/kota menjadi daerah penggerak koperasi. Provinsi Kalimantan Timur ditetapkan sebagai Provinsi Penggerak Koperasi oleh Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia pada tahun 2014. Penghargaan ini berlaku selama dua tahun dan akan dikaji ulang selanjutnya. Penghargaan ini menunjukkan seriusnya dukungan Kepala Daerah terhadap pengembangan Koperasi dan UMKM di Kalimantan Timur, koperasi dan umkm yang merupakan penggerak roda ekonomi kerakyatan.

Wujud lain dari sangat tingginya komitmen atas pengembangan ekonomi kerakyatan di sektor Koperasi dan UMKM adalah dengan berhasilnya dua koperasi unggulan di Kalimantan Timur masuk dalam 100 besar koperasi terbaik se-Indonesia pada tahun 2015. Koperasi tersebut adalah **Koperasi Sentra Medika** dan **Koperasi TKBM Samudera Sejahtera ( KOMURA )**.



**PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KRCIL DAN MENENGAH  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019-2023**

Perkembangan usaha mikro, kecil dan menengah di Kalimantan Timur pada tahun 2013 sampai dengan 2017 mengalami kemajuan yang cukup signifikan. Kemajuan ini merupakan dampak dari dukungan penuh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Perkembangan usaha mikro, kecil dan menengah di Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan data BPS sensus ekonomi tahun 2016 dengan jumlah 314.095 unit. Adapun data yang dimiliki oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan ODS (Online Data System) maupun yang dilakukan pembinaan berdasarkan data by name by address dan jenis usaha kab/kota sebagaimana tabel di atas, mengalami kemajuan yang cukup signifikan. Kemajuan ini merupakan dampak dari dukungan penuh DISPERINDAGKOP dalam menyejahterakan masyarakat Provinsi Kalimantan Timur melalui pengembangan usaha kerakyatan ini.

UMKM untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Provinsi Kalimantan Timur melalui pengembangan usaha kerakyatan ini. Berdasarkan pengamatan (pendataan dan inventarisasi) ternyata sebagian besar kegiatan usaha di Kalimantan Timur tergolong ke dalam kelompok mikro dan menengah dan sisanya usaha besar. Jenis usaha UKM dapat dikelompokkan berdasarkan sektor lapangan usaha.

**Tabel 28. Usaha Kecil Menengah Berdasarkan Kabupaten Kota**

NO	KABUPATEN/KOTA	UKM					TOTAL
		KULINER	INDUSTRI PENGOLAHAN	KERAJINAN	DAGANG	JASA	
1	SAMARINDA	34,966	111	104	99,167	24,276	158,624
2	BALIKPAPAN	39,861	1,999	6	60,995	2,199	105,060
3	BONTANG	17,644	3,128	16	6,187	101	27,076
4	KUTAI KARTANEGARA	253	721	21	245	293	1,533
5	BERAU	308	955	49	375	119	1,806
6	PASER	248	2,391	25	439	562	3,665
7	KUTAI TIMUR	211	1,560	18	994	778	3,561
8	PPU	54	1,045	-	129	24	1,252
9	KUTAI BARAT	329	1,987	1,045	505	302	4,168
10	MAHULU	122	24	289	106	57	598
	<b>JUMLAH</b>	<b>93,996</b>	<b>13,921</b>	<b>1,573</b>	<b>169,142</b>	<b>28,711</b>	<b>307,343</b>

Kelompok UKM berdasarkan jasa ternyata mendominasi kegiatan UKM di Kalimantan Timur dengan berjumlah 12.893 UKM, diikuti oleh sektor dagang dan kuliner. Sedangkan



**PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KRCIL DAN MENENGAH  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019-2023**

---

sektor kerajinan pengolahan masih relatif sedikit. Bahkan UKM yang bergerak dalam sektor industri pengolahan menempati kelompok usaha yang paling sedikit, yaitu berjumlah 802 UKM.

Sebagai dukungan serta bentuk perlindungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terhadap pelaku usaha koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah dari ketatnya persaingan usaha khususnya pelaku usaha pemodal besar, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah menerbitkan produk-produk hukum yang bersifat protektif diantaranya :

- Telah ditetapkan Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pemberdayaan Koperasi dan UKM yang didalamnya mengatur tentang upaya Pemerintah dalam mensinergikan potensi dan keunggulan lokal dalam mendukung perkembangan koperasi dan UKM dengan melibatkan peran aktif pemerintah, swasta dan masyarakat. Perkembangan investasi di Kalimantan Timur yang menunjukkan peningkatan diharapkan dapat mendongkrak perkembangan sektor koperasi dan UKM melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).
- Upaya mendudukan badan hukum koperasi setara dengan badan usaha ekonomi lainnya.
- Untuk memperjelas upaya-upaya pembinaan oleh stakeholder
- Upaya PROTEKTIF terhadap koperasi dan UKM dalam iklim persaingan usaha yang ketat dan kompetitif dengan pelaku-pelaku usaha pemodal besar seperti perusahaan swasta skala besar yang bergerak di sektor pertambangan, perkebunan, jasa, dagang serta pasar modern.
- Untuk kejelasan perlindungan terhadap Koperasi dan UKM dan mengatur tentang kewajiban dan kewenangan stakeholder yang membidangi Pembinaan Koperasi dan UKM.

**Tabel 29. UKM Yang Bermitra Dengan Klinik Bisnis Pada Tahun 2017**

NO	MITRA	JUMLAH UKM
1	LOTTE MART :	32
3	UKM YANG BERMITRA DENGAN HOTEL, TOKO,DLL	78
4	TOKO OLEH-OLEH DI KLINIK BISNIS	38
5	UKM YANG DIFASILITASI PEMASARAN OLEH PLUT	20
6	UKM YANG DIFASILITASI PAMERAN	56
7	UKM YANG DIMITRAKAN DENGAN KLINIK BISNIS	51
	<b>Total</b>	275

Sumber : Disperindagkop Prov Kaltim



**PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KRCIL DAN MENENGAH  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019-2023**

Pembinaan KUKM merupakan suatu proses yang berkesinambungan, hasil dari pembinaan tidak dapat di lihat hasilnya dalam waktu singkat. Pembinaan KUKM yang dilakukan oleh pemerintah selama ini masih bersifat “Hit and Run” , dimana pemerintah memberikan pembinaan dalam bentuk pelatihan, sosialisasi dan penyuluhan. KUKM d untuk berpikir sendiri melakukan inovasi dan kreatif dan untuk kedepan selaiin dilakukan pelatihan diikuti dengan pendampingan bagi pelaku usaha yang telah mendapat pembinaan.

**Tabel 30. Jumlah Wirausaha Baru Yang Dilatih 2014 s.d 2018**

NO	PELATIHAN	TAHUN				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Pelatihan Wira Usaha Baru	1250	800	800	1152	459
	<b>TOTAL</b>	<b>1250</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>1152</b>	<b>459</b>

Sumber : Disperindagkop Prov Kaltim tahun 2018

**Tabel 31. Data UKM Binaan Dari Instansi Lembaga Yang Berada Di Provinsi Kalimantan Timur**

NO	KABUPATEN/KOTA	TAHUN	
		2017	2018
1	DISPERINDAGKOP	4002	5100
2	BANK INDONESIA	66	66
3	BANK KALTIM	599	599
4	PT .JAMKRIDA	1313	1313
5	PT.TELKOM	529	529
6	DINAS KEPENDUDUKAN	356	356
7	DINAS PETERNAKAN	13	13
8	DINAS TANAMAN PANGAN	43	43
9	DINAS SOSIAL	280	280
10	DINAS PERKEBUNAN	49	49
12	PUPUK KALTIM	1652	1652
13	INKUBASI		417
14	KEMITRAAN		342
	<b>JUMLAH</b>	<b>8902</b>	<b>10759</b>

Sumber : Disperindagkop Prov Kaltim tahun 2018





**PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KRCIL DAN MENENGAH  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019-2023**

**2.2.6 Pelayanan Terpadu Daerah (UPTD) Balai Pengujian Sertifikasi mutu Barang (BPSMB)**

Sebagai tugas membantu Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM dalam kegiatan teknis, UPTD BPSMB telah melaksanakan Pengujian dan Kalibrasi, dan berhasil melakukan pendampingan penyusunan dokumen dan sertifikasi sistem manajemen mutu SNI ISO/IEC 9001: 2008, Pendampingan penyusunan dokumen sistem manajemen mutu SNI ISO/IEC 9001: 2015, serta Pendampingan penyusunan dokumen sistem manajemen mutu *Good Manufacturing Practices (GMP)*.

**Tabel 32. Jumlah Sertifikat Pengujian dan Kalibrasi UPTD BPSMB**

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Contoh yang di uji	11	21	49	24	43
2	Jumlah alat yang di kalibrasi	1481	2190	1757	2232	2072
	Jumlah	1492	2211	1806	2256	2115

**Tabel 33. Pendapatan Asli Daerah UPTD BPSMB**

No	Kegiatan	Realisasi				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Kalibrasi	285.945.000,-	370.216.000,-	517.881.800,-	721.561.600,-	680.474.800,-
2	Pengujian					
3	Pelatihan					
4	Pemakaian Kekayaan Daerah					
5	Jasa Usaha					

**Tabel 34. Jumlah UKM yang Didampingi UPTD BPSMB selama 2016 s.d 2020**

NO.	JENIS PRODUK	NAMA UKM/IKM	KAB/KOTA	KETERANGAN
1.	Roti Durian	Gerai Panglima	Samarinda	SNI ISO/IEC 9001: 2008
2.	Amplang	Kampung Amplang	Samarinda	SNI ISO/IEC 9001: 2008
3.	Amplang	Kampoeng Timoer CV. Azra Sentosa Jaya	Balikpapan	SNI ISO/IEC 9001: 2008
4.	Amplang	BDS Snack	Balikpapan	SNI ISO/IEC 9001: 2008
5.	Tandon/Tangki Air	UD. Bintang Mas Jaya	Kutai Kartanegara	SNI ISO/IEC 9001: 2015
6.	Amplang	Karya Mandiri	Kutai Timur	<i>Good Manufacturing Practices (GMP)</i>



**PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KRCIL DAN MENENGAH  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019-2023**

7.	Amplang	Usaha Bersama	Kutai Timur	<i>Good Manufacturing Practices (GMP)</i>
8.	Amplang	Surya Gemilang	Kutai Timur	<i>Good Manufacturing Practices (GMP)</i>
9.	Amplang	Sumber Rejeki	Kutai Timur	<i>Good Manufacturing Practices (GMP)</i>
10.	Amplang	Wahyu	Kutai Timur	<i>Good Manufacturing Practices (GMP)</i>
11.	Amplang	Amplang Bengalon	Kutai Timur	<i>Good Manufacturing Practices (GMP)</i>
12.	Amplang	Karya Bahari	Samarinda	<i>Good Manufacturing Practices (GMP)</i>
13.	Amplang	Mawar Sari	Samarinda	<i>Good Manufacturing Practices (GMP)</i>
14.	Amplang	Sari Rasa	Samarinda	<i>Good Manufacturing Practices (GMP)</i>
15.	Amplang	Vera	Samarinda	<i>Good Manufacturing Practices (GMP)</i>
16.	Amplang	Usaha Guntur Pratama	Samarinda	<i>Good Manufacturing Practices (GMP)</i>
17.	Amplang	Kuku Macan	Samarinda	<i>Good Manufacturing Practices (GMP)</i>
18.	Amplang	Usaha Devi	Samarinda	<i>Good Manufacturing Practices (GMP)</i>
19.	Amplang	Yulia	Samarinda	<i>Good Manufacturing Practices (GMP)</i>
20.	Amplang	Noor Fajar Pagi	Samarinda	<i>Good Manufacturing Practices (GMP)</i>
21.	Amplang	Indah Sari	Samarinda	<i>Good Manufacturing Practices (GMP)</i>
22.	Amplang	Usaha Melati	Samarinda	<i>Good Manufacturing Practices (GMP)</i>
23.	Amplang	Sinar Terang	Samarinda	<i>Good Manufacturing Practices (GMP)</i>
24.	Amplang	Ridho	Samarinda	<i>Good Manufacturing Practices (GMP)</i>
25.	Amplang	Gerai Panglima	Samarinda	<i>Good Manufacturing Practices (GMP)</i>
26.	Amplang	Pesona Rasa	Samarinda	<i>Good Manufacturing Practices (GMP)</i>
27.	Amplang	Kutai	Samarinda	<i>Good Manufacturing Practices (GMP)</i>
28.	Amplang	Kampung Amplang	Samarinda	<i>Good Manufacturing Practices (GMP)</i>
29.	Amplang	Usaha Rahim	Samarinda	<i>Good Manufacturing Practices (GMP)</i>
30.	Amplang	Ismulah	Samarinda	<i>Good Manufacturing Practices (GMP)</i>
31.	Amplang	Afif	Samarinda	<i>Good Manufacturing Practices (GMP)</i>
32.	Amplang	ABG Rinda Lestari	Balikpapan	<i>Good Manufacturing Practices (GMP)</i>
33.	Amplang	Dzakwan Food	Balikpapan	<i>Good Manufacturing Practices (GMP)</i>
34.	Amplang	Manggar Snack	Balikpapan	<i>Good Manufacturing Practices (GMP)</i>
35.	Amplang	Bondang	Balikpapan	<i>Good Manufacturing Practices (GMP)</i>
36.	Amplang	Annie Snack	Balikpapan	<i>Good Manufacturing Practices (GMP)</i>
37.	Kopi	Deli Koffie	Balikpapan	<i>Good Manufacturing Practices (GMP)</i>
38.	Amplang	Rizky	Bontang	<i>Good Manufacturing Practices (GMP)</i>
39.	Amplang	Nabil Abadi	Bontang	<i>Good Manufacturing Practices (GMP)</i>
40.	Amplang	Aiko	Bontang	<i>Good Manufacturing Practices (GMP)</i>
41.	Amplang	Karya Abadi	Bontang	<i>Good Manufacturing Practices (GMP)</i>
42.	Amplang	Naura Food	Bontang	<i>Good Manufacturing Practices (GMP)</i>
43.	Amplang	Hasni Food	Bontang	<i>Good Manufacturing Practices (GMP)</i>
44.	Amplang	Suharni	Bontang	<i>Good Manufacturing Practices (GMP)</i>
45.	Amplang	Sekar Wangi	Bontang	<i>Good Manufacturing Practices (GMP)</i>
46.	Amplang	Sidomulyo	Bontang	<i>Good Manufacturing Practices (GMP)</i>
47.	Amplang	Riza	Kutai Kartanegara	<i>Good Manufacturing Practices (GMP)</i>
48.	Amplang	Karya Usaha Bersama	Kutai Kartanegara	<i>Good Manufacturing Practices (GMP)</i>
49.	Amplang	Apriana Mandiri	Kutai Kartanegara	<i>Good Manufacturing Practices (GMP)</i>
50.	Amplang	Kramat Jaya	Kutai Kartanegara	<i>Good Manufacturing Practices (GMP)</i>
51.	Amplang	Saka Mandiri	Kutai Kartanegara	<i>Good Manufacturing Practices (GMP)</i>
52.	Amplang	Ogi Passompe	Paser	<i>Good Manufacturing Practices (GMP)</i>
53.	Amplang	Anugerah	Paser	<i>Good Manufacturing Practices (GMP)</i>



#### **2.2.7 Unit Pelayanan Terpadu Daerah (UPTD) Pusat Pelatihan Koperasi dan UKM**

Kinerja yang dilakukan oleh UPTD Pusat pengembangan Koperasi dan UKM dalam melaksanakan tugasnya dari tahun 2016 hingga 2020 sebagian besar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai.

Untuk tahun 2017 UPTD. Pusat Pengembangan Koperasi dan UKM tidak mengalokasikan lagi kegiatan promosi produk UKM melalui kegiatan pameran baik itu dalam daerah maupun luar daerah, hal ini disebabkan adanya perubahan nomenklatur yang semula UPTD Pusat Pengembangandan Promosi UKM (P3UKM) menjadi UPTD. Pusat Pengembangan Koperasi dan UKM (P2UKM) dan pada tahun 2018 sesuai Peraturan Gubernur nomor 41 tahun 2018 tentang Pembentukan dan susunan organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM menjadi UPTD Pelatihan Koperasi yang berlaku pada Tahun 2019, dengan adanya perubahan nomenklatur tersebut sehingga UPTD. Pusat pengembangan koperasi dan UKM tidak dapat lagi melaksanakan kegiatan-kegiatan pameran/promosi produk-produk UKM. Berikut tabel capaian target



**PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KRCIL DAN MENENGAH  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019-2023**

**Tabel 33. Capaian Target dan Realisasi Kinerja UPTD P3UKM Tahun 2013-2017 Provinsi Kalimantan Timur**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun									
			2013		2014		2015		2016		2017	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)				
	Jumlah Design Yang Dihasilkan	Buah	10	10	5	2	7	5	10	15	15	17
	Meningkatnya Promosi Produk UKM											
	Total Produk UKM Yang Dipromosikan	Unit	1251	1200	1380	1300	1.400	1.430	1.430	1.445	-	-
	Total Hasil Penjualan	Rp	46.840.000	45.000.000	54.324.990	52.000.000	55.000.000	60.000.000	65.000.000	71.000.000	-	-
	Hasil Penjualan Promosi Industri Kerajinan											
	Total Produk UKM Yang Dipromosikan	Unit	685	500	754	500	800	830	800	810		
	Total Hasil Penjualan	Rp	19.167.500	20.000.000	21.084.250	20.000.000	21.000.000	23.500.000	25.000.000	27.500.000		
	Hasil Penjualan Promosi Industri Pangan											
	Total Produk UKM Yang Dipromosikan	Unit	235	500	259	500	400	400	420	425		
	Total Hasil Penjualan	Rp	5.177.700	10.000.000	5.695.470	17.000.000	17.500.000	18.000.000	20.000.000	22.500.00		
	Hasil Penjualan Promosi Produk Industri Sandang	0	0	0	0	0						
	Total Produk UKM Yang Dipromosikan	Unit	325	200	358	300	200	200	210	210		
	Total Hasil Penjualan	Rp	15.495.700	15.000.000	17.045.270	15.000.000	16.500.000	18.500.000	20.000.000	21.000.000		

Sumber :Disperindagkop & UKM



**PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019-2023**

**Tabel 34**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Koperasi Provinsi Kalimantan Timur**

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun					Realisasi Capaian Tahun Ke					Rasio Capaian Pada Tahun Ke				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1	Persentase pertumbuhan industri				3,6%	4,2				2,7%	2,1				75%	50%			
2	Jumlah produk OVOP dan KIID				4 Produk	4				3 Produk	2				75%	50%			
3	Persentase kontribusi sektor industri terhadap PDRB				10,8%	15,2	5	19		10%	19,5	5	19	18,44	76,34	128,29	100	100	97,05
4	Jumlah klaster industri pengolahan				1 buah	2				1 buah	2				50	100			
5	Jumlah desain produk unggulan daerah				4 desain produk	7	8	7	12	2 produk	5	6	7	6	40	71,42	75	100	85,71
6	Jumlah rekayasa TTG sesuai potensi daerah				4 teknologi	6				2 teknologi	2				50	33,34			
7	Disparitas harga antar wilayah				10%	8	8	7	4%	5%	7,5	7	5	7	50	93,75	87,5	71,43	7
8	Jumlah barang dan jasa yang tidak sesuai standar per tahun				30	25	30	15	10 item	31	21	24	14	0	96,67	84	80	93,3	
9	Jumlah penurunan impor barang konsumsi				129,70	103,76				397,44	496				306,43	481,50			
10	Nilai ekspor non migas				18,31	18,67		7	5 M US\$	15,24	11,68	13,8	12	13,79	84,06	62,56		171,4	
11	Jumlah kemampuan pengujian pada komoditi produk				3	3				4	4				133	133			
12	1. Jumlah koperasi berkualitas				200	250			500	189	250				94,50	100			
	Jumlah kopaerasi unggulan						30	30				30	30	61			100	100	
13	Persentase Sumbangan PDRB sektor Koperasi dan UMKM				15%	18	20	3	40	12,39	14,82	15	12,18	12,83	82,60	82,30	75	40,6	
14	Persentase penyerapan tenaga kerja dan investasi sektor Koperasi dan UMKM				57%	60	65	67	70	52%	56,77	68,85	68,85	68,85	91,23	94,61	105,9	102,8	
15	Penumbuhan jumlah WUB				1000	1000	1000	1000	1000	1040	1040	760	1200	1459	104	104,	70,82	120	145,9
16	Penumbuhan jumlah inkubasi UKM/WUB				300	150	300	300	300	437	155	200	155	325	146	103,30	200	51,7	108,33
17	Jumlah sarana prasarana pemberdayaan Koperasi dan UMKM				150	80				233	85				155	105,30			
18	Jumlah koperasi/UMKM yang melakukan kontak dagang				50	50	100	150	50	50	60	75	60	210	100	120	75	40	140
19	Jumlah Koperasi/UMKM yang melakukan kemitraan				150	150	25	300	150	71	344	20	344	407	47,33	229,30	80	114,7	



**PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019-2023**

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun					Realisasi Capaian Tahun Ke					Rasio Capaian Pada Tahun Ke				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
20	Jumlah koperasi/ UMKM yang mendapat program pembiayaan				100	100				55	200				55	200			
21	Jumlah aparat yang mengikuti diklat yang berkualifikasi				50	60	25	25	80	49	46	20	5	7	98	76,67	80	20	
22	Jumlah sarana pelayanan publik				10	10	10	10	11	8	10	10	10	10	80	100	100	100	100
23	Jumlah dokumen perencanaan sebagai pendukung kinerja organisasi				6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	100	100	100	100	100

Sumber : Disperindagkop & UKM

**Tabel 35  
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM**

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke					Rata-rata Pertumbuhan	
	2014	2015	2016	2017	*2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
<b>Urusan Wajib Koperasi</b>																	
Pengembangan Koperasi	32,025,863,750	11,024,600,000	7,887,294,200	3,300,000,000	3,997,550,000	22,152,152,282	8,782,790,837	7,546,295,359	3,274,834,001	3,968,054,925	69.17	79.67	95.68	99.24	99.26	11,647,061,590	8,608,081,015.80
Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Perindagkop&UKM	5,263,161,156	3,817,683,400	2,284,195,500	574,150,000	598,250,000	3,161,767,046	2,995,542,408	1,990,088,098	511,039,240	571,458,400	60.07	78.46	87.12	89.01	95.52	2,507,488,011	1,810,221,538.40
Belanja Rutin Dinas	8,636,000,000	9,267,270,000	6,186,343,540	9,024,300,000	6,668,419,000	7,215,445,101	8,111,044,170	5,733,570,309	7,932,574,072	6,456,788,998	83.55	87.52	92.68	87.90	96.83	7,956,466,508	6,313,401,413.80
<b>Urusan Perindustrian</b>																	
Kegiatan Pemberdayaan Industri	6,567,805,000	9,740,300,000	4,181,623,425	950,000,000	1,253,000,000	5,661,855,182	7,962,900,806	3,804,280,957	937,717,270	1,237,765,565	86.21	81.75	90.98	98.71	98.78	4,538,545,685	3,721,731,963
<b>Urusan Perdagangan</b>																	
Kegiatan Pengembangan Perdagangan Luar Negeri (P2LN)	2,092,838,000	2,765,750,000	2,403,686,250			2,043,778,050	2,563,908,315	2,364,409,650			97.66	92.70	98.37			2,420,758,083	2,324,032,005



**PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019-2023**

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke					Rata-rata Pertumbuhan	
	2014	2015	2016	2017	*2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
Kegiatan Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri (P2DN)	11,485,970,250	3,709,011,600	2,712,715,109			9,556,069,890	3,376,207,781	2,295,825,200			83.20	91.03	84.63			5,969,232,320	5,076,034,290
Pengawasan Barang dan Jasa				493,750,000	500,000,000				463,290,800	430,775,295				93.83	86.16	496,875,000	332,122,175
Perdagangan				330,000,000	673,250,000				329,286,940	672,705,276				99.78	99.92	501,625,000	262,323,958
<b>UPTD</b>																	
UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang	14,704,530,000	8,166,535,000	3,933,053,850	704,800,000	1,000,000,000	13,389,172,231	7,522,773,545	3,763,496,072	677,198,630	996,240,781	91.05	92.12	95.69	96.08	99.62	5,701,783,770	5,119,896,481
UPTD Pusat Pelatihan Koperasi	4,127,812,500	5,470,750,000	3,118,547,000	661,000,000	862,000,000	3,985,851,684	5,302,963,378	2,691,081,278	637,277,800	824,430,050	96.56	96.93	86.29	96.41	95.64	2,848,021,900	2,553,716,668
UPTD Metrologi	10,916,821,875	33,499,741,850	2,642,598,476			9,609,188,426	27,678,236,111	2,496,083,607			88.02	82.62	94.46			15,686,387,400	13,261,169,381



### **2.3. Peluang dan Tantangan Pengembangan Pelayanan DISPERINDAGKOP dan UKM Provinsi Kalimantan Timur**

Berikut ini adalah peluang dan tantangan yang dihadapi dalam rangka pengembangan sektor industri, perdagangan, koperasi dan UKM di Kalimantan Timur.

#### **2.3.1. Peluang**

1. Kebijakan-kebijakan Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi dan UKM dalam rangka peningkatan daya saing.
2. Peluang Pasar Ekspor yang cukup banyak.
3. Meningkatnya jumlah pasar di daerah.
4. Peraturan daerah terkait pemberdayaan Koperasi dan UKM, Kerjasama dengan Perusahaan Industri Tambang dan jasa melalui Program CSR.
5. Program Pembiayaan baik melalui dana bergulir maupun dari bank dan non bank.

#### **2.3.2. Tantangan**

1. Isu negatif HaKI, HAM Lingkungan dan Perdagangan Bebas masih berkembang.
2. Potensi sumber daya alam yang tak dapat diperbaharui akan habis.
3. Koordinasi Kab/Kota ke Provinsi belum maksimal.
4. Banyaknya usaha-usaha baru melalui on line dan retail modern.
5. Adanya pola pikir masyarakat untuk membentuk koperasi atau melakukan usaha hanya untuk mendapatkan bantuan.
6. Diterapkannya Masyarakat Ekonomi Asean Th 2015, ACFTA, AFTA, Globalisasi.
7. Kepentingan pemanfaatan lahan sector pertambangan dan gas termasuk batubara lebih dominan dibandingkan sektor lain, terutama usaha pertanian dan Perkebunan.





## **BAB III ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

Sejalan dengan konteks pembangunan di suatu daerah, maka daerah sebagai bagian dari subsistem yang terintegrasi secara nasional juga memiliki kontribusi terhadap pola pembangunan nasional. Menghadapi dinamika lingkungan strategis, baik regional, nasional, maupun global serta memperhatikan perencanaan sebagai alat manajerial untuk memelihara keberlanjutan dan perbaikan kinerja lembaga, maka Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Provinsi Kalimantan Timur dalam mengemban tugas dan perannya harus memperhatikan isu-isu strategis yang berkembang saat ini dan lima tahun ke depan.

Hal tersebut sejalan dengan amanat RPJMD Provinsi Kalimantan Timur, sehingga menuntut terjadinya perubahan peran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Provinsi Kalimantan Timur dalam orientasi dan pendekatan yang digunakan dalam perencanaan dan koordinasi pembangunan sebagai upaya mendukung tercapainya visi dan misi pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018.

Berdasarkan pendekatan seperti diamanatkan dalam Undang-Undang No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta peluang dan ancaman yang terkait dengan dinamika lingkungan strategis juga memperhatikan kekuatan dan kelemahan lembaga/institusi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Timur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, maka permasalahan dan isu-isu strategis penyelenggaraan tugas fungsi menjadi rujukan penting dalam menentukan program dan kegiatan yang diprioritaskan selama lima tahun ke depan (2018-2023).

### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM**

Secara normatif Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang *Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM*. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut terdapat beberapa permasalahan utama, antara lain:



### **3.1.1 Sektor Industri.**

Pembangunan industri di Provinsi Kalimantan Timur disesuaikan dengan kondisi potensi daerah serta aspirasi masyarakat, dengan demikian diharapkan pembangunan industri akan sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh Provinsi Kalimantan Timur dan pemanfaatan sumber daya yang ada akan menjadi optimal, sehingga pemerataan kesejahteraan dapat terwujud.

Provinsi Kalimantan Timur dengan luas wilayah yang sangat luas juga memiliki sumber daya alam *renewable* yang melimpah dan sangat potensial untuk dikembangkan serta dilakukan hilirisasi industrinya diantaranya sawit, karet, kayu, gas alam, batubara, perikanan kelautan (tabel 22. Bab II, hal 41)

PDRB disumbang sebagian besar dari komoditas batu bara sekiranya apabila sumbangan komoditi ini berkurang akan berdampak pada ekonomi Kalimantan Timur, sehingga harus mencari dan mengembangkan sektor-sektor lain yang lebih riil dalam menopang perekonomian Kalimantan Timur. Banyak potensi yang dimiliki yang belum tergarap secara maksimal yakni pertanian, perkebunan, perikanan, laut, pariwisata, produk kerajinan tradisional, UMKM, dan industri lainnya.

Namun, proses transformasi ini dinilai masih lambat karena permasalahan yang kompleks yakni dari koordinasi tingkat pemerintahan antar kelembagaan atau instansi, perizinan hingga adanya resistensi masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan infrastruktur dan diperparah dengan adanya pandemi Covid-19.

Sektor industri berbasis komoditi unggulan di Kalimantan Timur sampai hari ini belum memberikan kontribusi yang begitu signifikan terhadap pembangunan ekonomi daerah. Kondisi demikian



dikarenakan sektor industri masih belum optimal, baik dalam hal teknologi, ketersediaan lahan, jaminan ketersediaan bahan baku, infrastruktur dan kemampuan sumber daya manusia lokal untuk bersaing dengan tenaga kerja luar.

Pembangunan industri berbasis komoditi unggulan yang akan menghasilkan produk unggulan di Provinsi Kalimantan Timur harus sesuai dengan kondisi potensi serta aspirasi masyarakat. Dengan demikian, diharapkan pembangunan industri akan sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh Provinsi Kalimantan Timur dan pemanfaatan sumber daya yang ada akan menjadi optimal serta pemerataan kesejahteraan akan terwujud. Permasalahan pembangunan industri provinsi menjadi salah satu rujukan penting dalam merumuskan program prioritas pembangunan industri di provinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan analisis permasalahan pembangunan industri Provinsi Kalimantan Timur, terdapat lima permasalahan utama pembangunan industri di Kalimantan Timur, yaitu :

- 1) Belum memadainya infrastruktur industri dan infrastruktur penunjang termasuk konektivitas antar wilayah.
- 2) Terbatasnya sumber daya manusia industri.
- 3) Rendahnya komitmen dan respon stake holder dalam bekerjasama untuk menyelesaikan masalah.
- 4) Sulitnya mendapatkan lahan yang sesuai kebutuhan industri dan harga yang masih relatif tinggi.
- 5) Kelembagaan belum efektif.



### **3.1.2. Sektor Perdagangan.**

Sektor perdagangan Kalimantan Timur tahun 2020 terdapat beberapa permasalahan utama, antara lain:

#### **a. Terbatasnya Ekspor Komoditi dan Produk Non Migas Non Batubara.**

Sejalan dengan upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk merubah struktur PDRB dari komoditi primer berbasis migas dan batubara menjadi komoditi non migas dan non batubara, maka diperlukan upaya-upaya untuk mempersiapkan komoditi non migas non batubara yang menjadi unggulan Kalimantan Timur. Dari data potensi pengembangan komoditi di Kalimantan Timur memiliki potensi untuk dikembangkan komoditi perkebunan, perikanan, dan kehutanan. Akan tetapi potensi tersebut belum dikembangkan dan dikelola secara optimal sehingga masih mengalami keterbatasan dalam jenis diversifikasi komoditinya. Komoditi-komoditi di sektor perkebunan, perikanan dan kehutanan masih diekspor dalam bentuk bahan mentah dan belum merupakan proses industri yang apabila dikembangkan di Kaltim maka akan menjadi nilai tambah tersendiri dalam peningkatan perekonomian Kaltim, misalnya perluasan kesempatan kerja, penguatan sektor hulu sebagai bahan baku industri, meningkatnya investasi di Kaltim dan lain-lain.

#### **b. Rendahnya Daya Saing Produk yang Dipasarkan.**

Era globalisasi dan perdagangan bebas saat ini mendorong persaingan semakin ketat. Berbagai negara terus berupaya meningkatkan daya saing produknya agar produk-produknya lebih efisien dan laku di pasaran. Untuk meningkatkan daya saing ditempuh beberapa langkah baik peningkatan efisiensi, menekan biaya produksi, perbaikan iklim usaha, perbaikan infrastruktur serta mengurangi berbagai bentuk pungutan.



Kurang kondusifnya lingkungan usaha juga memiliki implikasi besar terhadap penurunan daya saing ekonomi, terutama sektor-sektor industri sebagai lapangan kesempatan kerja yang merupakan salah satu motor bagi pertumbuhan ekonomi. Lemahnya daya saing produk ekspor dari segi kualitas, kuantitas dan kontinuitas dirasakan masih menjadi tugas Pemerintah Provinsi Kaltim untuk merumuskan berbagai kebijakan dan program di semua sektor untuk bersama-sama bersinergi mendorong penciptaan komoditi unggulan Kaltim yang berdaya saing.

**c. Belum Optimalnya Pemanfaatan \Peluang Ekspor Langsung di Kalimantan Timur.**

Beberapa fasilitas infrastruktur yang telah disiapkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur di antaranya adalah penyiapan pelabuhan Teluk Balikpapan sebagai pelabuhan ekspor langsung. Akan tetapi fasilitas ini belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh eksportir untuk mengekspor komoditinya secara langsung dari Pelabuhan Teluk Balikpapan ke negara tujuan ekspor. Belum semua pelaku eksportir komoditi potensial menggunakan export langsung, masih banyak eksportir yang mengirimkan komoditinya ke luar daerah dan baru melakukan ekspornya melalui pelabuhan ekspor di luar daerah tersebut. Sehingga Kalimantan Timur kehilangan potensi pendapatan daerah dari pajak ekspor. Hal ini diakibatkan dari belum adanya regulasi yang mendorong atau mewajibkan untuk komoditi asal Kaltim yang diekspor harus memanfaatkan fasilitas ekspor langsung melalui Teluk Balikpapan.

Peran aktif Pemerintah Kabupaten Kota juga sangat menentukan bagi keberhasilan kebijakan ekspor langsung ini. Dimana Pemerintah Kabupaten Kota belum semua memberikan dukungan dalam memanfaatkan Teluk Balikpapan sebagai Pelabuhan ekspor komoditi langsung.



Pelabuhan Teluk Balikpapan selain dikembangkan sebagai Pelabuhan Ekspor Langsung, juga mempunyai potensi untuk dijadikan sebagai pelabuhan penghubung (hub) akses komoditi dari antar pulau/provinsi potensial ke Pelabuhan Teluk Balikpapan. Beberapa daerah yang berpotensi menjadi konektivitas dengan Pelabuhan Teluk Balikpapan adalah Sulawesi, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah dan lain-lain. Saat ini konektivitas tersebut masih sangat terbatas karena belum adanya kebijakan dan regulasi terkait pemanfaatan pelabuhan Teluk Balikpapan sebagai hub komoditi antar daerah.

Belum berkembangnya mitra baru untuk meningkatkan pelayaran ekspor langsung juga masih menjadi kendala dalam pelaksanaan kebijakan ini. Hal ini disebabkan beberapa perusahaan pelayaran harus memperhitungkan biaya untuk sekali kirim ekspor dan untuk kembalinya harus ada komoditi yang diangkut (jangan sampai kosong). Sehingga perusahaan pelayaran yang melayani ekspor langsung melalui Teluk Balikpapan masih terbatas.

Belum berkembangnya jasa pelayanan penunjang kelancaran distribusi peti kemas di kawasan Teluk Balikpapan seperti sarana infrastruktur jalan, SPBU dan lain-lain masih terbatas. Misalnya saja akses jalan dari Samarinda menuju Pelabuhan Teluk Balikpapan masih rawan dan kurang memadai. Sehingga program pembangunan infrastruktur Samarinda Balikpapan perlu mendapatkan perhatian agar mobilisasi kontainer dari Samarinda dapat dilaksanakan lancar menuju Teluk Balikpapan.

**d. Terbatasnya Jangkauan Pemasaran Komoditi dan Produk Ekspor.**

Pemasaran komoditi ekspor Kaltim tentu tidak terlepas dari upaya promosi dan publikasi. Selain itu Pemanfaatan Informasi dan



Teknologi yang masih terbatas untuk mendorong produk UKM potensial ekspor juga masih menjadi kendala sehingga pemasaran produk UKM kebanyakan masih lokal. Terbatasnya promosi dalam dan luar negeri melalui kurasi dan pendampingan belum banyak dikembangkan sehingga even promosi masih terkesan kurang tepat sasaran dan kurang optimal pemanfaatannya.

**e. Terbatasnya Produksi dan Sarana Distribusi Bahan Pokok.**

Kebutuhan pokok masyarakat mempunyai peran yang sangat penting dan strategis bagi sebuah Negara. Ketersediaan barang kebutuhan pokok yang harganya tinggi dapat menciptakan ketidak stabilan ekonomi, dan berbagai gejolak sosial.

Dalam memenuhi bahan kebutuhan pokok masyarakat Kalimantan Timur, sebagian besar barang kebutuhan pokok tersebut masih di datangkan dari luar daerah, seperti Jawa dan Sulawesi. Tingginya ketergantungan distribusi barang kebutuhan pokok tersebut menyebabkan disparitas harga dan memerlukan efisiensi perdagangan melalui kelancaran arus distribusi. Oleh karena itu, pemerintah harus mampu menjaga kondisi kebutuhan pokok dan barang penting ini dalam 3 (tiga) hal, antara lain *ketersediaan, keterjangkauan dan stabilitas harga* terutama menjelang Hari Besar Keagamaan dimana barang kebutuhan pokok selalu mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan. Dukungan sektor terkait juga dirasakan masih kurang khususnya terkait optimalisasi dan juga peningkatan teknologi budidaya dalam mendukung pemenuhan kebutuhan dalam daerah di Kaltim dalam mewujudkan ketersediaan stok barang kebutuhan pokok dan pengendalian harga.



**f. Belum Optimalnya Fasilitasi Sistem Distribusi Perdagangan.**

Rantai Distribusi yang panjang menjadi penyebab tingginya harga komoditi kebutuhan pokok karena belum optimalnya fasilitasi distribusi perdagangan. Hal ini terjadi karena panjangnya rantai distribusi dari hulu (produsen) hingga hilir (konsumen) yang melalui lebih dari 5 (lima) titik yaitu dari produsen – pengepul – agen – pedagang besar – pengecer – konsumen, hal ini menyebabkan perdagangan tidak efektif dan efisien. Selain panjangnya rantai distribusi, kita merasa kesulitan untuk memantau perdagangan yang berada di daerah perbatasan hal ini disebabkan tidak adanya sistem yang mengatur perdagangan antar provinsi. Data ketersediaan atau stok komoditas belum optimal. Banyak Distributor, Sub Distributor dan Agen yang belum melakukan kewajiban daftar, sehingga data ketersediaan stok bahan pokok masih terbatas.

**g. Belum Optimalnya Kerjasama Perdagangan.**

Belum berkembangnya kemitraan dan Kerjasama antar daerah dalam peningkatan neraca perdagangan antar pulau dan pemenuhan bahan pokok. Masih terbatasnya jenis dan jumlah komoditi yang dikerjasamakan perdagangannya juga perlu mendapatkan perhatian bagaimana ke depannya untuk bisa melakukan identifikasi potensi komoditi unggulan yang dapat dikembangkan menjadi komoditi perdagangan antar pulau sehingga mampu menjadi peluang pasar bagi produk Kaltim misalnya handycraft, hasil perikanan, hasil perkebunan dan lain-lain. Selain itu kerjasama perdagangan khususnya dalam pemenuhan kebutuhan pokok bagi masyarakat Kaltim juga belum optimal dilaksanakan.





**h. Konsumen Kalimantan Timur Pada Umumnya Masih Pada Tahap Mampu Belum Kritis.**

Masih banyak masyarakat Kaltim yang belum mengetahui dan paham adanya undang-undang perlindungan konsumen dan lembaga perlindungan konsumen. Sehingga apabila dilapangan ada persoalan, belum bisa melakukan penyelesaian dengan benar sesuai aturan. Indeks Keberdayaan Konsumen di definisikan sebagai keadaan subjektif konsumen yang terampil, tahu undang-undang dan Lembaga Perlindungan Konsumen, aktif mencari informasi serta menegaskan hanya dengan mengajukan komplain.

**i. Belum Adanya Peran Aktif Masyarakat Menggunakan Hak dan Kewajiban Sebagai Konsumen.**

Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK) Kalimantan Timur tahun 2020 adalah 51,30 (IKK : 40,1 – 60,00 ; Mampu), yang berarti konsumen kaltim sudah tahu keberadaan undang-undang perlindungan konsumen No. 81 tahun 1999, sudah menggunakan hak dan kewajibannya untuk mencari informasi dan menentukan pilihan terbaik serta menggunakan produk dalam negeri bagi diri sendiri dan lingkungannya. Tetapi konsumen kaltim belum pada taraf kritis (IKK : 60,1 – 80,0 ; Kritis), yaitu berperan aktif memperjuangkan hak bila merasa dirugikan dan melaksanakan kewajibannya sebagai konsumen yang cerdas serta mengutamakan produk dalam negeri di dalam kebudayaan sehari-hari. Kebudayaan konsumen dapat diwujudkan melalui 2 (dua) cara yaitu perlindungan konsumen dan pendidikan konsumen.

**j. Pelaku Usaha Masih Ada Yang Belum Patuh.**

Dari hasil pengawasan dalam rangka melindungi konsumen dari akses negatif pemakaian barang dan atau jasa yang berasal dari kabuapten/kota se Kalimantan Timur, ditemukan masih ada pelaku



usaha memperdagangkan barang yang tidak sesuai ketentuan dan Standar Nasional Indonesia (SNI). Esensi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pada hakikatnya memberikan aturan main kepada palaku usaha agar melakukan aktifitas usahanya secara profesional, jujur, beretika bisnis, tertib mutu, tertib ukur yang memenuhi persyaratan perlindungan konsumen, dimana barang yang diproduksi dan diperdagangkan aman untuk digunakan oleh konsumen.

**k. Belum Optimal Pemanfaatan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di Kalimantan Timur.**

Undang-Undang Nomor 9 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Bab XI pasal yang menyatakan bahwa pemerintah membentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di Daerah Tingkat II untuk penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan.

Pada saat ini di Provinsi Kalimantan Timur, badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) telah terbentuk di Kota Samarinda dan Kabupaten Berau.

Tahun 2020 BPSK Kota Samarinda hanya menerima 9 (sembilan) pengaduan konsumen dan 5 (lima) saksi ahli. Sedangkan BPSK Kabupaten Berau tidak ada pengaduan , sehingga anggota BPSK Kabupaten Berau melakukan pengawasan bersama Dinas Perdagangan setempat.

Berdasarkan dengan hal tersebut diatas, konsumen belum optimal memanfaatkan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).



**I. Masih Kurangnya Sumber Daya Manusia PNS UPTD Balai Pengujian Sertifikasi Mutu Barang.**

Sumber Daya Manusia PNS UPTD Balai Pengujian Sertifikasi Mutu Barang baik tenaga teknis laboratoris (Tenaga Fungsional Penguji Mutu Barang) maupun tenaga administratif (Pelaksana) belum sesuai dibandingkan beban kerja yang ada. Sehingga untuk mengatasinya perlu dilakukan :

- 1) Perekrutan Tenaga Non PNS baik sebagai tenaga teknis maupun tenaga non teknis.
- 2) Analisis Beban Kerja untuk mengusulkan tenaga CPNS agar beban kerja yang ada dapat dilaksanakan oleh SDM PNS sesuai tugas dan fungsinya.

**n. Belum Optimalnya Pemanfaatan Laboratorium Pengujian dan Kalibrasi UPTD BPSMB Standardisasi Mutu Barang.**

1) Pelayanan Pengujian.

Ruang lingkup pengujian yang telah terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional belum dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh para pelanggan dikarenakan :

- Ruang lingkup yang telah diakreditasi terhadap Laboratorium Pengujian seperti komoditi Lada Putih–langsung dijual antar pulau oleh pelaku usaha tanpa memperhatikan mutu komoditi.
- Pengujian Komoditi biji kakao yang di ekspor ke luar negeri telah dilakukan oleh ICCRI (Indonesian Coffee and Cocoa Reserach Institute) karena hasil uji ICCRI diakui oleh buyer/internasional.

Informasi ini didapatkan berdasarkan hasil identifikasi potensi layanan pengujian di sentra Komoditi Lada Putih di kabupaten Kukar, Kutim dan PPU, dan untuk biji kakao



didapatkan dari Berau Cocoa yang merupakan binaan dari PT. Berau Coal.

- Pelaku Usaha produk Crude Palm Oil (CPO) menginginkan UPTD BPSMB dapat memberikan pelayanan bukan hanya sebagai laboratorium pengujian tetapi dapat sebagai Lembaga Surveyor, Informasi ini didapatkan berdasarkan hasil Pertemuan Teknis yang diprakarsai oleh UPTD BPSMB Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur bersama instansi teknis terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan beberapa Pelaku Usaha CPO yang dilaksanakan di Samarinda tahun 2018.
- Mengembangkan ruang lingkup pengujian lain dan akreditasinya yang disesuaikan dengan permintaan potensi pasar antara lain : Rumput Laut, Plastik-Tangki Air Silinder Vertikal-Polietilena.

## 2) Pelayanan Kalibrasi.

Ada beberapa ruang lingkup dan kapasitas yang belum dikembangkan akreditasinya sesuai permintaan pelanggan dan untuk meningkatkan pelayanan kepada pelanggan baik pemerintah maupun swasta diperlukan akreditasi terhadap ruang lingkup anatara lain : Anak Timbangan 2, 10, dan 20 kg, Termometer Digital, Thermohygrometer, Tekanan, Gaya dan Aliran (Flowmeter).



### **3.1.3. Sektor Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.**

#### **a. Rendahnya Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi**

Rapat Anggota Tahunan (RAT) merupakan agenda wajib dilakukan oleh Koperasi. Pelaksanaan RAT dilakukan paling sedikit 1 kali dalam satu tahun buku. RAT paling lambat dilaksanakan dalam jangka waktu 6 bulan setelah tutup buku. Namun, dengan adanya Pandemi Covid – 19 saat ini tentu mengganggu pelaksanaan RAT, terkendala oleh Peraturan Pembatasan Pertemuan dengan mengundang orang banyak. Padahal solusi RAT Koperasi masih mungkin dilaksanakan dan sudah diatur oleh Pemerintah. Banyaknya Koperasi masih belum mengetahui peraturan tentang RAT bisa dilaksanakan melalui media teleconference atau media elektronik lainnya yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha kecil Menengah Nomor 19/PER/M.KUKM/IX/2015.

#### **b. Kurangnya Pemahaman Para Pengurus Koperasi Mengenai Pelaporan Pertanggung Jawaban Koperasi.**

Pengurus adalah pemegang amanat anggota untuk menjalankan roda organisasi dan perusahaan koperasi. Dengan berpedoman pada keputusan-keputusan rapat anggota, anggaran dasar (AD), anggaran rumah tangga (ART), Undang – undang perkoperasian dan peraturan – peraturan yang berlaku di lingkungan koperasi. Dalam pelaksanaannya, pengurus dalam menjalankan tugas masih belum patuh dan taat terhadap peraturan yang ada, berakibat adanya konflik antara pengurus dengan anggota.

#### **c. Dampak Pandemi Covid – 19 Terhadap UKM.**

Semenjak Covid – 19 ditetapkan berstatus pandemi, ada banyak sektor ekonomi domestic dan global yang terpengaruhi. Dampak



pandemi paling terasa terjadi pada sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Keterpengaruhannya terhadap UMKM dapat dilihat dari indikator : turunnya omset penjualan, sulitnya mendapatkan modal, sulit mengakses bahan baku produksi.

UKM berperan sebagai roda penggerak roda ekonomi yang sangat cepat. Secara mikro ekonomi, keberadaan UKM sangat fluktuatif, hal ini dapat terjadi karena pergeseran sektor usaha guna mengikuti pangsa pasar yang ada atau karena memiliki struktur permodalan yang belum mapan. Kondisi tersebut menjadikan posisi UKM sangat sulit untuk mandiri, untuk itu diperlukan secara terus monev pendataan UKM by name by address.

Berbagai keterbatasan yang dihadapi UKM dalam menghadapi dampak pandemic Covid – 19, maka perkembangan dan pembinaan UKM lebih diarahkan untuk mengakses pasar secara online dengan meningkatkan kualitas, kuantitas dan kontinuitas untuk dapat memenuhi kebutuhan pasar domestic, nasional dan internasional.

### ***3.2 Telahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih***

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Provinsi Kalimantan Timur serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat, maka Visi Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Timur 3.2. Telahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Provinsi Kalimantan Timur serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat, maka Visi Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 adalah: "**Berani Untuk Kalimantan Timur Berdaulat**"



Penjabarannya bahwa rakyat Kalimantan Timur Pemerintahan Kalimantan Timur Memiliki Tekad, Komitmen Dan Keberanian Menjalankan Kewenangan Secara Otonom Dalam Mengatur Dan Mengelola Potensi Sumber Daya Alamnya, Untuk Mewujudkan Masyarakat Kalimantan Timur Yang Mandiri, Berdaya Saing Dan Sejahtera.

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan ke depan, dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 5 (Lima) misi sebagai berikut:

Misi 1 : **Berdaulat Dalam Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia Dan Berdaya Saing, Terutama Perempuan, Pemuda Dan Penyandang Disabilitas.**

Misi 2 : **Berdaulat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Wilayah Dan Ekonomi Kerakyatan Yang Berkeadilan.**

Misi 3 : **Berdaulat Dalam Memenuhi Kebutuhan Infrastruktur Kewilayahan.**

Misi 4 : **Berdaulat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Yang Berkelanjutan.**

Misi 5 : **Berdaulat Dalam Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan Yang Bersih, Profesional Dan Berorientasi Pelayanan Publik.**

pengelolaan keuangan yang transparan dan profesional serta penegakan hukum demi terwujudnya keadilan sosial,

Selanjutnya berkaitan dengan 5 misi Gubernur dalam membangun Kaltim tahun 2018 s/d 2023 tugas fungsi Dinas Perindustrian, perdagangan Koperasi dan UKM sangat erat kaitannya dengan Misi II **Berdaulat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Wilayah Dan Ekonomi Kerakyatan Yang Berkeadilan.**



Tugas pokok Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Dan UKM yang terkait dengan Misi II diatas adalah:

1. Fungsi pokok bidang industri, mencakup melaksanakan dan menyiapkan kebijakan, pembinaan dan pengembangan industri kecil dan menengah, industri kimia dan agro hulu dan hilir, industri logam mesin, elektronika, mekanika, transportasi dan aneka (ILMETA), mengkordinasikan kerja sama kemitraan bidang industri, memberikan masukan saran dalam rangka penerbitan dan usaha industri skala investasi diatas 10 milyar dan kawasan industri lintas kabupaten.
2. Fungsi pokok bidang perdagangan melaksanakan perumusan kebijakan, standarisasi dan bimbingan teknis, stabilisasi harga dan ketersediaan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting, evaluasi dibidang pembinaan usaha perdagangan dan pendaftaran usaha, melakukan bimbingan teknis pembinaan eksportir, pemantauan dan evaluasi kegiatan ekspor, penyebaran informasi perdagangan luar negeri, kerjasama perdagangan, promosi dan misi dagang baik dalam maupun luar negeri dan penerbitan SKA.
3. Fungsi pokok Bidang koperasi dan UKM adalah melaksanakan bahan pemberian bimbingan teknis, melaksanakan pembinaan dan pemodalan bagi lembaga koperasi dan sumber daya manusia, fasilitasi pemodalan dan pengembangan pelaku usaha dan pembentukan koperasi dan usaha kecil dan menengah serta pemantauan/pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis dibidang koperasi.

Dari 3 tugas pokok diatas, dijabarkan dalam Fungsi SKPD , maka dapat dijelaskan bahwa misi Gubernur dengan sasaran-sasaran yang telah disebutkan diatas mempunyai keterkaitan dengan tugas pokok Dinas perindustrian, perdagangan koperasi dan UKM. Tugas pokok dan fungsi bidang industri terutama terkait dengan Misi II meningkatkannya jumlah industri hilir berbasis pertanian ,dan





berkembangannya pusat pusat kawasan industri serta meningkatnya investasi daerah, tugas pokok dalam fungsi bidang perdagangan terkait dengan sasaran misi II, terkendalinya tingkat inflasi, terpenuhinya kebutuhan pangan dan meningkatnya pertumbuhan ekonomi, tugas pokok dan fungsi bidang koperasi dan UKM terkait sasaran visi II menurunnya tingkat pengangguran dan kemiskinan.

Perlu dijelaskan bahwa tugas pokok dan fungsi bidang-bidang sebagaimana diatas secara umum diarahkan dalam rangka pencapaian visi, misi dan sasaran yang ditetapkan oleh Gubernur Kalimantan Timur, sehingga tidak dapat diartikan bahwa bidang industri hanya terkait dalam sasaran pengembangan industri semata tetapi lebih dari itu juga mencakup keterkaitan dengan sasaran-sasaran lainnya selanjutnya tidak lanjut bahwa bidang industri hanya terkait dengan program pengembangan industri tetapi lebih dari itu cukup keterkaitan fungsi lainnya.

### ***3.3 Telaahan Renstra Kementerian dan Renstra Kabupaten/Kota.***

Keberhasilan pembangunan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM di Kalimantan Timur juga dipengaruhi oleh arah pembangunan dari mitra kerjanya baik mitra kerja di tingkat Pusat maupun Kabupaten/Kota. Berkenaan dengan hal tersebut dalam perumusan program kegiatan harus dipastikan sinergitas dengan mitra kerja tersebut.

Visi Kementerian Perindustrian adalah “Memantapkan daya saing basis industri manufaktur yang berkelanjutan (sustainable) serta terbangunnya pilar industri andalan masa depan”. Misi Kementerian Perindustrian, terutama pada Misi 1 yakni “Mendorong peningkatan nilai tambah industri” dan Misi 6 yakni “Mendorong penyebaran pembangunan industri ke luar pulau Jawa” selaras dengan Visi ke 2 (dua) Provinsi Kalimantan Timur yakni “Mewujudkan daya saing ekonomi yang berkerakyatan berbasis sumber daya alam dan energi



yang terbarukan”. Dalam rangka daya saing ini maka fokus Kalimantan Timur adalah hilirisasi produk, terutama produk sumberdaya alam yang dapat diperbaharui. Dinas Perindagkop dan UKM Kalimantan Timur harus dapat mengoperasionalkan keselarasan ini secara sinergis sehingga pembangunan Industri di Kalimantan Timur dapat tumbuh secara baik dan berdaya saing tinggi.

Visi Kementerian Perdagangan. Perdagangan Sebagai Sektor Penggerak Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi Pencipta Kemakmuran Rakyat Yang Berkeadilan. Ketersediaan infrastruktur perdagangan merupakan salah satu kunci utama untuk meningkatkan efisiensi perdagangan atau distribusi barang/jasa dari produsen ke konsumen. Kalimantan Timur merupakan salah satu provinsi yang sangat terbatas infrastrukturnya. Rendahnya kualitas dan kuantitas infrastruktur perdagangan (diganti yang hitam) menyebabkan tingginya biaya distribusi yang secara langsung akan mempengaruhi harga. Selain Jalan infrastruktur perdagangan yang juga mempengaruhi efisiensi harga adalah bangunan pasar. Sampai saat ini rasio pasar di Kalimantan Timur masing kurang dari 1 pasar untuk 10.000 orang penduduk. Hal ini harus menjadi perhatian para pihak sehingga kebutuhan pokok masyarakat Kalimantan Timur dapat tercukupi dengan harga yang terjangkau.

Visi Kementerian Koperasi dan UKM “Menjadi Kementerian yang Kredibel Guna Mewujudkan Koperasi dan UKM yang Tangguh dan Mandiri sebagai Soko Guru Perekonomian Nasional”. Kebijakan pembangunan bidang koperasi Kalimantan Timur telah selaras dengan Misi 2 Kementerian Koperasi dan UKM yaitu “Menumbuhkan dan mengembangkan kewirausahaan Koperasi dan UKM” dan Misi 3 yaitu Meningkatkan daya saing Koperasi dan UKM. Gubernur terpilih Kalimantan Timur untuk periode 2013-2018, telah menetapkan program prioritas yang berkaitan dengan pembangunan Koperasi dan UKM terutama kewirausahaan dengan menetapkan penciptaan 10.000



wirausahawan baru sebagai salah satu program prioritas unggulan. Selain itu, Provinsi Kalimantan Timur juga telah ditetapkan sebagai Provinsi Penggerak Koperasi.

Agroindustri, daya saing dan ekonomi kerakyatan merupakan beberapa kata yang termuat dalam Renstra Kabupaten/Kota bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM di Kalimantan Timur. Hal ini selaras dengan strategi pembangunan Kalimantan Timur yang berusaha mengurangi ketergantungan pada sumberdaya tidak terbarui. Pembangunan industri pertanian dalam arti luas yang mempunyai kecenderungan padat karya (labour intensive) merupakan wajah pembangunan Kalimantan Timur yang merata dan berkesinambungan. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM menjadi tulang punggung pencapaian cita-cita ini dengan melakukan sinergi dengan stakeholders terkait.

### ***3.4 Telaahan Terhadap Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.***

Berdasarkan pasal 27 Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2011-2031 , Luasan Kawasan Peruntukan Industri di Kalimantan Timur adalah sekitar 8.911 ha. Selanjutnya pada pasal 33, disebutkan bahwa kawasan Peruntukan Industri tersebut meliputi Kawasan Industri, Kawasan Industri Kecil, Kawasan sentra industri UKM dan Kawasan Industri Rumah Tangga. Rencana Rencana peruntukan kawasan industri diarahkan di Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Berau, Kabupaten Malinau, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kota Balikpapan, Kota Samarinda, Kota Tarakan, Kota Bontang dan Kabupaten Tana Tidung. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012



tentang Pembentukan Provinsi Kaltara, maka Kabupaten Nunukan, Kabupaten Tana Tidung, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau dan Kota Tarakan sudah bukan merupakan bagian dari Provinsi Kalimantan Timur.

Selanjutnya dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi juga disebutkan beberapa Kawasan Strategis Provinsi yang mempunyai nilai strategis dari sudut kepentingan ekonomi dan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Beberapa Kawasan strategis tersebut adalah:

- a. Kawasan Industri Kariangau di Kota Balikpapan;
- b. Kawasan Industri Jasa dan perdagangan di Kota Samarinda
- c. Kawasan Industri Petrokimia di Kota Bontang;
- d. Kawasan Industri Pariwisata Pulau Derawan di Kabupaten Berau;
- e. Kawasan Industri Strategis Perbatasan di Kabupaten Mahakam Ulu;
- f. Kawasan Industri Tanaman Pangan di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Paser dan
- g. Kawasan Industri dan pelabuhan Internasional (KIPI) Maloy di Kabupaten Kutai Timur.

Berkenaan dengan indikasi arahan peraturan zonasi kawasan industri, meliputi:

- a. arahan pemanfaatan untuk kegiatan industri baik yang sesuai dengan kemampuan penggunaan teknologi, potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia di wilayah sekitarnya;
- b. arahan pembatasan pembangunan perumahan baru disekitar kawasan peruntukan industri; dan
- c. arahan Pengelolaan Kawasan Industri melalui pencegahan dan larangan untuk melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Pembangunan Bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM di Kalimantan Timur akan mempedomani Rencana Tata Ruang wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2011-2031 dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota.



Berdasarkan dampak negatif program-program prioritas terpilih terhadap isu-isu strategis, dan upaya mitigasi dampak program keseluruhan yang harus dilakukan, maka Pokja Pengendalian Lingkungan telah menghasilkan beberapa butir Rekomendasi perbaikan terhadap kebijakan dan program RPJMD Kaltim tahun 2018-2023, yaitu antara lain sebagai berikut:

1. Pembangunan: pemukiman, pusat industri, industri pariwisata, perkebunan kelapa sawit, wilayah transmigrasi, jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya, jalan dan jembatan, jalan tol, transportasi darat, sungai, laut dan udara, adalah merupakan program pembangunan prioritas jangka menengah Provinsi Kalimantan Timur, yang jika tidak dilakukan upaya-upaya mitigasi, diindikasikan akan berdampak negatif terhadap lingkungan, seperti
  - a. Terlampauinya daya dukung dan daya tampung lingkungan;
  - b. Terganggunya keanekaragaman hayati (flora dan fauna);
  - c. Perubahan iklim mikro;
  - d. Terganggunya kinerja layanan jasa/jasa ekosistem.

Oleh karena itu, guna mencegah pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, maka program-program prioritas tersebut harus dilakukan upaya-upaya mitigasi yang terencana dan terkendali, melalui pendekatan teknologi, sosial dan kelembagaan.

2. Untuk program pembangunan klaster-klaster kawasan, harus memperhatikan:
  - a. Mengharuskan semua rencana kawasan industri agar melakukan kajian lingkungan berskala Amdal, dengan mempertimbangkan dampak lingkungan secara kumulatif, termasuk kegiatan-kegiatan didalamnya agar juga melakukan kajian lingkungan berskala UKL-UPL;
  - b. Memberi perhatian khusus terkait isu-isu strategis pada klaster kawasan industri berikut:



- Kawasan Industri Kariangau, Balikpapan, dengan basis aneka industri
  - Kawasan Industri berbasis migas dan kondensat di Kota Bontang
  - Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional Maloy, dengan basis kegiatan pada pertanian dan oleochemical
- c. Memberikan perhatian khusus terkait isu-isu strategis pada kluster kawasan strategis, seperti:
- Kawasan Perbatasan RI-Malaysia, dan menjadikannya sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN);
  - Kawasan Industri Pariwisata, Kepulauan Derawan;
  - Kawasan Industri jasa Kota Samarinda, dengan aktivitas utama di sektor jasa dan pusat pemerintahan; dan
  - Kawasan Industri Pangan, Kayan Delta Food Estate.

### **3.5 Analisis terhadap Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan pelayanan atau tugas dan fungsi Dinas**

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan di Kalimantan Timur. Dengan demikian setiap rencana program dan kegiatan pembangunan di berbagai sector yang akan dilaksanakan di Kalimantan Timur harus dikaji secara cermat pengaruhnya terhadap kelestarian lingkungan hidup.

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Timur yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pembangunan industri, perdagangan dan koperasi memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan masalah-masalah lingkungan sehingga kajian tentang pengaruh program dan kegiatannya terhadap kelestarian lingkungan hidup harus menjadi bagian tak terpisahkan dari perencanaan strategis.



Berdasarkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi Kalimantan Timur, terdapat 3 (tiga) program rencana jangka panjang yang terindikasi berdampak pada isu strategis lingkungan hidup, yakni :

1. Pengembangan Sentra-sentra industri potensial
2. Penataan Struktur Industri Hulu - Hilir
3. Peningkatan dan Pengembangan Industri Olahan non migas

Dengan demikian, perencanaan strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Timur akan tetap memperhatikan agar tidak berdampak secara negative terhadap :

1. Terlampauinya daya dukung dan daya tampung lingkungan;
2. Terganggunya keanekaragaman hayati (flora dan fauna);
3. Perubahan iklim mikro;
4. Terganggunya kinerja layanan jasa/jasa ekosistem.

Oleh karena itu terhadap semua rencana pengembangan industri dan perdagangan maupun koperasi yang berpeluang menimbulkan dampak lingkungan akan dilakukan kajian lingkungan berskala Amdal, dengan mempertimbangkan dampak lingkungan secara kumulatif, termasuk kegiatan-kegiatan didalamnya agar juga melakukan kajian lingkungan berskala UKL-UPL;

### **3.5 Penentuan Isu-isu Strategis**

Strategi dirancang melalui analisis lingkungan internal dan analisis lingkungan external dengan pencermatan (scanning) terhadap lingkungan dengan menggunakan analisis SWOT. Berdasarkan analisis tersebut di atas diidentifikasi kekuatan dan kelemahan sebagai berikut:

1. Kekuatan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kaltim yang meliputi:
  - 1) Jumlah pegawai yang memadai
  - 2) Insentif pegawai cukup



**PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019-2023**

---

- 3) Adanya motivasi kerja
  - 4) Sarana dan prasarana mencukupi
  - 5) Jumlah aparat Pembina yang memadai
  - 6) Memiliki PPNS-PK
  - 7) Koperasi dan UKM sebagai sektor strategis dalam pemberdayaan masyarakat dalam pengentasan kemiskinan dan penyerapan tenaga kerja
  - 8) Provinsi / Kab/Kota sebagai penggerak koperasi
  - 9) Pertumbuhan jumlah koperasi dan wira usaha baru di kalangan masyarakat/pemuda
  - 10) Koperasi Skala Besar tingkat Provinsi
  - 11) Pembentukan Satgas Pengawasan KSP/KJKS/Kopdit
  - 12) UU No. 17/2012 yang hanya mengakomodir 4 jenis koperasi sehingga pembinaan lebih focus
  - 13) Program pembenahan koperasi tidak aktif
  - 14) Tersedianya prasarana gedung kantor, laboratorium kalibrasi, workshop (instalasi Uji) dan peralatan standar
  - 14) Adanya komitmen pemerintah Daerah Gubernur dan wakil Gubernur untuk mengembangkan kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus.
  - 15) Potensi Sumber Daya Alam yang masih sangat terbarukan untuk di optimalkan pemanfaatannya.
  - 16) Jumlah UKM, IKM dan Koperasi yang tersebar di semua kabupaten kota yang cukup besar.
  - 17) Adanya daerah otonomi baru semakin mempermudah rentang kendali pelaksanaan dan pembinaan program-program pembangunan.
  - 18) Inflasi yang terkendali sebagai factor pengungkit masuknya insvestor baru.
  - 19) Mou Kerjasama Perdagangan Pemerintahan Provinsi Kaltim dengan beberapa Pemerintah Provinsi Lain.
  - 20) Program Perijinan terpadu melalui program OSS
  - 21) Kebijakan Direct call untuk Ekspor Komoditi Kaltim melalui Pelabuhan Kariangau.
  - 22) Pandemi Covid019 yang diawal tahun 2020 belum bisa di kendalikan
2. Kelemahan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kaltim yang meliputi:





**PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019-2023**

---

- 1) Disiplin pegawai masih kurang, Sanksi tidak tegas
- 2) Struktur organisasi belum mantap (penggabungan 3: Departemen Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
- 3) Staf belum optimal memahami pekerjaan semua seksi
- 4) Teknologi dan Informasi (IPTEK) belum memadai
- 5) Penempatan pegawai belum sesuai keahlian
- 6) Teknologi Informasi Harga Bahan Pokok masih belum optimal.
- 7) Hubungan dengan distributor bahan pokok belum optimal
- 8) Belum terbentuknya BLU khusus yang mengelola Pembiayaan bagi Koperasi dan UKM
- 9) Belum terbentuknya Pusat Layanan Usaha Terpadu sebagai lembaga konsultasi pengembangan usaha bagi Koperasi dan UKM
- 10) Potensi dan Kompetensi SDM aparat masih terbatas dan belum dimanfaatkan secara optimal
- 11) Masih belum sinkronnya data koperasi aktif/tidak aktif, berkualitas, sehat/tidak sehat dengan data kab/kota
- 12) Masih rendahnya kualitas dan kesehatan kelembagaan koperasi dan UKM
- 13) Potensi sumber daya bahan baku belum dimanfaatkan secara optimal
- 14) Masih terbatasnya akses pasar produk Koperasi dan UKM
- 15) Kurangnya peralatan standar dan instalasi uji  
Belum maksimalnya koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota
- 16) Belum Optimalnya Pelaksanaan Kebijakan Direct Call
- 17) Belum Tersosialisasi Pelaksanaan Kebijakan OSS  
Belum optimalnya pelaksanaan perjanjian kerjasama perdagangan antar daerah

Analisis lingkungan eksternal dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan yang dihadapi menimbulkan peluang dan ancaman sebagai berikut:



**PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019-2023**

---

1. Peluang Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Timur yang meliputi:

- 1 PP No. 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai
- 2 Peraturan Gubernur Kaltim tentang Disiplin Pegawai
- 3 UU No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian
- 4 Peraturan Presiden RI No. 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional
- 5 Perkembangan IPTEK Sektor Industri
- 6 Peluang pasar untuk produk industri yang cukup banyak
- 7 Tersedia potensi sumber daya alam yang besar
- 8 Kebijakan-kebijakan Perindustrian pusat terhadap peningkatan daya saing sektor industri
- 9 Kebijakan-kebijakan pusat terhadap Koperasi dan UKM
- 10 Peluang pasar ekspor yang cukup banyak
- 11 Kebijakan-kebijakan perdagangan pusat terhadap peningkatan daya saing
- 12 Meningkatnya jumlah pasar di daerah
- 13 Perkembangan teknologi yang semakin meningkat
- 14 Meningkatkan sarana teknologi informasi untuk harga bahan pokok
- 15 Melakukan pengawasan peredaran barang/jasa
- 16 Meningkatkan perlindungan konsumen
- 17 Meningkatkan sarana prasarana perdagangan
- 18 Perkembangan IPTEK
- 19 UU No. 17/2012 tentang Perkoperasian, Perda No. 4/2012 tentang Pemberdayaan Koperasi dan UKM, Perda No. 9/2012 tentang Pembentukan Jamkrida Kaltim, Perda No. 3/2013 tentang Program CSR
- 20 Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Pemasaran Produk Koperasi dan UKM
- 21 Penghargaan bagi Gerakan koperasi/UKM
- 22 Pemberian fasilitas UKM Export.
- 23 Koperasi Skala Besar tingkat Provinsi
- 24 Program Pembiayaan baik melalui dana bergulir maupun dari bank dan non bank
- 25 Program Revitalisasi Koperasi
- 26 Penguatan ekonomi daerah



**PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019-2023**

---

- 27 Meningkatkan kegiatan industri dan perdagangan
  - 28 Meningkatnya jumlah pasar di daerah
  - 29 Perkembangan teknologi yang semakin meningkat
  - 30 Kemudahan perijinan berusaha melalui penerapan OSS untuk meningkatkan iklim usaha yang kondusif di Kaltim
  - 31 Fasilitas Directcall melalui pelabuhan kariangau dan pelabuhan udara di Kaltim
2. Ancaman Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kaltim yang meliputi:
- 1 Kualitas Sumber Daya Manusia kurang
  - 2 isu negatif HaKI, HAM Lingkungan dan Perdagangan Bebas masih berkembang
  - 3 Potensi sumber daya alam yang tak dapat diperbaharui akan habis
  - 4 Kurang cerdasnya konsumen
  - 5 Koordinasi Kab./Kota ke Provinsi belum maksimal
  - 6 Isu negatif HaKI, HAM Lingkungan dan Perindustrian masih berkembang
  - 7 Masih Ketergantungan Tenaga Ahli dari Luar Daerah
  - 8 Masih tergantungnya Kaltim dari pasokan luar daerah dalam pemenuhan barang kebutuhan pokok dan barang penting
  - 9 Lemahnya perlindungan hukum untuk konsumen
  - 10 Rendahnya informasi dari Kab./Kota pada laporan SIUP-TDP
  - 11 Koordinasi Kab/Kota ke Provinsi belum maksimal
  - 12 Peredaran barang yang tidak sesuai aturan
  - 13 Banyaknya usaha -usaha baru melalui online dan retail modern
  - 14 Adanya pola pikir masyarakat untuk membentuk koperasi atau melakukan usaha hanya untuk mendapatkan bantuan
  - 15 Diterapkannya Masyarakat Ekonomi Asean Th 2015, ACFTA, AFTA, Globalisasi
  - 16 Masuknya produk -produk luar dengan kualitas lebih baik
  - 17 UU No. 1/2013 tentang LKM yang membatasi usaha penghimpunan dana masyarakat
  - 19 Perubahan ekonomi di daerah
  - 20 Kepentingan pemanfaatan lahan sector pertambangan dan gas termasuk batubara lebih dominan dibandingkan sector lain, terutama usaha pertanian.
  - 21 Fluktuasi harga Kebutuhan pokok menjelang hari besar keagamaan dan akhir



tahun.

- 22 Kurangnya dukungan Kabupaten kota terhadap penyediaan informasi harga dan stok barang kebutuhan pokok.

Berdasarkan analisis SWOT tersebut serta melihat perkembangan lingkungan rasio nasional, regional dan global melalui isu strategis bidang Industri, Perdagangan, Koperasi dan UKM adalah :

1. Fenomena globalisasi yang membutuhkan daya saing yang lebih kompetitif dan standar-standar baru yang lebih tinggi dalam bidang perdagangan dan industri;
2. Potensi perdagangan dalam negeri yang masih sangat luas dan terbuka untuk dimanfaatkan melalui potensi lokal yang dimiliki oleh Provinsi Kalimantan Timur;
3. Pergeseran paradigma pembangunan Kalimantan Timur dari berbasis migas dan tambang kearah agroindustri;
4. Fenomena krisis ekonomi yang menunjukkan bahwa koperasi dan UKM lebih kuat dan stabil sehingga akan menjadi potensi yang memiliki peluang untuk dikembangkan secara berkelanjutan;
5. Trend global yang mengarah pada *green development* membutuhkan kebijakan dan strategi pengembangan industri, perdagangan, koperasi dan UKM yang lebih ramah lingkungan;
6. Pengembangan sektor industri, perdagangan, koperasi dan UKM membutuhkan integrasi dan sinkronisasi dengan pengembangan sector lain sehingga menjadi daya dukung bersama dalam rangka mewujudkan visi dan misi Provinsi Kalimantan Timur;
7. Peningkatan kinerja pelayanan publik memerlukan SDM yang mumpuni serta didukung sarana dan prasarana kantor pelayanan yang representatif.



## **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

### ***4.1 Tujuan dan Sasaran jangka Menengah Perangkat Daerah***

Sasaran merupakan tujuan terhadap sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Timur dalam jangka waktu tertentu, bagian integral dalam proses perencanaan strategik yang fokus pada tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan atau aktivitas, Perubahan Tujuan Berdasarkan Perubahan RPMJD yang Merupakan Sasaran RPMJD

Adapun yang menjadi tujuan strategik Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Provinsi Kaltim Melakukan perubahan berdasarkan Perubahan RPJMD:

<b>Sebelum Perubahan</b>	<b>Sesudah Perubahan</b>
Meningkatnya Kontribusi Sektor Perindustrian dalam Perekonomian Daerah	Meningkatnya Nilai Ekspor Non Migas dan Non Batubara
	Meningkatnya kontribusi Sektor industri pengolahan Non Migas dan Batubara
Meningkatnya Usaha Ekonomi Koperasi dan UKM	Meningkatnya Usaha Ekonomi Koperasi dan UKM

Berdasarkan tujuan tersebut maka sasaran yang akan dicapai sebagai berikut:

#### **1. Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM.**

Koperasi memiliki peran yang penting dalam perekonomian daerah yaitu untuk mengurangi kemiskinan, pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan rakyat Provinsi Kalimantan Timur. Koperasi berdasarkan Jenis nya terdiri dari Koperasi Simpan Pinjam, Koperasi Konsumen, Koperasi Produsen, Koperasi Pemasaran, dan Koperasi Jasa. Selama ini Koperasi simpan pinjam mendapatkan prioritas pembinaan namun dalam fungsinya sebagai pendorong pertumbuhan perekonomian daerah sangat minim. Oleh karena itu untuk mendorong pertumbuhan perekonomian daerah akan diprioritaskan pengembangan usaha Koperasi Konsumen,



Koperasi Produsen, Koperasi Pemasaran, dan Koperasi Jasa. Yang akan berfokus pada peningkatan tenaga kerja, modal dan aset.

Usaha Kecil Menengah memiliki peran yang penting dalam perekonomian daerah yaitu untuk mengurangi kemiskinan, pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan rakyat Provinsi Kalimantan Timur. Oleh karena itu untuk mendorong pertumbuhan perekonomian daerah akan diprioritaskan pengembangan usaha berfokus pada UKM ekspor dan UKM memanfaatkan bahan baku lokal.

## **2. Peningkatan Kontribusi Lapangan Industri Pengolahan Non Migas Dan Non Batubara**

Hingga saat ini kondisi perekonomian Kalimantan Timur masih bertumpu pada sektor migas dan batubara, namun seiring dengan semakin berkurangnya potensi kedua produk tersebut hanya untuk beberapa tahun kedepan maka pemerintah harus berupaya untuk mencari produk alternatif sebagai pengganti. Sektor industri non migas secara nasional terus meningkat dan sejak tahun 1990 telah menjadi sektor paling dominan menggantikan sektor pertanian namun sektor ini masih terpusat di pulau Jawa dan mulai berangsur-angsur mulai memasuki pulau Sulawesi, Sumatra dan Kalimantan.

Sektor Pertambangan, Penggalian dan sektor Industri Pengolahan merupakan sektor strategis dalam perekonomian Kalimantan Timur. Namun demikian, seiring waktu sektor pengolahan migas dan batubara tidak tepat lagi untuk terus menjadi tumpuan pertumbuhan ekonomi. Keduanya merupakan komoditi non renewable yang pada saatnya akan habis, dan hingga saat ini trs mengalami penurunan. Untuk itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui perubahan RPJMD nya telah melakukan transportasi ekonomi, yaitu dari ekonomi yang bertumpu pada migas dan batubara kpd pertumbuhan ekonomi yang bertumpu pada non migas dan non batubara.



Beberapa tahun belakangan, terus dikembangkan komoditi baru sebagai pengganti produk olahan non migas dan non batubara dari sektor perkebunan, yaitu produk CPO.

### **3. Peningkatan Efisiensi Sistem Distribusi Perdagangan, Daya Saing Komoditi dan Ekspor Non Migas**

Sektor perdagangan dapat memberikan daya dorong dan nilai tambah bagi perekonomian nasional yang merupakan salah satu pilar strategis bagi kesinambungan kinerja ekonomi dan kedaulatan ekonomi nasional. Meningkatkan daya saing perdagangan secara efisien dilakukan dengan menyederhanakan sistem perdagangan dalam negeri maupun perdagangan luar negeri, memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri lebih diutamakan. Khususnya perdagangan Kalimantan Timur dimana kebutuhan dasar ekonomi masyarakat lebih banyak didatangkan dari luar provinsi dan konektivitas antar wilayah dalam provinsi juga masih menjadi kendala.

### **4. Peningkatan Indeks Keberdayaan Konsumen.**

Masalah Utama Konsumen saat ini adalah tingkat kesadaran konsumen akan haknya masih rendah. Rendahnya kesadaran konsumen tentang haknya berpotensi mengurangi kemampuan konsumen dalam melindungi dirinya dari pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab. Konsumen semakin perlu diberdayakan untuk membuat keputusan yang optimal, memahami prefensinya masing - masing dan pilihan - pilihan yang tersedia, mengetahui hak - haknya, mengerti kapan haknya di langgar serta mengajukan komplain dan meminta ganti rugi apabila diperlukan.

Keberdayaan konsumen dapat diwujudkan melalui 2 cara yaitu perlindungan konsumen dan pendidikan konsumen.



Menurut undang - undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, yang dimaksud dengan Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Sementara itu pendidikan konsumen segala upaya yang bertujuan membekali konsumen dengan informasi dan keterampilan untuk membekali tantang di pasar serta meningkatkan niatnya dengan pemasar, sehingga dapat meningkatnya kesejahteraannya.

Untuk mewujudkan perlindungan konsumen yang bersifat preventif, maka pemerintah perlu menumbuhkan keberdayaan konsumen. Indikator yang menggabungkan terwujudnya kondisi keberdayaan konsumen (IKK).

Indeks Keberdayaan Konsumen merupakan indeks yang mengukur kesadaran, pemahaman dan kemampuan menerapkan hak dan kewajibannya konsumen dalam berinteraksi dengan pasar. Nilai Indeks Keberdayaan Konsumen ini dinilai dapat dijadikan dasar untuk membentuk kebijakan perlindungan konsumen 5 (lima) Tahun kedepan (2019 - 2023) guna meningkatkan keberdayaan konsumen melalui berbagai upaya edukasi kepada konsumen sebagai langkah preventif terhadap exses negatif

Berikut Indeks Keberdayan Konsumen (IKK) 10 Kab/Kota

1. Kutai Barat	50.83
2. Mahakam Hulu	44.92
3. Paser	41.06
4. Kota Samarinda	38.78
5. Kutai Kertanegara	38.73
6. Kutai Timur	38.17
7. Kota Balikpapan	36.32





**PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019-2023**

---

8. Berau	36.10
9. Kota Bontang	34.93
10. Penajam Paser Utara	25.26
11. Kaltim	38.41

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.



**PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019-2023**

**Tabel 4.1.  
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah  
Pelayanan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan menengah  
Provinsi Kalimantan Timur**

NO	TUJUAN/INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Capaian Indikator Kinerja		TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN 2021 –TAHUN 2023			Akhir Renstra
				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
(1)	(2)	(3)	(4)	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri Pengolahan non Migas dan Batubara			7,46	8,24	9,44	9,64	9,86	9,86%
	<b>Indikator :</b> Kontribusi Sektor Industri pengolahan Non Migas dan Batubara thd PDRB (%)	1. <b>Peningkatan Kontribusi Lapangan Industri Pengolahan non migas dan non batubara</b>	Pertumbuhan Industri Pengolahan non migas dan non batubara	7,79%	1,43%	3,38%	4,17%	4,51%	4,51%



**PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019-2023**

NO	TUJUAN/INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Capaian Indikator Kinerja		TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN 2021 –TAHUN 2023			Akhir Renstra
				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
(1)	(2)	(3)	(4)	2019	2020	2021	2022	2023	
2	Meningkatnya Nilai Ekspor Non Migas dan Non Batubara <b>Indikator :</b> Nilai Ekspor Komoditas Non Migas dan Batubara (Miliar US\$)			11,76	12,87	1,7	1.72	1.89	1.89
		2. Peningkatan Efisiensi Sistem Distribusi Perdagangan, Daya Saing Komoditi dan Ekspor Non Migas dan Non Batubara	Presentase Ekspor non migas dan non batubara terhadap total ekspor kaltim	-	-	17,55	18,25	18,97	18,97
			Disparitas harga antar wilayah	13,80%	16,40%	18%	18%	17%	17%
		3. Peningkatan Indeks Keberdayaan Konsumen	Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK)	38.4	51,3	54	53	54	54
3	Meningkatnya usaha ekonomi koperasi dan UKM <b>Indikator :</b> -Kontribusi Koperasi dan UKM terhadap PDRB (%)			15,07	15,07	12.92	13,00	13,50	13,50



**PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019-2023**

---

NO	TUJUAN/INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Capaian Indikator Kinerja		TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN 2021 –TAHUN 2023			Akhir Renstra
				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
(1)	(2)	(3)	(4)	2019	2020	2021	2022	2023	
		Peningkatan Usaha Ekonomi Koperasi dan UKM	Nilai Omset Koperasi	998 Milyar	846 Milyar	872 Milyar	907. Milyar	943 Milyar	943 Milyar
			Nilai Omset UKM	2,9 triliun	3,5 Triliun	50 Triliun	52 Triliun	54 Triliun	54 Triliun



## BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

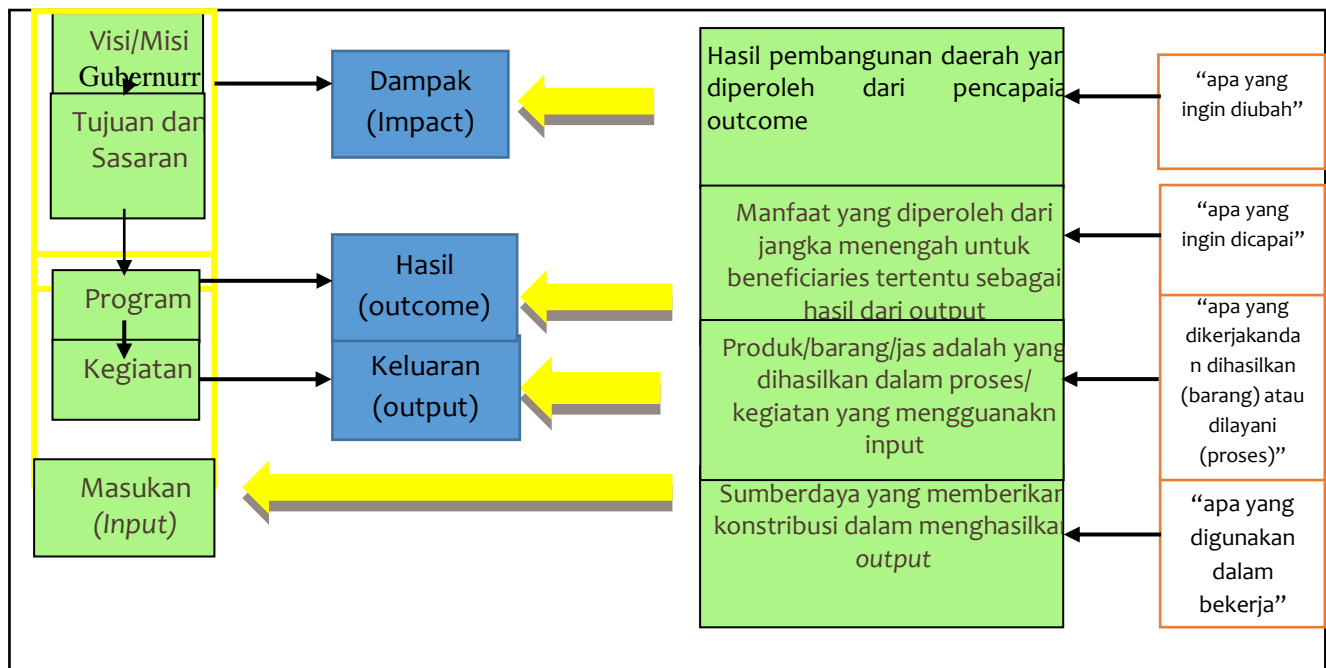
### 5.1 Strategi dan Arah Kebijakan

Dalam berjalan Tahun Kedua Renstra tahun 2020 terjadi perubahan berdasarkan RPJMD Perubahan, maka Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah Melakukan Perubahan dari Tujuan hingga Arah Kebijakan Agar Selaras dengan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur,

Arsitektur Kinerja Pembangunan Daerah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kaltim mengikuti pola sebagai berikut:

**Gambar 5.1**

**Arsitektur Kinerja Pembangunan Daerah**



Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kaltim menetapkan 5 (lima) strategi serta arah kebijakannya dalam pelaksanaan rencana program dan kegiatan tahun 2019-2023, hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut



**PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KRCIL DAN MENENGAH  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019-2023**

**Tabel 5.1**

**Rumusan Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah Dinas Perindustrian  
Perdagangan Koperasi dan UKM  
Provinsi Kalimantan Timur  
tahun 2019 – 2023**

<b>VISI : "Berani Untuk Kalimantan Timur Yang Berdaulat</b>			
<b>Misi II : Berdaulat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Wilayah Dan Ekonomi Kerakyatan Yang Berkeadilan.</b>			
<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN</b>
1 <b>Meningkatnya kontribusi Sektor industri pengolahan Non Migas dan Batubara</b>	1 <b>Peningkatan Kontribusi Lapangan Industri Pengolahan Non migas &amp; non batubara</b>	Pengembangan Industri Unggulan Provinsi	Pengembangan kawasan industri prioritas provinsi Pengembangan industri hulu agro, aneka, dan pangan Pengembangan sumber daya manusia pelaku IKM
		2 <b>Meningkatnya Nilai Ekspor Non Migas dan non Batubara</b>	2 <b>Peningkatan Efisiensi Sistem Distribusi Perdagangan, Daya Saing Komoditi dan Ekspor Non Migas</b>
3 <b>Meningkatnya Usaha Ekonomi Koperasi dan UKM</b>	3 <b>Peningkatan Indeks Keberdayaan Konsumen.</b>	Peningkatan Sistem Distribusi Yang Efisien	<p>Pengendalian inflasi dan stabilisasi kebutuhan barang pokok penting dilakukan melalui fasilitasi dorongan pengembangan potensi daerah</p> <p>Pengembangan akses dan logistic penerapan harga acuan, penataan perdagangan</p> <p>Peningkatan penetrasi pasar, koordinasi dan sinkronisasi pemenuhan kebutuhan bahan pokok penting</p>
		4 <b>Peningkatan Kapasitas Usaha Koperasi dan UKM</b>	<p>Menurunnya Peredaran Barang dan/ atau Jasa Yang Tidak Sesuai Ketentuan</p> <p>Peningkatan perlindungan konsumen dan pengamanan barang diarahkan pada perlindungan hak konsumen</p> <p>Pengembangan cinta produk Indonesia diarahkan pada peningkatan kesadaran konsumen, pelaku usaha, komunitas dan generasi muda serta penerapan pelaksanaan aturan dan pengawasan, dengan melibatkan semua pihak terkait, BPSK dan LPKSM serta masyarakat luas;</p>
3 <b>Meningkatnya Usaha Ekonomi Koperasi dan UKM</b>	4 <b>Peningkatan Kapasitas Usaha Koperasi dan UKM</b>	Revitalisasi Pembinaan dan Pengelolaan Koperasi dan UKM	Peningkatan kapasitas kelembagaan koperasi dan UKM
			Pengembangan platform pasar koperasi dan UKM berbasis digital
			Peningkatan kualitas produk koperasi dan UKM
			Fasilitasi permodalan koperasi dan UKM
			Peningkatan SDM Koperasi dan UKM



## **BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategis yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun (2019-2023), meliputi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis DISPERINDAGKOP dan UKM Kalimantan Timur dengan tetap mengacu pada program pembangunan Perubahan RPJMD Kalimantan Timur 2019-2023 yang sesuai dengan Peraturan menteri Dalam Negeri nomor 90 Tahun 2019 .

Program dan kegiatan pada dasarnya dibagi menjadi tiga kelompok. *Pertama*, program dan kegiatan teknis (*core business*) yang berhubungan langsung dalam pencapaian sasaran Renstra SKPD. *Kedua*, program dan kegiatan teknis yang berhubungan dengan tugas dan fungsi bidang dan UPTD tetapi tidak berhubungan langsung dengan sasaran; namun tetap memberi dukungan terhadap program dan kegiatan yang secara langsung dalam mencapai sasaran Renstra SKPD. *Ketiga*, program dan kegiatan manajerial dan perkantoran sebagai dukungan terhadap penyelenggaraan SKPD sehari-hari seluruh bidang dan UPTD.

### **6.1 Rencana Program dan Kegiatan**

Dalam rangka pencapaian strategi untuk mencapai sasaran Renstra SKPD dibutuhkan program dan kegiatan sebagaimana dijelaskan dalam beberapa tabel berikut ini :

#### **A. Program DISPERINDAGKOP dan UKM Kaltim**

Kebijakan terjabar rinci dalam program kerja prioritas yang merupakan proses penentuan jumlah dan jenis sumber daya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kaltim, yaitu:



## **I. Sumber Dana Desentralisasi**

### **a. Urusan Wajib Koperasi & UKM**

1. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi.
2. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
3. Program Pengembangan Umkm
4. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
5. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
6. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian dan UKM
7. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

### **b. Urusan Pilihan Perindustrian**

1. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
2. Program Pengendalian Izin Usaha Industri.
3. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional.

### **c. Urusan Pilihan Perdagangan**

1. Program Pengembangan Ekspor
2. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan.
3. Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam negeri
4. Program Penerapan Standarisasi Mutu Barang.
5. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.
6. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen.

## **II. Sumber Dana Dekonsentrasi**

### **a. Koperasi & UKM**

1. Program Pemberdayaan Usaha Skala Mikro Kaltim

### **b. Industri**

1. Program Penguatan dan Pengembangan Klaster Industri
2. Program Pemberdayaan Industri Kecil Menengah

### **c. Perdagangan**

1. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
2. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor





- **Kegiatan DISPERINDAGKOP dan UKM Kaltim**

Untuk merealisasikan program kerja prioritas maka implementasinya tertuang dalam kegiatan atau aktifitas yang merupakan penjabaran kebijakan sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran yang memberikan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi Gubernur Kalimantan Timur. Kegiatan–kegiatan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kaltim meliputi:

**I. Sumber Dana Desentralisasi**

**a. Urusan Wajib Koperasi dan UKM**

1. Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah ProvinsiKegiatan Kordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi.
2. Kegiatan Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan.
3. Kegiatan Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha MenengahPelatihan Manajemen Pengelola Koperasi (DAK).
4. Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/unit simpan Pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya Lintas Daerah/kota dalam 1 (satu) Daerah ProvinsiKegiatan Pengkajian dan Pengembangan Pelatihan KUMKM.
5. Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang keanggotaannya Lintas Daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.
6. Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
7. Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran.
8. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
9. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
10. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.
11. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.



11. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
12. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
13. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

**b. Urusan Pilihan Perindustrian**

1. Kegiatan Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi.
2. Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi.
3. Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).

**c. Urusan Pilihan Perdagangan**

1. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) daerah kabupaten/kota Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana
2. Kegiatan : Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) Bagi Daerah Provinsi Yang Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Impor Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
3. Kegiatan : Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri Kegiatan Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan.
4. Kegiatan Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi Kegiatan Produksi, Pembiayaan dan Pemasaran.
5. Kegiatan Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kab/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Perdagangan.
6. Kegiatan Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten / Kota.
7. Kegiatan Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di seluruh daerah Kabupaten/Kota.



8. Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota.
9. Kegiatan Pengendalian usaha Perdagangan bahan berbahaya pengecer terdaftar.

## **II. Sumber Dana Dekonsentrasi**

### **a. Koperasi & UKM**

- Kegiatan Dukungan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

### **B. Industri**

- Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah.

### **C. Perdagangan**

1. Kegiatan Perdagangan Dalam Negeri.
2. Kegiatan Perlindungan Konsumen & Pengawasan Barang.
3. kegiatan Pengembangan Fasilitas Perdagangan Luar Negeri Daerah

## **6.2 Pendanaan Indikatif**

Untuk merealisasikan program dan kegiatan pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kaltim, maka perlu didukung oleh dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) maupun Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Adapun proyeksi pendanaan indikatif tahun 2019 s/d 2023 tercantum pada lampiran Tabel Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Sasaran, dan Pendanaan Indikatif.



**PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KRCIL DAN MENENGAH  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019-2023**

Adapun rencana program, kegiatan dan pendanaan penyajiannya menggunakan Tabel 6.

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) SUB KEGIATAN	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi				
					Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
					Capaian	Realisasi (Rp)	Capaian	realisasi (Rp)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target ( Rp Juta )	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		
Meningkatnya usaha ekonomi koperasi dan UKM	Peningkatan Kapasitas usaha Ekonomi Koperasi dan UKM			Kontribusi Koperasi dan UKM terhadap PDRB (%)	15		15,04		12,92		13		13,5		13,5		Kepala Dinas			
				Kontribusi Koperasi dan UKM terhadap PDRB (%)	15		15,04												Kepala Dinas	
				Nilai Omzet Koperasi	998.772.356.946		846.823.798.385		924.199.489.487		1.016.619.438.436		1.118.281.382.380		1.118.281.382.380		1.118.281.382.380		Bidang Koperasi	
				Nilai Omzet UKM	2.623.325.000.000		3.503.600.000.000		50.000.000.000.000		52.000.000.000.000		54.000.000.000.000		54.000.000.000.000		54.000.000.000.000		Bidang Koperasi	
		2.11.2.11.01.15	PROGRAM PENCIPTAAN IKLIM USAHA USAHA KECIL MENENGAH YANG KONDUSIF	Jumlah UKM Naik Kelas	183	1.121.651.700,00	-	-	-	-	-	-	-	183	1.121.651.700	Bidang Koperasi				
		2.11.2.11.01.16	Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah	Jumlah UKM yang terfasilitasi kebijakan pengembangan UKM	223	1.121.651.700,00	-	-	-	-	-	-	-	223	1.121.651.700	10 Kab/Kota				
		2.11.2.11.01.16	PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF USAHA KECIL MENENGAH	Jumlah WUB Mandiri	105	515.599.076	-	-	-	-	-	-	-	105	515.599.076					
		2.11.2.11.01.16.09	Pengembangan Produksi dan Akses Usaha Kecil Menengah	Jumlah WUB Mandiri yang mendapatkan fasilitasi produksi pemasaran dan pembiayaan	217	515.599.076	-	-	-	-	-	-	-	217	515.599.076	10 Kab/Kota				
		2.11.2.11.01.18	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI	Jumlah Koperasi Sehat	31	4.326.123.237	-	-	-	-	-	-	-	31	4.326.123.237	Bidang Koperasi				
		2.11.2.11.01.18.01	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Program Pembangunan Koperasi	Jumlah Koperasi yang melaksanakan RAT	710	393.874.864	-	-	-	-	-	-	-	710	393.874.864	10 Kab/Kota				
		2.11.2.11.01.18.03	Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi	Jumlah Koperasi yang mendapatkan pembinaan perkoperasian	130	445.716.600	-	-	-	-	-	-	-	130	445.716.600	10 Kab/Kota				
		2.11.2.11.01.18.04	Pelatihan Manajemen Pengelola Koperasi ( DAK	Diklat SKKN bagi Manajer	30	3.486.531.773	-	-	-	-	-	-	-	30	3.486.531.773					
				Diklat peningkatan Kapasitas usaha dan kelembagaan Koperasi	720	-	-	-	-	-	-	-	-	720	-	10 Kab/Kota dan luar daerah				
				Diklat Kewirausahaan bagi kelompok masyarakat Strategis	120	-	-	-	-	-	-	-	-	120	-					
				capacity Building bagi pendamping dan Aparat Pendamping	40	-	-	-	-	-	-	-	-	40	-					
				Rakor evaluasi pelaksanaan DAK	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-					
				Diklat Peningkatan produk unggulan pertanian baku lokal	60	-	-	-	-	-	-	-	-	60	-					
				Diklat Perkoperasian bagi koperasi perkebunan	30	-	-	-	-	-	-	-	-	30	-					
				Diklat Perkoperasian	30	-	-	-	-	-	-	-	-	30	-					



**PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KRCIL DAN MENENGAH  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019-2023**

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM , KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) SUB KEGIATAN	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra	Unit Kerja Daerah Penanggung Jawab	Lokasi			
					Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023					Target ( Rp Juta )	Rp	
					Capaian	Realisasi (Rp)	Capaian	realisasi (Rp)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		
Meningkatnya usaha ekonomi koperasi dan UKM	Peningkatan Kapasitas usaha Ekonomi Koperasi dan UKM			Kontribusi Koperasi dan UKM terhadap PDRB (%)	15		15,04		12,92		13		13,5		13,5		Kepala Dinas			
				Kontribusi Koperasi dan UKM terhadap PDRB (%)	15		15,04												Kepala Dinas	
				Nilai Omzet Koperasi	998.772.356.946		846.823.798.385		924.199.489.487		1.016.619.438.436		1.118.281.382.380		1.118.281.382.380		1.118.281.382.380		Bidang Koperasi	
				Nilai Omzet UKM	2.623.325.000.000		3.503.600.000.000		50.000.000.000.000		52.000.000.000.000		54.000.000.000.000		54.000.000.000.000		54.000.000.000.000		Bidang Koperasi	
			PROGRAM Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Koperasi dan UKM	Jumlah UKM Naik Kelas	183		125	3.592.606.555									Bidang Koperasi			
				Jumlah koperasi Berkualitas	-		4	-												
				Kegiatan Pembinaan Koperasi dan UKM	Jumlah KUKM Yang Diberikan Pembinaan Kelembagaan	-		50	308.486.920									10 Kab/Kota dan luar daerah		
				Kegiatan Produksi Pembiayaan dan Pemasaran	Jumlah KUKM Yang Diberikan Fasilitas Pembiayaan dan Pemasaran	-		30	723.606.845									10 Kab/Kota dan luar daerah		
				Kegiatan Pengawasan Koperasi	Jumlah Koperasi Yang Diawasi	-		23	394.781.890									10 Kab/Kota dan luar daerah		
				Kegiatan Pelatihan Manajemen Pengelola Koperasi (DAK)	Jumlah KUKM yang Mendapatkan Pelatihan	-		730	2.165.730.900									10 Kab/Kota dan luar daerah		
			PROGRAM Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Koperasi dan Usaha Mikro dan Menengah	Jumlah Koperasi & UMKM yang dilatih	300	893.095.330	240	698.566.230						300	1.591.661.560	UPTD Pelkop				
				Pengkajian Pengembangan Pelatihan Koperasi & UMKM	Jumlah Dokumen Kajian & Pengembangan Pelatihan Koperasi & UMKM	11	438.685.230	1	259.964.730					11	698.649.960	Samarinda dan luar Daerah				
				Penyelenggaraan Pelatihan Koperasi dan UMKM	Jumlah Pelatihan Koperasi dan UMKM yang dilaksanakan	10	454.410.100	8	438.601.500					10	893.011.600	Samarinda dan luar Daerah				
<b>PERALIHAN MENJADI PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019</b>																				
			PROGRAM Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase tercapainya target Koperasi sehat (%)							10%	576.519.240		10%	1.625.103.000		Bidang Koperasi			
				Kegiatan : Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	jumlah Koperasi yang dilakukan pengawasan						100 Koperasi	576.519.240		100 Koperasi	1.625.103.000	100 Koperasi	2.201.622.240			
				Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel dan Bertanggungjawab	jumlah kegiatan Pengawasan Koperasi, Satgas Pengawasan Koperasi, Raker Pengawasan, Rapat Pengawasan						106 Laporan	576.519.240			576.519.240		10 Kab/Kota dan luar daerah			
					Jumlah Koperasi Yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan dan Tersedianya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel									20 unit	1.625.103.000	20 unit	#REF!	10 Kab/Kota dan luar daerah		
			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Jumlah KSP/USP yang patuh administrasi dan prinsip koperasi sesuai per-UU-an					50 Koperasi	500.000.000		50 Koperasi	234.348.760		0	50 Koperasi	734.348.760	Bidang Koperasi dan luar daerah		
				Kegiatan : Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang dinilai kesehatannya											10 Koperasi	734.348.760			
				Mengukur Tingkat Kesehatan Koperasi	Pengukuran penilaian kesehatan koperasi, dilat penilaian kesehatan koperasi				50 Keg	500.000.000		50 Keg	234.348.760,00			50 Keg	734.348.760	10 Kab/Kota dan luar daerah		



**PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KRCIL DAN MENENGAH  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019-2023**

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) SUB KEGIATAN	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi				
					Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
					Capaian	Realisasi (Rp)	Capaian	realisasi (Rp)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target (Rp Juta)	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		
Meningkatnya usaha ekonomi koperasi dan UKM	Peningkatan Kapasitas usaha Ekonomi Koperasi dan UKM			Kontribusi Koperasi dan UKM terhadap PDRB (%)	15		15,04		12,92		13		13,5		13,5		Kepala Dinas			
				Kontribusi Koperasi dan UKM terhadap PDRB (%)	15		15,04												Kepala Dinas	
				Nilai Omzet Koperasi	998.772.356.946		846.823.798.385		924.199.489.487		1.016.619.438.436		1.118.281.382.380		1.118.281.382.380		1.118.281.382.380		Bidang Koperasi	
				Nilai Omzet UKM	2.623.325.000.000		3.503.600.000.000		50.000.000.000.000		52.000.000.000.000		54.000.000.000.000		54.000.000.000.000		54.000.000.000.000		Bidang Koperasi	
		02.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN DAN UKM	Jumlah Koperasi dan UKM yang Terlatih (DAK)					600 Koperasi dan UKM	1.000.000.000	520 Koperasi dan UKM	3.688.920.492	520 Koperasi dan UKM	1.642.883.500	520 Koperasi dan UKM	4.688.920.492	Bidang Koperasi			
				Jumlah Koperasi dan UKM yang Terlatih					300 Koperasi dan UKM	600 Koperasi dan UKM	300 Koperasi dan UKM	-	300 Koperasi dan UKM	-	300 Koperasi dan UKM	-	UPTD Pelkop			
		2.17.05.1.01	Kegiatan - Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi dan UKM yang Mengikuti pelatihan					300 Koperasi dan UKM	1.000.000.000	300 Koperasi dan UKM	3.688.920.492	300 Koperasi dan UKM	1.642.883.500	300 Koperasi dan UKM	6.331.803.992				
		2.17.05.1.01.001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian (DAK)					0 KUKM	-	0 KUKM	-			0 KUKM	-	Bidang Koperasi	10 Kabupaten dan luar daerah		
		2.17.05.1.01.001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah Peserta Pelatihan Koperasi - Jumlah Peserta Pelatihan UKM					60/120 OK	1.000.000.000	300/360 OK	1.529.847.298,00			300 Orang	2.529.847.298	UPTD Pelkop			
				Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian									300 Orang	1.642.883.500,00	300 Orang	1.642.883.500	Bidang Koperasi	10 Kab/Kota dan luar daerah		
		02.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Jumlah Koperasi berkualitas					10,00	3.300.000.000	10,00	719.410.000	10,00	1.083.402.000	10,00	5.102.812.000	Bidang Koperasi			
		2.17.06.1.01	Kegiatan - Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang melakukan RAT					15 Koperasi	3.300.000.000	20 Koperasi	719.410.000	25 Koperasi	1.083.402.000	25 Koperasi	5.102.812.000				
		2.17.06.1.01.002	Sub Kegiatan : Peningkatan Produktivitas Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Koperasi yang Mendapatkan Pembiayaan					150 Koperasi	3.300.000.000	150 Koperasi	719.410.000			150 Koperasi	4.019.410.000		10 Kab/Kota dan luar daerah		
				Jumlah Peserta Pelatihan Koperasi					1.050,00	-	-	-			-	-				
				Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bersani Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha									150 unit usaha	1.083.402.000					10 Kab/Kota dan luar daerah	
		2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKMI)	Persentase tercapainya Target UKM naik Kelas (%)					1	500.000.000	1	271.143.400	1	1.008.402.000	1,00	1.779.545.400	Bidang Koperasi			
		2.17.07.1.01	Kegiatan - Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemirisan, Kemudahan Perjinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan.	Jumlah Wira usaha pemula					10 Wirausaha Pemula	500.000.000	10 Wirausaha Pemula	271.143.400	10 Wirausaha Pemula	1.008.402.000	10 Wirausaha Pemula	1.779.545.400				



**PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KRCIL DAN MENENGAH  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019-2023**

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) SUB KEGIATAN	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi						
					Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Target (Rp Juta)	Rp								
					Capaian	Realisasi (Rp)	Capaian	realisasi (Rp)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target (Rp Juta)	Rp								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)						
Meningkatnya usaha ekonomi koperasi dan UKM	Peningkatan Kapasitas usaha Ekonomi Koperasi dan UKM			Kontribusi Koperasi dan UKM terhadap PDRB (%)	15		15,04		12,92		13		13,5		13,5		Kepala Dinas							
				Kontribusi Koperasi dan UKM terhadap PDRB (%)	15		15,04												Kepala Dinas					
				Nilai Omzet Koperasi	998.772.356.946		846.823.798.385		924.199.489.487		1.016.619.438.436		1.118.281.382.380		1.118.281.382.380		1.118.281.382.380		Bidang Koperasi					
				Nilai Omzet UKM	2.623.325.000.000		3.503.600.000.000		50.000.000.000.000		52.000.000.000.000		54.000.000.000.000		54.000.000.000.000		54.000.000.000.000		Bidang Koperasi					
		2.17.07.1.01.001	Merumbuhkan UKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah UKM yang difasilitasi produksi, pembiayaan dan Pemasaran				150 UKM		500.000.000		175 UKM		271.143.400		200 UKM		771.143.400		10 Kab/Kota dan luar daerah				
				Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan									200 unit usaha		1.008.402.000				1.008.402.000					
		02.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UKM	Persentase pertumbuhan UKM yang menggunakan platform pasar berbasis digital (%)				3%		500.000.000		3%		701.986.600		3%		541.701.000		3%		1.743.687.600		Bidang Koperasi
		2.17.08.1.01	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Jumlah wira usaha mandiri				1 Jumlah wira usaha mandiri		500.000.000		1 Jumlah wira usaha mandiri		701.986.600.000		1 Jumlah wira usaha mandiri		541.701.000.000		1 Jumlah wira usaha mandiri		1.743.687.600		
		2.17.08.1.01.001	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Kegiatan Strategis Sektor Koperasi dan UKM, Gabyar UKM (Hari Koperasi dan Hari UMKM) Panti Keberhasilan, Kontak Bisnis, Sertifikasi Halal, promosi dan pemasaran UMKM				50 keg		500.000.000		60 keg		701.986.600.000						70 keg		1.201.986.600		10 Kab/Kota dan luar daerah
				Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi										50 unit usaha		541.701.000.000								
			Meningkatnya Nilai Ekspor Non Migas dan non Batubara	Nilai Ekspor Komoditas Non Migas dan Batubara (Miliar US\$)		12		12,88		1,57		1,72		1,89		1,89								
			Peningkatan efisiensi Sistem Distribusi Perdagangan, daya saing Komoditi dan ekspor non migas dan non batubara	Persentase Ekspor non migas dan non batubara terhadap total ekspor kalim					17,55			18,25		18,97		18,97								
		3.06.2.11.01.17	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN EKSPOR	Nilai ekspor produk olahan non migas dan non batubara		2		710.218.000														710.218.000		Bidang Perdagangan
		3.06.2.11.01.17.02	Pengembangan informasi peluang pasar perdagangan luar negeri	Jumlah eksportir yang mendapatkan fasilitas penerbitan SKA		10		94.055.900														94.055.900		
		3.06.2.11.01.17.03	membangun jejaring dengan eksportir	Jumlah eksportir yang menggunakan fasilitas ekspor Direct Call		6		349.147.100														349.147.100		10 Kab/Kota dan luar daerah
		3.06.2.11.01.17.04	Koordinasi Program Pengembangan ekspor dengan instansi terkait/asosiasi/pengusaha	Jumlah Laporan Kegiatan Ekspor Impor Kab/Kota se Kalimantan Timur		12		267.015.000														267.015.000		10 Kab/Kota dan luar daerah
		3.06.2.11.01.18	PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	Rentang waktu kecukupan stok barang pokok dan barang Penting		4		920.099.800														920.099.800		Bidang Perdagangan
		3.06.2.11.01.18.03	Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk	jumlah fasilitas penyediaan bahan pokok dan penting		40		267.101.400														267.101.400		10 Kab/Kota dan luar daerah
		3.06.2.11.01.18.06	Peningkatan sistem & jaringan informasi perdagangan	Jumlah informasi stok dan harga barang pokok dan barang strategis yang tersedia setiap hari		64		652.998.400														652.998.400		10 Kab/Kota dan luar daerah
		3.06.2.11.01.32	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA PERDAGANGAN	nilai transaksi dalam kerjasama pemasaran		1.812		1.039.014.500														1.039.014.500		Bidang Perdagangan
		3.06.2.11.01.32.01	Kordinasi Pengelolaan Isu Perdagangan	jumlah pelaku usaha yang melakukan kerjasama pemasaran		27		1.039.014.500														1.039.014.500		10 Kab/Kota dan luar daerah
		3.06.2.11.01.34	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PERDAGANGAN	Nilai Ekspor Produk Olahan Non Migas dan Non Batubara				1,53		1.553.841.680												1.553.841.680		Bidang Perdagangan



**PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KRCIL DAN MENENGAH  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019-2023**

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) SUB KEGIATAN	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
					Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra	
					Capaian	Realisasi (Rp)	Capaian	realisasi (Rp)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target ( Rp Juta )	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				Nilai Ekspor Komoditas Non Migas dan Batubara (Miliar US\$)	12		12,88		1,57		1,72		1,89		1,89			
			Peningkatan efisiensi Sistem Distribusi Perdagangan, daya saing Komoditi dan ekspor non migas dan non batubara	Presentase Ekspor non migas dan non batubara terhadap total ekspor kalim					17,55		18,25		18,97		18,97			
				Nilai Kerjasama Perdagangan			501,00											
		3.06.2.11.01.34.01	Kegiatan Perdagangan Dalam Negeri	Rata-Rata Rentang Waktu Kecukupan Stok Barang dan Barang Penting			2,80	485.519.925							485.519.925			10 Kab/Kota dan luar daerah
		3.06.2.11.01.34.02	Kegiatan Perdagangan Luar Negeri	Jumlah Eksporir Yang Mendapatkan Fasilitas			63,00	528.960.000							528.960.000			10 Kab/Kota dan luar daerah
		3.06.2.11.01.34.03	Kegiatan Kerjasama Perdagangan	jumlah UKM yang difasilitasi Kerjasama Perdagangan			25,00	539.361.755							539.361.755			10 Kab/Kota dan luar daerah
		3.06.2.11.1.33	PROGRAM PENERAPAN STANDARISASI MUTU BARANG	Presentasi peningkatan jumlah customer yang dilayani	19	1.948.422.494		884.392.948							2.832.815.442			LIPD BPSMB
		3.06.2.11.1.33.01	Penerapan dan Pengamanan Standarisasi laminan Mutu Barang	ruang lingkup akreditasi Laboratorium yang di	9	1.508.190.394		540.104.748							2.048.295.142			10 Kab/Kota dan luar daerah
				Peningkatan Kapasitas Laboratorium Pengujian, Kalibrasi dan Lembaga Sertifikasi			22,00											
		3.06.2.11.1.33.02	Pelayanan Jasa Teknis Pengujian, Kalibrasi dan Sertifikasi	jumlah Presentase Penerimaan Retribusi	100	440.232.100		344.288.200							784.520.300			10 Kab/Kota dan luar daerah
				Peningkatan, Pelayanan Jasa Teknis Pengujian, Kalibrasi dan Sertifikasi			1.213,00											
		3.06.2.11.01.15	PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN	Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK)	38	1.855.363.111		51,00	950.864.500						2.806.227.611			Bidang Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Baran
				barang beredar yang Wajib SN	30		30,40											
		3.06.2.11.01.15.01	Koordinasi Peningkatan hubungan kerja dengan lembaga perlindungan konsumen	jumlah konsumen yang teredukasi	1.350	453.896.873		600,00	418.450.600						872.347.473			10 Kab/Kota dan luar daerah
		3.06.2.11.01.15.03	Peningkatan Pengawasan beredar barang dan jasa	jumlah pelaku usaha yang diawasi	370	375.474.016		13,00	219.222.550						594.696.566			10 Kab/Kota dan luar daerah
		3.06.2.11.01.15.08	koordinasi penyelesaian permasalahan pengaduan konsumen	jumlah pengaduan Konsumen yang dapat diselesaikan	17	1.025.992.222		15,00	313.191.350						1.339.183.572			10 Kab/Kota dan luar daerah





**PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KRCIL DAN MENENGAH  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019-2023**

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM , KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN SASARAN, PROGRAM (OUTPUT) DAN KEGIATAN (OUTPUT) SUB KEGIATAN	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
					Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra	
					Capaian	Realisasi (Rp)	Capaian	realisasi (Rp)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target ( Rp Juta )	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
<b>PERALIHAN MENJADI PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019</b>																		
	Meningkatnya Nilai Ekspor Non Migas dan non Batubara			Nilai Ekspor Komoditas Non Migas dan Batubara (Miliar US\$)	12		12,88		1,57	-	1,72	-	1,89	-	1,89	-		
	Peningkatan efisiensi Sistem Distribusi Perdagangan, daya saing Komoditi dan ekspor non migas dan non batubara			Presentase Ekspor non migas dan non batubara terhadap total ekspor kalim					17,55	-	18,25	-	18,97	-	18,97	-		
		03.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Presentase pertumbuhan nilai Ekspor Non Migas dan Non BatuBara (%)					5,00	1.000.000.000	5,00	1.185.650.240,00	5,00	1.736.027.000,00	5,00	3.921.677.240		Bidang Perdagangan
		3.30.05.1.01	Kegiatan : Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah Calon Eksporir dan Eksporir yang Mendapatkan Akses Pasar Ekspor (orang)					2,00	1.000.000.000	2,00	1.185.650.240,00	2,00	1.736.027.000,00	2,00	3.921.677.240		
		3.30.05.1.01.003	SubKegiatan : Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Calon Eksporir dan Eksporir yang difasilitasi dalam misi dagang (orang)							2 orang	592.825.120,00			2 orang	592.825.120		10 Kab/Kota dan luar daerah
				Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan									2 pelaku usaha	868.013.500,00		868.013.500		10 Kab/Kota dan luar daerah
		3.30.05.1.01.005	SubKegiatan : Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah Aparat/Pelaku usaha yang mendapatkan fasilitasi pendampingan/pelatihan/bimtek					4 orang	1.000.000.000	4 orang	592.825.120,00			4 orang	1.592.825.120		10 Kab/Kota dan luar daerah
				Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Dibina									2 pelaku usaha	868.013.500,00		868.013.500		10 Kab/Kota dan luar daerah
		3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Jumlah Eksporir yang aktif menggunakan SKA (eksporir)					250,00	-	255,00	152.931.320	260,00	862.010.000	260,00	1.014.941.320		Bidang Perdagangan
		3.30.02.1.04	Kegiatan : Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) Bagi Daerah Provinsi Yang Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Impor	Jumlah SKA yang diterbitkan (lembar)					3500 lembar	-	3500 lembar	152.931.320,00	4000 lembar	862.010.000,00	4000 lembar	1.014.941.320		10 Kab/Kota dan luar daerah
		3.30.02.1.04.004	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah eksporir baru yang menggunakan SKA (eksporir)					0 eksporir	-	5 eksporir	152.931.320,00			5 eksporir	152.931.320		10 Kab/Kota dan luar daerah
				Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal									3500 Dokumen	862.010.000		862.010.000		10 Kab/Kota dan luar daerah
		03.30.07	PROGRAM : PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Jumlah Produk Dalam Negeri Yang difasilitasi pemasaran (produk)					5,00	800.000.000	5,00	722.960.880,00	5,00	995.820.000,00	5,00	2.518.780.880		Bidang Perdagangan
		3.30.07.1.02	Kegiatan : Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Pelaku Usaha yang difasilitasi Pemasaran					10 pelaku usaha	800.000.000	10 pelaku usaha	722.960.880,00	10 pelaku usaha	995.820.000,00	10 pelaku usaha	2.518.780.880		



**PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KRCIL DAN MENENGAH  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019-2023**

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM , KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) SUB KEGIATAN	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi			
					Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		
					Capaian	Realisasi (Rp)	Capaian	realisasi (Rp)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target ( Rp Juta )	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
<b>PERALIHAN MENJADI PERMENDAGRI NO 30 TAHUN 2019</b>																			
	Meningkatnya Nilai Ekspor Non Migas dan non Batubara			Nilai Ekspor Komoditas Non Migas dan Batubara (Miliar US\$)		12		12,88		1,57	-	1,72	-	1,89	-	1,89	-		
	Peningkatan efisiensi Sistem Distribusi Perdagangan, daya saing Komoditi dan ekspor non migas dan non batubara			Presentase Ekspor non migas dan non batubara terhadap total ekspor kalim						17,55	-	18,25	-	18,97	-	18,97	-		
		03.30.07	<b>PROGRAM : PENGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI</b>	Jumlah Produk Dalam Negeri Yang difasilitasi pemasaran (produk)						5,00	800.000.000	5,00	722.960.880,00	5,00	995.820.000,00	5,00	2.518.780.880		Bidang Perdagangan
		3.30.07.1 02	Kegiatan : Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Pelaku Usaha yang difasilitasi Pemasaran						10 pelaku usaha	800.000.000	10 pelaku usaha	722.960.880,00	10 pelaku usaha	995.820.000,00	10 pelaku usaha	2.518.780.880		
		3.30.07.1 02.001	Facilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah Pelaku Usaha yang difasilitasi Pengembangan Produk/jasa						14 Pelaku usaha	800.000.000	14 Pelaku usaha	722.960.880,00			14 Pelaku usaha	1.522.960.880		10 Kab/Kota dan luar daerah
				Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Dihasilkan oleh UMKM melalui Mitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi										14 UMKM	995.820.000,00	14 UMKM	995.820.000		10 Kab/Kota dan luar daerah
	Peningkatan efisiensi Sistem Distribusi Perdagangan, daya saing Komoditi dan ekspor non migas dan non batubara			Disparitas harga antar wilayah		14		16,40		18,00	-	18,00	-	17,00	-	17,00	-		
		3.30.04	<b>PROGRAM : STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING</b>	Persentase Stabilitas Harga BAPOKTING						80,00	1.000.000.000	80,00	1.046.107.320	80,00	1.315.400.000	80,00	3.361.507.320		Bidang Perdagangan
		3.30.04.1 01	Kegiatan : Merjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi	Laporan Ketersediaan Bapokting						12 bulan	1.000.000.000	12 bulan	523.053.660	12 bulan	657.700.000	12 bulan	2.180.753.660		
		3.30.04.1 01.001	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi yang dilaksanakan						5 kegiatan	1.000.000.000	5 kegiatan	523.053.660			5 kegiatan	1.523.053.660		10 Kab/Kota dan luar daerah
				Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor										6 Laporan	657.700.000	6 Laporan	657.700.000		10 Kab/Kota dan luar daerah
		3.30.04.1 02	Kegiatan : Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kab/Kota Yang Terintegrasi Dalam Sistem Perdagangan	Jumlah Komoditi Bapokting yang Dipantau (jenis )								21,00	523.053.660,00	21,00	657.700.000	21,00	1.180.753.660		
		3.30.04.1 02.001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha yang dilakukan pemantauan harga dan stok								15 pelaku Usaha	261.526.830,00			20 pelaku Usaha	261.526.830		10 Kab/Kota dan luar daerah
				Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota										12 Laporan	328.850.000,00				10 Kab/Kota dan luar daerah



**PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KRCIL DAN MENENGAH  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019-2023**

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM , KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) SUB KEGIATAN	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi			
					Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		
					Capaian	Realisasi (Rp)	Capaian	realisasi (Rp)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target ( Rp Juta )	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
<b>PERALIHAN MENJADI PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019</b>																			
				Meningkatnya Nilai Ekspor Non Migas dan non Batubara	Nilai Ekspor Komoditas Non Migas dan Batubara (Miliar US\$)	12		12,88		1,57	-	1,72		1,89		1,89			
				Peningkatan efisiensi Sistem Distribusi Perdagangan, daya saing Komoditi dan ekspor non migas dan non batubara	Disparitas harga antar wilayah	14		16,40		18,00		18,00		17,00		17,00			
		3.30.04.1.02	Operasi Pasar dalam rangka Stabilitas Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pasar murah yang Dilaksanakan								10 keg	261.526.830,00		10 keg	261.526.830		10 Kab/Kota dan luar daerah	
				Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilitas Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi										10 Laporan	328.850.000,00	328.850.000		10 Kab/Kota dan luar daerah	
				Peningkatan Indeks Keberdayaan Konsumen	Indeks Keberdayaan Konsumen (KKK)	38		51,30		54,00	-	53,00		54,00		54,00			
		03.30.06	PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Capaian Target Sertifikat Mutu Barang					85 persen	2.114.797.628		90 persen	2.278.472.832		100 persen	800.000.000	100 persen	5.193.270.460	UPTD BPSMB
		3.30.06.1.02	Kegiatan : Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	persentase pelaksanaan pengujian dan sertifikasi mutu produk					85 persen	2.114.797.628		90 persen	2.278.472.832,00		100 persen	800.000.000	100 persen	5.193.270.460	
		3.30.06.1.	Verifikasi Mutu Produk	jumlah produk yang di verifikasi					2 produk	1.057.398.814		2 produk	1.000.000.000,00				2 produk	2.057.398.814	10 Kab/Kota dan luar daerah
				Jumlah Komoditi Potensial yang Dipantau										3 Komoditi	200.000.000			10 Kab/Kota dan luar daerah	
		3.30.06.1.02	Pengembangan Layanan Pengujian	jumlah contoh yang di uji					45 contoh	-		50 contoh	300.000.000,00				60 contoh	300.000.000	
				Jumlah Dokumen Hasil Pengujian Mutu Barang										60 Dokumen	185.000.000			10 Kab/Kota dan luar daerah	
		3.30.06.1.02.03	Pengembangan Layanan Sertifikasi	jumlah sertifikasi Akreditasi					0 sertifikat	-		0 sertifikat	600.000.000,00				1 sertifikat	600.000.000	10 Kab/Kota dan luar daerah
				Jumlah Sertifikat Produk yang Diberikan										1 Sertifikat	215.000.000			10 Kab/Kota dan luar daerah	
		3.30.06.1.02.04	Pengembangan Layanan Kalibrasi	Jumlah alat yang di kalibrasi					1968 sertifikat	1.057.398.814		2100 sertifikat	378.472.832,00				2215 sertifikat	1.435.871.646	10 Kab/Kota dan luar daerah
				Jumlah Sertifikat Kalibrasi yang Diberikan										2215 Sertifikat	200.000.000		200.000.000		



**PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KRCIL DAN MENENGAH  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019-2023**

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) SUB KEGIATAN	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi			
					Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		
					Capaian	Realisasi (Rp)	Capaian	realisasi (Rp)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target (Rp Juta)	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
PERALIHAN MENJADI PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019																			
				Meningkatnya Nilai Ekspor Non Migas dan non Batubara	Nilai Ekspor Komoditas Non Migas dan Batubara (Miliar US\$)	12		12,88		1,57	-	1,72	-	1,89	-	1,89			
				Peningkatan Indeks Keberdayaan Konsumen	Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK)	38		51,30		54,00	-	53,00	-	54,00	-	54,00			
		03.30.06	PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase peningkatan pengawasan barang beredar dan/atau jasa SNI wajib yang diawasi					15%	2.750.000.000	15%	2.832.000.000	15%	1.650.000.000	15%	7.232.000.000		Bidang Perlindungan Konsumen dan	
		3.30.06.1.01	Kegiatan Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di seluruh daerah Kabupaten/Kota	Konsumen yang telah diberikan edukasi					100 Konsumen	1.885.000.000	1000 Konsumen	1.464.441.250,00	1000 Konsumen	800.000.000,00	1000 Konsumen	4.149.441.250			
		3.30.06.1.01.001	Subkegiatan Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	Jumlah Peserta Sosialisasi edukasi					100 Konsumen	1.000.000.000	1000 Konsumen	623.158.750			1000 Konsumen	1.623.158.750		10 Kab/Kota dan luar daerah	
		3.30.06.1.01.003	Subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen	Jumlah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif									3 BPSK	600.000.000,00	3 BPSK	600		10 Kab/Kota dan luar daerah	
		3.30.06.1.01.003	Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan yang diterima					15,00	865.000.000	15,00	841.282.500			15,00	1.726.282.500			
		3.30.06.1.01.004	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen	Jumlah Pengaduan Konsumen yang Ditangani									20 Pengaduan	200.000.000,00				10 Kab/Kota dan luar daerah	
		3.30.06.1.01.003	Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Barang dan Jasa yang sesuai Ketentuan					21 jenis	865.000.000	24 jenis	1.367.558.750,00	27 jenis	850.000.000,00	27 jenis	3.082.558.750			
		3.30.06.1.01.004	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen	Jumlah pelaku usaha yang diawasi					100 pelaku Usaha	865.000.000	100 pelaku Usaha	1.367.558.750,00			100 pelaku Usaha	2.232.558.750			
		03.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Legalitas Perijinan Perusahaan; Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK)					0;0 Perusahaan; IKK		10; 57 Perusahaan; IKK	100.000.000,00	10; 60 Perusahaan; IKK	1.650.000.000,00	10; 60 Perusahaan; IKK	1.750.000.000		10 Kab/Kota dan luar daerah	
			Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar	Jumlah pelaku usaha yang tertib perijinan nya					10 pelaku usaha		10 pelaku usaha	100.000.000,00	10 pelaku usaha	1.650.000.000,00	10 pelaku usaha				
			Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya	Jumlah pelaku usaha yang diawasi					100,00		100,00	100.000.000,00	100,00	1.650.000.000,00	100,00				



**PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KRCIL DAN MENENGAH  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019-2023**

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) SUB KEGIATAN	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
					Capaian	Realisasi (Rp)	Capaian	realisasi (Rp)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target ( Rp Juta )	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
Meningkatnya kontribusi Sektor industri pengolahan Non Migas dan	Peningkatan Kontribusi lapangan industri pengolahan non migas dan non batubara			Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan non migas dan non batubara terhadap PDRB	0		-1,43%		3,38%		4,17%		4,15%		4,15%			
		3.07.2.11.01.32	PROGRAM PENATAAN STRUKTUR INDUSTRI	Volume usaha perusahaan industri di kawasan peruntukan industri/kawasan industri	71	572.891.667										572.891.667	Bidang Industri	
		3.07.2.11.01.32.02	Pembinaan Keterkaitan Produksi Industri Hulu hingga ke Hilir	Jumlah perusahaan industri di kawasan peruntukan industri/kawasan industri	2	459.518.584										459.518.584	10 kab/Kota dan Luar Daerah	
		3.07.2.11.01.32.03	Pengembangan Sistem Data dan Informasi Industri Daerah	Persentase ketersediaan layanan data dan informasi yang di upload	100	113.373.083										113.373.083	10 kab/Kota dan Luar Daerah	
		3.07.2.11.01.33	Program Peningkatan dan Pengembangan Industri	Pertumbuhan industri olahan	1	2.441.033.750	2,77	2.215.092.165								4.656.125.915	Bidang Industri	
		3.07.2.11.01.33.01	Koordinasi peningkatan dan pengembangan industri	jumlah industri yg difasilitasi pengembangan	30	2.441.033.750										2.441.033.750	10 kab/Kota dan Luar Daerah	
		3.07.2.11.01.33.03	Kegiatan Perencanaan Pembangunan Industri	Jumlah perusahaan industri di kawasan peruntukan industri/kawasan industri			1,00	915.453.250								915.453.250	10 kab/Kota dan Luar Daerah	
				Jumlah dokumen rencana pengembangan industri daerah				2,00										
		3.07.2.11.01.33.04	Kegiatan Pengembangan dan Pembinaan Industri	jumlah industri yg difasilitasi pengembangan				28,00	1.095.968.945							1.095.968.945	10 kab/Kota dan Luar Daerah	
				jumlah sentra yang difasilitasi pengembangannya				3,00										
		3.07.2.11.01.33.05	Kegiatan Pengembangan Informasi Industri	Jumlah Data dan Informasi yang tersedia			14.321,00	203.669.970								203.669.970	10 kab/Kota dan Luar Daerah	



**PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KRCIL DAN MENENGAH  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019-2023**

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) SUB KEGIATAN	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
					Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra	
					Capaian	Realisasi (Rp)	Capaian	realisasi (Rp)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target ( Rp Juta )	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
Meningkatnya kontribusi Sektor industri pengolahan Non Migas dan Batubara	Peningkatan Kontribusi lapangan industri pengolahan non migas dan non batubara			Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan non migas dan non batubara terhadap PDRB		0	-1,43%		3,38%			4,17%		4,15%		4,15%		
		3-31.02	<b>PROGRAM PERENCANAAN DAN</b>	Jumlah Industri Pengolahan Non Migas dan Non Batubara di					2,00	2.000.000.000	2,00	3.022.500.000,00	2,00	2.984.344.373	2,00	8.006.844.373		Bidang Industri
		3-31.02.1	<b>Kegiatan :</b>	Jumlah pelaksanaan rencana pembangunan industri provinsi					5 Dok	2.000.000.000	5 Dok	3.022.500.000,00	5 Dok	2.984.344.373,00	5 Dok	8.006.844.373		
		3-31.02.1	<b>Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan</b>	Jumlah penyusunan kebijakan					3 Dok	2.000.000.000	3 Dok	500.000.000,00			3 Dok	2.500.000.000		10 kab/Kota dan Luar
		01.002	<b>Kebijakan Percepatan Pengembangan,</b>	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan									3 Dokumen	353.479.166,00				10 kab/Kota dan Luar
		3-31.02.1	<b>Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan</b>	Jumlah pelaksanaan rencana pembangunan sumber daya industri					1 Dok	-	1 Dok	500.000.000,00			1 Dok	500.000.000		10 kab/Kota dan Luar
		01.003	<b>Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan</b>	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan									1 Dok	353.479.166,00				10 kab/Kota dan Luar
		3-31.02.1	<b>Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan</b>	Jumlah pelaksanaan rencana pemberdayaan industri dan peran					0 Dok	-	5 Dok	1.522.500.000,00			5 Dok	1.522.500.000		10 kab/Kota dan Luar
		01.005	<b>Pemberdayaan Industri dan Peran Serta</b>	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan									5 Dok	1.923.906.875,00	5 Dok	1.923.906.875		10 kab/Kota dan Luar
		3-31.02.1	<b>Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana</b>	Jumlah evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan industri					1 dok	-	1 dok	500.000.000,00			1 dok	500.000.000		10 kab/Kota dan Luar
		01.006	<b>Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana</b>	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana									1 dok	353.479.166,00	1 Dok	353.479.166		10 kab/Kota dan Luar
		3-31.03	<b>PROGRAM PENGENDALIAN IZIN</b>	Persentase pengendalian izin usaha sektor industri terhadap					5%	3.000.000.000	5%	845.930.000	5%	2.078.142.632	5%	5.924.072.632		Bidang Industri
		3-31.03.1	<b>Kegiatan : Penerbitan Izin Usaha Industri (IU),</b>	Jumlah industri yang dilakukan pemantauan dan pengawasan					13 industri	3.000.000.000	17 industri	845.930.000,00	22 industri	2.078.142.632,00	22 industri	5.924.072.632		
		3-31.03.1	<b>Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi</b>	Jumlah industri yg difasilitasi dalam pemenuhan komitmen perizinan.					3 industri	1.500.000.000	5 industr	422.965.000,00			7 industri	1.922.965.000		10 kab/Kota dan Luar
		01.001	<b>Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi</b>	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan									7 Dokumen	1.039.071.316,00	7 Dokumen	1.039.071.316		10 kab/Kota dan Luar
		3-31.03.1	<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi</b>	Jumlah industri yang dilakukan pengawasan					10 industri	1.500.000.000	12 industri	422.965.000,00			15 industri	1.922.965.000		
		01.002	<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi</b>	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan Di Bidang Industri dalam Lingkup perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Provinsi									10 Dokumen	1.039.071.316,00		1.039.071.316		



**PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KRCIL DAN MENENGAH  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019-2023**

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) SUB KEGIATAN	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
					Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra				
					Capaian	Realisasi (Rp)	Capaian	realisasi (Rp)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target ( Rp Juta )	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
Meningkatnya kontribusi Sektor industri pengolahan Non Migas dan Batubara	Peningkatan Kontribusi lapangan industri pengolahan non migas dan non batubara			Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan non migas dan non batubara terhadap PDRB		0		-1,43%		3,38%			4,17%		4,15%		4,15%		
		3-31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	industri daerah yang dapat dipantau perkembangannya					10 industri	600.000.000	15 industri	627.380.000,00	20 industri	943.439.586,00	20 industri	2.170.819.586		Bidang Industri	
		3-31.04.101	Kegiatan : Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPU, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	jumlah industri yang memiliki IUI, IPU, IUKI dan IPKI kewenangan provinsi					10 industri	600.000.000	15 industri	627.380.000,00	20 industri	943.439.586,00	20 industri	2.170.819.586			
		3-31.04.101.001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	jumlah Perusahaan industri yang terdaftar di SIINAS					0 perusahaan	-	300 perusahaan	209.126.666,67			350 perusahaan	209.126.667		10 kab/Kota dan Luar Daerah	
				Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)									4 Dokumen	314.479.862,00		314.479.862		10 kab/Kota dan Luar Daerah	
		3-31.04.101.002	Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas	Jumlah Dokumen Data Informasi Industri yang disebarluaskan / dipublikasikan					1 dok	600.000.000	1 dok	209.126.666,67			1 dok	809.126.667		10 kab/Kota dan Luar Daerah	
				Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas									1 Dokumen	314.479.862,00		314.479.862		10 kab/Kota dan Luar Daerah	
		3-31.04.101.003	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Perusahaan yang menyampaikan Laporan melalui SIINAS					0 perusahaan	-	100 perusahaan	209.126.666,67			100 perusahaan	209.126.667		10 kab/Kota dan Luar Daerah	
				Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas									5 Dokumen	314.479.862,00		314.479.862		10 kab/Kota dan Luar Daerah	



**PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KRCIL DAN MENENGAH  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019-2023**

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM , KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) SUB KEGIATAN	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
					Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra				
					Capaian	Realisasi (Rp)	Capaian	realisasi (Rp)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target ( Rp Juta )	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
		2.11.2.11. 01.07	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tingkat Kepuasan Pemangku Kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	86	5.199.559.973	87,00	6.648.830.784	-	-	-	-	-	-	11.848.390.757		Sekretariat, UPTD BPSMB dan UPTD Pelkop		
		2.11.2.11. 01.07.01	Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan Pelaksanaan administrasi Perkantoran	12	5.199.559.973	87,00	6.648.830.784	-	-	-	-	-	-	11.848.390.757			Samarinda	
		2.11.2.11. 01.08	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Unit Kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	5	4.372.907.178		3.744.534.660	-	-	-	-	-	-	8.117.441.838		Sekretariat, UPTD BPSMB dan UPTD Pelkop		
		2.11.2.11. 01.08.01	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah peralatan dan kelengkapan kantor	130	2.396.412.115		1.311.857.840	-	-	-	-	-	-	3.708.269.955			Samarinda	
		2.11.2.11. 01.08.02	Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Pemeliharaan peralatan dan kelengkapan kantor	12	1.976.495.063		2.432.676.820	-	-	-	-	-	-	4.409.171.883			Samarinda	
		2.11.2.11. 01.09	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase ASN yang memiliki standar Kompetensi	75	2.248.339.974		1.817.408.455	-	-	-	-	-	-	4.065.748.429		Sekretariat, UPTD BPSMB dan UPTD Pelkop		
		2.11.2.11. 01.09	Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah	168	1.693.044.514		1.578.294.138	-	-	-	-	-	-	3.271.338.652			10 kab/Kota dan Luar Daerah	
		2.11.2.11. 01.09	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan/bimtek	15	555.295.460		239.114.317	-	-	-	-	-	-	794.409.777			10 kab/Kota dan Luar Daerah	
				Jumlah Seragam Pegawai	198	-		-	-	-	-	-	-	-	-				
		2.11.2.11. 01.10	PROGRAM PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN	Nilai Akuntabilitas	75	933.379.830		894.498.198	-	-	-	-	-	-	1.827.878.028		sekretariat		
		2.11.2.11. 01.10.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran	6	423.810.800		258.593.800	-	-	-	-	-	-	682.404.600			10 kab/Kota dan Luar Daerah	
		2.11.2.11. 01.10.02	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	4	509.569.030		635.904.398	-	-	-	-	-	-	1.145.473.428			10 kab/Kota dan Luar Daerah	
			<b>NON PROGRAM</b>																
				Belanja Pegawai PNS		13.922.535.056.00		13.858.411.111.00								27.780.946.167			
Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang bersih,	Terwujudnya Birokrasi Dinas Perindustrian Perdagangan			Persentase Perangkat Daerah Nilai SAKIP nya memperoleh Predikat Minimal	-	-	-	-	71,00			72,00		73,00	73,00				





**PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KRCIL DAN MENENGAH  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019-2023**

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM , KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) SUB KEGIATAN	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi			
					Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		
					Capaian	Realisasi (Rp)	Capaian	realisasi (Rp)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target ( Rp Juta )	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang bersih,	Terwujudnya Birokrasi Dinas Perindustrian Perdagangan			Persentase Perangkat Daerah Nilai SAKIP nya memperoleh Predikat Minimal	-	-	-	-	71,00		72,00		73,00		73,00				
		02.17	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM					88,00	36.734.778.108	89,00	34.046.326.916	90,00	29.083.324.909	90,00	99.864.429.933			
		2.17.01.01	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD					77	1.400.000.000	78	1.187.000.000	79	1.109.000.000	79	3.696.000.000			
		2.17.01.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran					6 Dok	548.787.000	6 Dok	408.084.611		6 Dok	559.000.000	6 Dok	956.871.611	Sekretariat	10 kab/Kota dan Luar
		2.17.01.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah laporan Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD					3 laporan	50.000.000	3 laporan	121.297.000		3 laporan	-	3 laporan	171.297.000	Sekretariat	10 kab/Kota dan Luar Daerah
		2.17.01.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Jumlah Laporan Capaian Kinerja					4 Laporan	204.233.000	4 Laporan	109.056.389		4 Laporan		4 Laporan	313.289.389	Sekretariat	10 kab/Kota dan Luar Daerah
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									4 Dokumen	550.000.000					
		2.17.01.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja					4 Dok	596.980.000	4 Dok	549.000.000		4 Dok	-	4 Dok	1.145.980.000	Sekretariat	Samarinda
		2.17.01.01.02	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan yang disusun sesuai ketentuan					100%	23.247.941.822	100%	25.508.505.509		100%	21.027.568.318	100%	69.784.015.649		
		2.17.01.01.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Daftar Gaji dan Tunjangan ASN					1 Dok	17.947.708.094	1 Dok	17.611.201.008		1 Dok		1 Dok	35.558.909.102	Sekretariat	Samarinda
				jumlah laporan gaji dan Tunjangan ASN							12 bulan				12 bulan				
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN									76 orang	13.167.983.318					
		2.17.01.01.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah, Peningkatan Manajemen Pengelola Keuangan, Tenaga Non PNS					300/12/117 keg/bulan/orang	5.264.819.928	300/12/117 keg/bulan/orang	7.861.890.701				300/12/117 keg/bulan/orang	13.126.710.629	Sekretariat updi BPSMB dan UPTD Pelkop	10 kab/Kota dan Luar Daerah
				Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									25 Dokumen	7.820.000.000					
		2.17.01.01.02.06	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) Yang Dilanggapi					3 Laporan	5.700.000	3 Laporan	5.700.000		3 Laporan		3 Laporan	11.400.000		Samarinda
				Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan									3 Dokumen	10.000.000					
		2.17.01.01.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									2 Laporan	10.000.000					Samarinda



**PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KRCIL DAN MENENGAH  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019-2023**

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) SUB KEGIATAN	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi			
					Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		
					Capaian	Realisasi (Rp)	Capaian	realisasi (Rp)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target (Rp. Juta )	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang bersih,	Terwujudnya Birokrasi Dinas Perindustrian Perdagangan			Persentase Perangkat Daerah Nilai SAKIP nya memperoleh Predikat Minimal	-	-	-	-	71,00	-	72,00	-	73,00	-	73,00	-			
		2.17.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan dan Semesteran					2 kegiatan Rapat	20.000.000	2 kegiatan Rapat	20.000.000			2 kegiatan Rapat	40.000.000		Samarinda	
		2.17.01.1.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Estimasi Realisasi Anggaran					2 kegiatan Rapat	9.713.800	2 kegiatan Rapat	9.713.800			2 kegiatan Rapat	19.427.600		Samarinda	
		2.17.01.1.05	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah PNS Yang Mengikuti Pelatihan/Bimtek					60 orang	1.055.782.000	60 orang	782.368.000			60 orang	1.350.000.000			
		2.17.01.1.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	jumlah Pegawai ASN yg Meningkatkan Disiplin Pegawai					5 orang	745.682.000	5 orang	518.731.000			5 orang	500.000.000		Sekretariat updt BPSMB dan UPTD Pelkop	10 kab/Kota dan Luar Daerah
		2.17.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	jumlah pakaian Dinas					350	60.000.000	200 orang	89.507.000			2000	149.507.000		Sekretariat updt BPSMB	Samarinda
		2.17.01.1.05.03	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah PNS Yang Mengikuti Pelatihan/Bimtek					20 orang	250.100.000	20 orang	174.130.000			20 orang	424.230.000		Sekretariat updt BPSMB	10 kab/Kota dan Luar
		2.17.01.1.06	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Administrasi Umum Perangkat daerah					12 bulan	4.117.069.383	12 bulan	619.792.298			12 bulan	786.000.000			
		2.17.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan Penyediaan Komponen instalasi listrik/Penerangan Kantor Bangunan					120	38.381.632	12 bulan	43.041.552			120	81.423.184		Sekretariat updt BPSMB dan UPTD Pelkop	Samarinda
		2.17.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor dan Perlengkapannya					100 unit	679.508.600	100 unit	115.763.546			100 unit	795.272.146		Sekretariat updt BPSMB dan UPTD Pelkop	Samarinda
		2.17.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah makan minum dan snack kegiatan/Rapat setahun					8000 Kotak/Porsi	3.159.128.792	8000 Kotak/Porsi	247.260.000			8000 Kotak/Porsi	3.406.388.792		Sekretariat updt BPSMB dan UPTD Pelkop	Samarinda
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan											9505 paket				



**PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KRCIL DAN MENENGAH  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019-2023**

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) SUB KEGIATAN	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Daerah Penanggung Jawab	Perangkat Daerah	Lokasi		
					Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra	
					Capaian	Realisasi (Rp)	Capaian	realisasi (Rp)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				Target (Rp Juta)	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang bersih,	Terwujudnya Birokrasi Dinas Perindustrian Perdagangan			Persentase Perangkat Daerah Nilai SAKIP nya memperoleh Predikat Minimal					71,00		72,00		73,00		73,00				
		2.17.01.1.	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah barang yang dicetak (Jenis) Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan					30 jenis	220.650.359	30 jenis	181.127.200			30 jenis	401.777.559	Sekretariat updt BPSMB	Samarinda	
		2.17.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang diadakan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan					1300 eksemplar	19.400.000	1300 eksemplar	32.600.000			1300 eksemplar	52.000.000	Sekretariat updt BPSMB dan UPTD Pelkop	Samarinda	
		2.17.01.1.07	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Disperindagkop					25 unit	2.626.620.000	25 unit	1.017.332.000			25 unit	4.544.708.591			
		2.17.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah Kendaraan Dinas Operasional diadakan Jumlah Unit Kendaraan Petorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan					5 unit	105.000.000	5 unit	100.000.000			5 unit	205.000.000	Sekretariat updt BPSMB dan UPTD	Samarinda	
		2.17.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	jumlah Pengadaan Mebel ( Custom Interior Gedung Kantor ) Jumlah Paket Mebel yang Disediakan					100,00	105.350.000	250 meter	251.780.000			0,0	357.130.000	Sekretariat updt BPSMB dan UPTD	Samarinda	
		2.17.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah Pengadaan Peralatan perbaikan kantor Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					50 unit	892.050.000	50 unit	565.552.000			50 unit	1.457.602.000	Sekretariat updt BPSMB dan UPTD Pelkop	Samarinda	
		2.17.01.1.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah Perencanaan/ Gedung yang dibangun Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan					2 unit	1.524.220.000	2 unit	100.000.000			2 unit	1.624.220.000	Sekretariat updt BPSMB dan UPTD	Samarinda	
		2.17.01.1.08	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Disperindagkop					12 bulan	2.242.055.755	12 bulan	2.684.522.896			12 bulan	2.710.000.000			
		2.17.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materiail setahun Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					15000 materiail	23.940.000	15000 materiail	30.670.000			15000 materiail	54.610.000	Sekretariat updt BPSMB dan UPTD	Samarinda	
		2.17.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah bulan Belanja Listrik, Air, telepon dan Internet terbayarkan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					12 bulan	883.806.542	12 bulan	1.192.664.096			12 bulan	2.076.470.638	Sekretariat updt BPSMB dan UPTD Pelkop		
														36 Laporan	1.200.000.000				



**PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KRCIL DAN MENENGAH  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019-2023**

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN (SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) SUB KEGIATAN)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
					Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra	
					Capaian	Realisasi (Rp)	Capaian	realisasi (Rp)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target (Rp Juta)	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang bersih,	Terwujudnya Birokrasi Dinas Perindustrian Perdagangan			Persentase Perangkat Daerah Nilai SAKIP nya memperoleh Predikat Minimal					71,00		72,00			73,00		73,00		
		2.17.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Kebersihan Kantor Lusa gedung kantor yang dipelihara kebersihannya					145000 m2	1.334.309.213	145000 m2	1.461.188.800			145000 m2	2.795.498.013	Sekretariat updt BPMSB dan UPTD Pelkop	10 kab/Kota dan Luar Daerah
				Jumlah jenis Alat Tulis Kantor (ATK) yang disediakan (jenis)					70 jenis		70 jenis				70 jenis	-		
				Penyediaan Jasa Pengiriman surat dan paket					12 unit		12 unit				12 unit	-		
				Penyediaan Jasa Publikasi setahun					51 lembar		51 lembar				51 lembar	-		
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan									12Laporan	1.500.000.000		1.500.000.000		
		2.17.01.1.09	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah	jumlah bulan Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah					12 bulan	2.045.309.148	12 bulan	2.246.806.213			12 bulan	1.200.000.000		5.492.115.361
		2.17.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas dalam Pemeliharaan setahun					35 Unit		35 Unit	385.251.600			35 Unit	385.251.600	Sekretariat updt BPMSB dan UPTD Pelkop	10 kab/Kota dan Luar Daerah
				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya									35 Unit					
		2.17.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah Pemeliharaan Alat Kantor (Ac, Genset dan Penerangan) dan Gedung : Jumlah Kendaraan Dinas dalam Pemeliharaan setahun					235 unit	452.643.621	235 unit	78.086.200			235 unit	530.729.821	Sekretariat updt BPMSB dan UPTD Pelkop	10 kab/Kota dan Luar Daerah
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya									55 unit	100.000.000				
		2.17.01.1.09.05	Pemeliharaan Mebel	jumlah unit mebel yang dipelihara					2 unit	20.000.000	2 unit	-			2 unit	20.000.000	Sekretariat updt BPMSB dan UPTD Pelkop	10 kab/Kota dan Luar Daerah
				jumlah peralatan dan mesin dalam pemeliharaan					20 unit		20 unit	214.700.000			20 unit	214.700.000	Sekretariat updt BPMSB	10 kab/Kota dan Luar
		2.17.01.1.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara									20 unit	200.000.000				
		2.17.01.1.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	jumlah bulan pemeliharaan aset					0 bulan	596.700.000	0 bulan	614.890.100			0 bulan	1.211.590.100	Sekretariat updt BPMSB	10 kab/Kota dan Luar
				Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara									35 unit	100.000.000				
		2.17.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Luasan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					1000 m2	796.465.527.000.000	1.000,00	953.878.313			1000 0	796.466.480.878.313	Sekretariat updt BPMSB dan UPTD Pelkop	10 kab/Kota dan Luar Daerah
				Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Genset					3850 lt	-	3850 lt				3850 lt	-		
				Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Alat kantor					112 unit	-	112 unit				112 unit	-		
				Belanja Jasa Pemeliharaan Alat Kantor dan Gedung					200 unit	-	200 unit				200 unit	-		
				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi									20 unit	800		20 unit		
<b>Total Realisasi dan Pagu Anggaran</b>										<b>55.799.575.736</b>		<b>53.052.588.000</b>		<b>50.000.000.000</b>				
Keterangan Indikator SubKegiatan Sesuai Dengan Kepmen 050 Kegiatan hanya sampai 2019 s.d 2020																		



**PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019-2023**

## BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN INDUSTRI, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Sebagaimana diketahui bahwa keberhasilan pembangunan Industri, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 tidak hanya dilihat dari besarnya alokasi dana realisasi anggaran, akan tetapi lebih dari itu adalah bagaimana capaian sasaran yang telah direncanakan. Sehubungan dengan hal itu, berikut ini disajikan indikator-indikator sasaran yang akan dicapai tahun 2019-2023, meliputi:

### INDIKATOR KINERJA PERUBAHAN DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN PERUBAHAN RPJMD TAHUN 2019 – 2023

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Realisasi Capaian		Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT</b>								
1	Nilai Ekspor Komoditas Non Migas dan Batubara (Miliar US\$)		11,76	12,87	1,57	1,72	1,89	1,89
2	Kontribusi Sektor Industri pengolahan Non Migas dan Batubara thd PDRB (%)		7,46	8,24	9,44	9,64	9,86	9,86
3	Kontribusi Koperasi dan UKM terhadap PDRB (%)	12,83	15,07	15,04	12,92	13,00	13,50	13,50
<b>ASPEK PELAYANAN UMUM</b>								
Fokus : Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Wajib Koperasi dan UKM								
1	Persentase tercapainya target UKM naik kelas (%)				1	1	1	1
2	Persentase tercapainya target Koperasi sehat (%)				-	10	10	10
3	Persentase pertumbuhan UKM yang menggunakan platform pasar berbasis digital (%)				3	3	3	3
<b>Fokus : Urusan Pelayanan Pilihan Perdagangan</b>								
1	Nilai Ekspor Komoditas Non Migas dan Batubara (Miliar US\$)	1,45	2,04	2,23	1,57	1,72	1,89	1,89



**PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019-2023**

---

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Realisasi Capaian		Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	Persentase pertumbuhan nilai ekspor non migas dan non batubara (%)	-	-	-	5	5	5	5
<b>Fokus : Urusan Pelayanan Pilihan Perindustrian</b>								
1	Jumlah Industri Pengolahan Non Migas dan Non Batubara di kawasan peruntukan industri (industri)	-	-	-	2	2	2	2



**PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019-2023**

---

## **BAB VIII PENUTUP**

Demikian Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kaltim Tahun 2019 sampai Tahun 2023 ini disusun untuk dapat menjadi bahan pertimbangan bagi semua pihak, sehingga apa yang menjadi tujuan pembangunan di sektor industri, perdagangan, koperasi dan UKM dapat terealisasi sebagaimana mestinya.

Samarinda, 28 Januari 2022

Kepala Dinas,

**H. M. YADI ROBYAN NOOR, SE., M.TP**

Pembina Utama

NIP. 196207211988111001